



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat informasi mengenai:



1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10).
- k. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022.
- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0699/KUM/2022.



- o. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 52).
- q. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- r. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- s. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusunan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II** Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.
- Bab III** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV** Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V** Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI** Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.
- Bab VII** Penutup.



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom secara nyata terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950 yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama dan dibentuknya DPRDS, maka pada tanggal 2 Desember 1950 inilah menjadi pancangan tonggak sejarah berdiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1.2 Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 114°51'19" BT – 115°36'19" BT dan antara 02°29'58" LS – 02°56'10" LS. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak ke arah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh 135 Km. Wilayahnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Kota Baru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten yang beribukota di Kandangan ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan , 144 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpung, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km². Lebih dari separuh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan di kemiringan 0-2 persen. Menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di atas 1.000 meter. Berdasarkan kemiringannya 70,95 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



berada pada kelas kemiringan 0-2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah berada pada kemiringan lebih dari 40 persen. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan didirikan pada 4 Juli 1959 berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang – undang dengan ibukota Kandangan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak 243.132 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 122.172 jiwa dan perempuan 120.387 jiwa. Daerah ini merupakan daerah rawa, sebagian besar penduduk bermata-pencaharian sebagai petani dan nelayan.

2.1.3 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021-2023 adalah “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat” dengan Misi:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal (daya saing).
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian (kesenjangan).
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (pemberdayaan).
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis (kelembagaan, keagamaan).

2.1.4 Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah.
2. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;



- o. Dinas Perikanan;
 - p. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - q. Dinas Pertanian;
 - r. Dinas Perdagangan; dan
 - s. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian.
3. Fungsi penunjang pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pembentukan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 11 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kandangan;
- b. Kecamatan Sungai Raya;
- c. Kecamatan Simpur;
- d. Kecamatan Kalumpang;
- e. Kecamatan Angkinang;
- f. Kecamatan Telaga Langsat;
- g. Kecamatan Padang Batung;
- h. Kecamatan Loksado;
- i. Kecamatan Daha Utara;
- j. Kecamatan Daha Selatan; dan
- k. Kecamatan Daha Barat.

Kecamatan Kandangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 4 kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kandangan Kota;
- b. Kelurahan Kandangan Utara;
- c. Kelurahan Kandangan Barat;
- d. Kelurahan Jambu Hilir.



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2023 dijabat oleh Drs. H. Achmad Fikry, M. AP dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.

2.1.5 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ekonomi Makro meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 4,54 persen.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 2,29 persen.
- c. Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 0,260.
- d. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 69,76.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 5,31 persen.
- f. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 sebesar 8.349.097,08 (Juta Rupiah).

2.1.5.1 Tingkat Kemiskinan

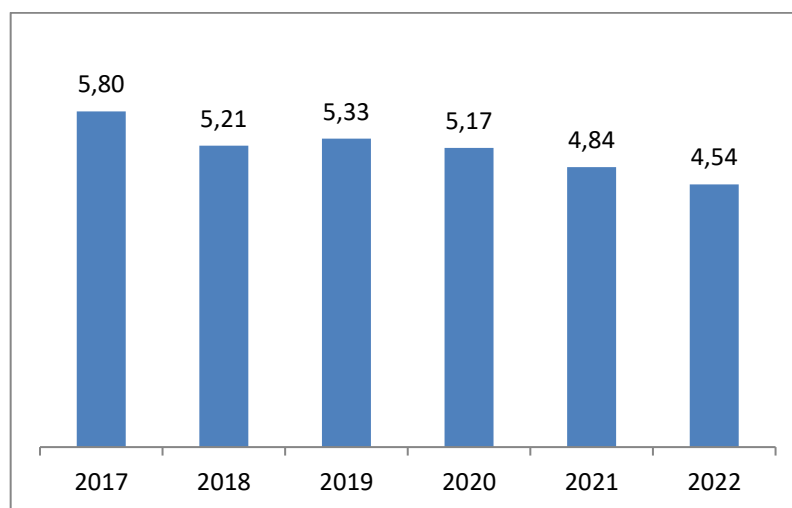
Kemiskinan suatu wilayah ditentukan oleh beberapa indikator antara lain persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan pada suatu wilayah. Nilai garis kemiskinan setiap wilayah dan periode waktu berbeda. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin pada suatu daerah dan periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai



dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh perbedaan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10,80 ribu orang atau sekitar 4,54 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,47 ribu orang atau 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi tahun 2022 ini merupakan gambaran kemiskinan dengan data yang dikumpulkan pada Maret 2022. Pada kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19, tingkat kemiskinan masih bisa mengalami penurunan, hal ini terjadi karena adanya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Program dari pusat maupun daerah dengan sasaran penduduk miskin ini, sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan di tengah adanya pandemi. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Program Rumah Sejahtera (Bedah Rumah), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Ranstra), dan program-program pendukung penanggulangan Kemiskinan lainnya.

Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022 (persen)



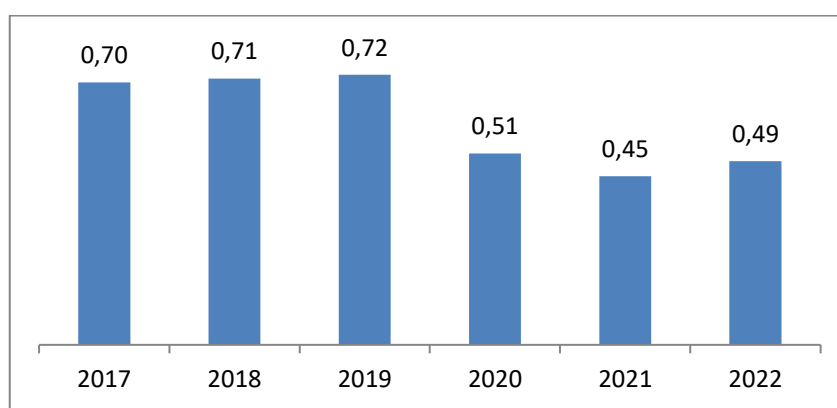
Sumber: BPS Kab. HSS

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,49. Perubahan indeks kedalaman antar tahun memiliki kecenderungan



menurun. Jika dibandingkan tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,45 menjadi 0,49. Nilai P1 yang meningkat menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tahun 2022 lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, indeks kedalaman tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan indeks kedalaman tahun 2018. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Grafik 2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022

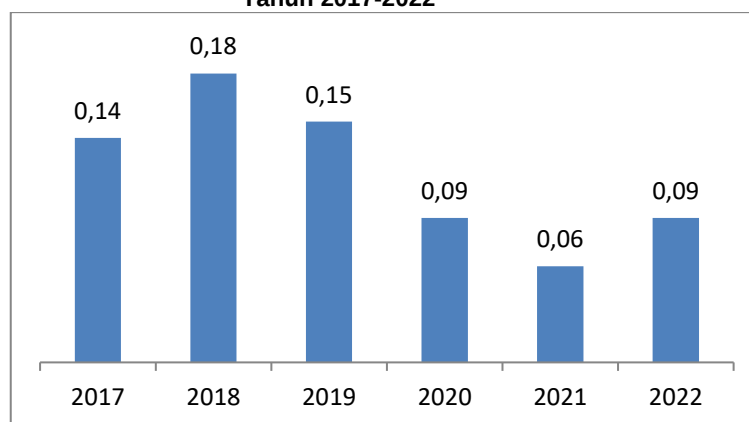


Sumber : BPS Kab. HSS

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,09. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,03 dibandingkan tahun 2021. Keadaan ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya meningkat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Grafik 2.3 Indeks Keparahatan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022

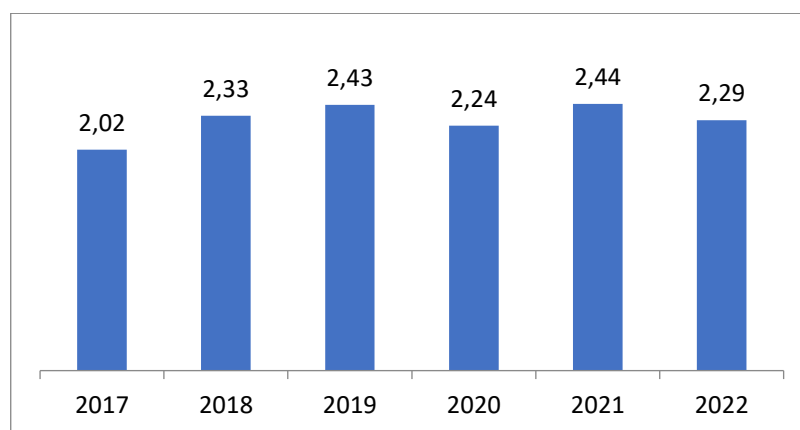


Sumber : BPS Kab. HSS

2.1.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada indikator makro tentang ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022 (persen)



Sumber : BPS Kab. HSS

Tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami fluktuasi dengan range antara 2,02 – 2,44 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 2,29 persen pada tahun 2022 dan 2,44 persen pada 2021. Terjadi penurunan sebesar 0,15 poin atau 6,15 persen dibanding tahun 2021. Pada kurun waktu tiga tahun ini terjadi



pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir telah berjalan pemulihan ekonomi dari pemerintah dan masyarakat. Penurunan TPT tahun 2022 salah satunya disebabkan berkurangnya lapangan kerja yang dibuka terutama penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

**Tabel.2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021-2022**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (persen)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (persen) HSS	2,44	2,29	(6,15)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (persen) Kalsel	4,95	4,74	(4,24)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (persen)	6,49	5,86	(9,71)

Sumber Dokumen: BPS Kab. HSS

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan TPT Nasional, memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini juga sejalan dengan perubahan atau pertumbuhan TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 2021 ke 2022 yang berada ditengah-tengah perubahan/pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. TPT Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan menjadi 4,74 dan Tingkat Nasional mengalami penurunan menjadi 5,86.

2.1.5.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Penghitungan Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

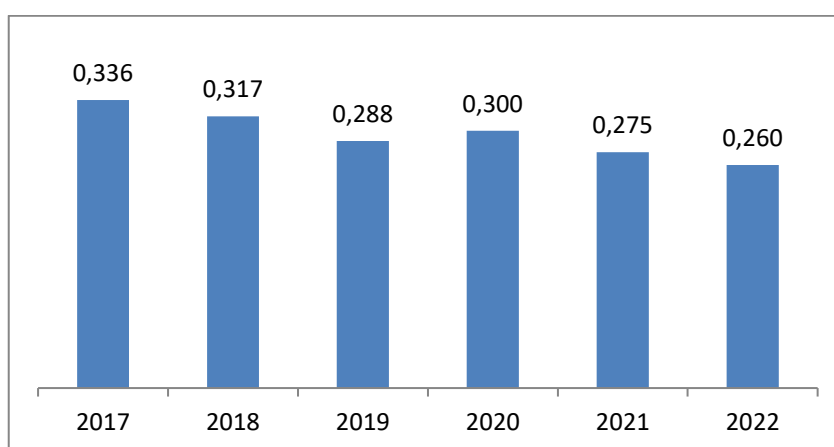
- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar



0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Pengolahan data SUSENAS Maret 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 nilai Indeks Gini sebesar 0,260. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Nilai Indeks Gini dari tahun 2020-2022 memiliki tren yang relatif menurun. Hal ini menggambarkan semakin merata distribusi pendapatan penduduk. Dibandingkan gini ratio tahun 2021 sebesar 0,275 terjadi penurunan angka Gini Ratio sebesar 0,015 poin pada tahun 2022. Artinya ketimpangan/ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin mengecil.

Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2022



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2022, BPS Kab. HSS

2.1.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah sebesar 69,76 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota HSS	69,21	69,76	(0,52)
2	Provinsi Kal-Sel	71,28	71,84	(0,79)
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	(0,86)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah sebesar 69,76 poin. Jika dibandingkan dengan IPM tahun 2021 sebesar 69,21 poin, sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin (0,79 persen). Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya keempat komponen pembentuk IPM yaitu (i) umur harapan hidup saat lahir (AHH), (ii) harapan lama sekolah (HLS), (iii) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (iv) Pengeluaran perkapita. Umur harapan hidup bayi yang lahir tahun 2022 diharapkan mencapai 66,51 tahun, hal ini terjadi peningkatan harapan umur lebih lama 0,39 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,79 tahun dengan harapan lama sekolah 12,40 tahun. Sementara, pada sisi standar hidup yang didekati oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun sebesar Rp13.157.000,00/jiwa atau meningkat Rp421.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Uraian	Kabupaten/Kota HSS (Milyar rupiah)			Provinsi (Milyar rupiah)	Nasional (Milyar Rupiah)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010)	4.650,23	4.844,91	5.039,67	142.339,28	11.710,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) HSS	-1,19	4,19	4,02	5,11	5,31

Sumber: BPS Kab. HSS

Selama kurun waktu Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada diatas angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar



4,19% mengalami percepatan pertumbuhan dibanding tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,02%.

2.1.5.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Menurut data dari BPS, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada mengeluarkan angka tingkat inflasi. Inflasi yang dapat digunakan sebagai acuan adalah inflasi Kota Tanjung dan Kota Banjarmasin. Pada Desember 2022 inflasi (y on y) yang terjadi sebesar 5,01 persen. Komoditas yang memiliki andil dalam inflasi Kota Tanjung dan Kota Banjarmasin antara lain makanan, minuman dan tembakau, perawatan pribadi dan jasa lainnya, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga.

2.1.5.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,13	24,56	24,80	23,60	20,73
B	Pertambangan dan Penggalian	10,79	10,37	9,72	11,45	19,68
C	Industri Pengolahan	8,11	8,01	7,86	8,07	7,47
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air	0,34	0,35	0,38	0,37	0,33
F	Konstruksi	7,92	8,06	7,81	7,90	7,45



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,26	9,41	9,34	9,44	9,17
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,23	5,17	5,12	4,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,65	3,82	3,83	3,76	3,64
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	4,53	4,91	4,99	4,55
K	Jasa Keuangan	2,00	1,98	1,99	1,99	1,78
L	Real Estate	2,36	2,41	2,59	2,56	2,30
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,13	0,13	0,12	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,28	9,34	9,28	8,65	7,42
P	Jasa Pendidikan	7,51	7,65	7,74	7,44	6,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,25	2,52	2,61	2,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,76	1,84	1,85	1,81	1,71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2023, BPS Katalog:1102001.6306

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori pertambangan dan penggalian, dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 20,73% dari total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022. Dilanjutkan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 19,68% dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,17%, kategori industri pengolahan 7,47% dan kategori konstruksi sebesar 7,45%.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan diarahkan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2022;
- Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 Tentang Pemotongan



Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021;

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik Tahun 2022 berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-170/PK/2021 Tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- e. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- d. Pendapatan yang diperoleh dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan sarana prasarana dan sarana penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.



2. Kebijakan Dana Perimbangan

- a. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021.
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2022, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2022 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2022, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2021.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diprediksikan untuk Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, mutasi dan penambahan PNSD yang telah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai.



b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa dimaksud dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat dan terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil audit merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUA-PPAS Tahun 2022 didasarkan pada hasil verifikasi dan evaluasi proposal oleh SKPD teknis dan telah dituangkan dalam rekomendasi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau



masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sehingga dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

a. Belanja bagi hasil

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja bantuan keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Belanja Langsung

- a. Menghindari pemborosan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan yang telah ditentukan dan berdasarkan analisa beban kerja serta kewajaran biaya yang dikaitkan dengan outputnya.
- b. Proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan dilakukan secara selektif serta proporsional.
- c. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD dibatasi sesuai tingkat kewajaran dan beban tugas.
- d. Segala bentuk biaya pelatihan dan perjalanan dinas dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting dan dilakukan secara selektif.

Selain itu belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan belanja *mandatory* yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp331.605.079.795,00 dengan realisasi selama tahun 2022 sebesar Rp268.811.142.719,00.
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp218.531.477.093,00 dengan realisasi selama tahun 2022 sebesar Rp191.905.893.108,00.
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran untuk belanja infrastruktur daerah sebesar Rp476.211.729.718,00 dengan realisasi selama tahun 2022 sebesar Rp443.120.239.320,55.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran untuk



alokasi dana desa sebesar Rp78.300.000.000,00 dengan realisasi selama tahun 2022 sebesar Rp78.300.000.000,00.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Struktur anggaran setelah pendapatan dan belanja daerah adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan terjadi karena adanya surplus dan defisit anggaran daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan jika terjadi defisit anggaran yang berfungsi untuk menutup selisih kurang anggaran. Adapun sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2022 bersumber dari penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu (SiLPA);

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan dana cadangan.

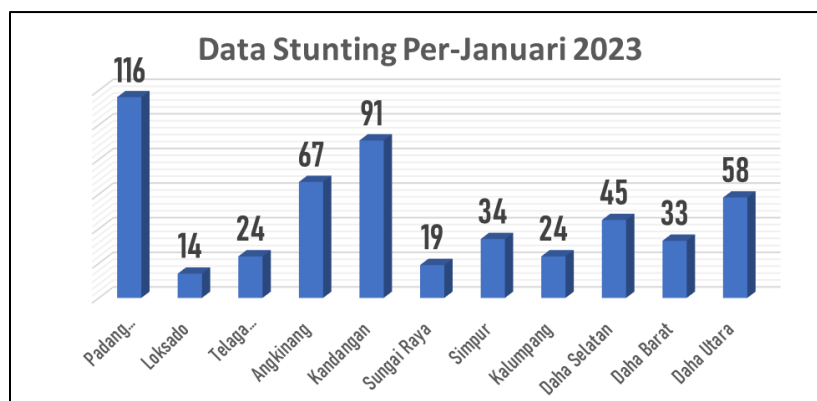
2.2.4 Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

1. Kondisi Stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan prevalensi yang signifikan yaitu sebanyak 8,8% dari 29,1% pada tahun 2021 menjadi 20,3% pada tahun 2022. Berikut data jumlah balita stunting real time (satu NIK).



Satu NIK merupakan aplikasi pilot project dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merekap semua data yang ada di kabupaten termasuk stunting. Dapat dilihat dari data diatas data tertinggi ada di Kecamatan Padang Batung sebanyak 116 Balita, dan terendah Kecamatan Loksado 14 Balita. Total Balita dengan Stunting ada sebanyak 525 per-Januari 2023.

2. Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi

Aksi Integrasi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama- sama sehingga institusi penanggung jawab Aksi Integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Terdapat 5 (lima) pilar dalam percepatan pencegahan stunting yaitu:

- Pilar 1 berupa komitmen dan visi kepemimpinan;
- Pilar 2 berupa kampanye nasional dan perubahan perilaku;
- Pilar 3 berupa konvergensi program pusat, daerah dan desa;
- Pilar 4 berupa ketahanan pangan dan gizi;
- Pilar 5 berupa pemantauan dan evaluasi.

Dari ke 5 (lima) pilar tersebut hal yang akan diintervensi adalah gizi spesifik dan gizi sensitif yang nantinya akan menghasilkan output berupa konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan dengan sasaran 1.000 HPK. Kemudian dari hasil output tersebut dapat mengintervensi pada perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi sehingga berdampak baik yaitu terwujudnya prevalensi stunting turun.

Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi, yaitu:

- (1) Analisis situasi, Koordinator: Bappelitbangda.
- (2) Menyusun rencana kegiatan, Koordinator: Bappelitbangda.
- (3) Rembuk Stunting Kabupaten/Kota, Koordinator: Sekretaris Daerah.



- (4) Peraturan Bupati tentang kewenangan desa, Koordinator: Pemrakarsa/Delegasi.
- (5) Pembinaan kader pembangunan manusia, Koordinator: Delegasi OPD.
- (6) Sistem manajemen data stunting, Koordinator: Bappelitbangda
- (7) Pengukuran dan publikasi data stunting, Koordinator: Dinas Kesehatan.
- (8) Reviu kinerja tahunan, Koordinator: Sekretaris Daerah dan Bappelitbangda.

3. Dukungan Anggaran untuk Stunting

Pada tahun 2022 berdasarkan keadaan lokus stunting terpilih sebanyak 9 program, 20 Kegiatan, dan 62 Sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp172.126.700.126,55 dengan realisasi sebesar Rp160.831.921.454,50 yang terbagi dalam beberapa program kegiatan percepatan penurunan stunting.

4. Inovasi dalam Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Inovasi dalam penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

- SI MIDUN Chating ke FASKES
- Gerakan Ba Asuh Di Lanting (Gerakan Dapur Sehat Bersama Menjadi Orang Tua Asuh Dalam Penanggulangan Stunting)
- PRS
- GEBRAK SEHATI
- SIGO (Sentra Industri Go Open) UMKM Naik Kelas

5. Penanganan Stunting

Penanganan stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan dengan intervensi oleh beberapa SKPD/OPD yang terdiri dari:

- (1) Dinas Kesehatan melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pemberian TTD, PMT, Vit. A, Pelayanan Kesehatan, Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita, serta Mengedukasi masyarakat untuk menerapkan PHBS.
- (2) Dinas Pendidikan melalui program pengelolaan Pendidikan anak usia dini dengan melaksanakan kegiatan:
 - Diklat Dasar Pengasuhan Stimulasi Penanganan Stunting
 - Diklat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan melakukan kegiatan survei lapangan mengenai kepemilikan Jamban Sehat dan Air



Minum, serta Sanitasi yang Layak, agar stunting dan kemiskinan Ekstrem dapat tertangani dengan baik.

- (4) Dinas Perumahan Rakyat KPLH dengan melaksanakan kegiatan sinkronisasi data dan pengusulan bagi keluarga yang terdata stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- (5) Dinas PPKBPPPA melalui Program Pengendalian Penduduk dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan melaksanakan kegiatan:
 - TPK untuk Keluarga Beresiko Stunting, Bantuan Sosial oleh BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting) Untuk Penurunan Stunting.
 - Pemberian KIT Stunting dan KIT Siap Nikah.
- (6) Dinas Ketahanan Pangan melalui Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pemberian benih, pupuk untuk pemanfaatan lahan pekarangan bagi keluarga stunting.
- (7) Dinas Pertanian melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan bibit sayuran, ternak, padi, pemanfaatan pekarangan dan penyuluhan.
- (8) Dinas Sosial melalui Program Perlindungan dan jaminan Sosial dengan melaksanakan pemberian bantuan sosial keluarga kurang mampu yang memiliki anak stunting.
- (9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melaksanakan kegiatan penerapan Aplikasi E-HDW untuk 1000 HPK untuk cegah Stunting melalui KPM pada masyarakat desa.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2022 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.1 berikut ini.

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2022

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan / Sisa Pengeluaran (Rp)
I	Pendapatan dan Belanja			
	Pendapatan Daerah	1.381.523.564.269,00	1.574.848.507.549,88	193.324.943.280,88
	Belanja Daerah	1.595.686.712.689,00	1.408.914.769.988,05	(186.771.942.700,95)
	Surplus (defisit)	(214.163.148.420,00)	165.933.737.561,83	380.096.885.981,83
II	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	224.163.148.420,00	224.206.368.418,74	43.219.998,74
	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	214.163.148.420,00	214.206.368.418,74	43.219.998,74
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	380.140.105.980,57	380.140.105.980,57

Berdasarkan tabel 3.1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp1.574.848.507.549,88 lebih besar Rp193.324.943.280,88 atau 13,99% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.381.523.564.269,00.
2. Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.408.914.769.988,05 lebih rendah Rp186.771.942.700,95 atau 11,70% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.595.686.712.689,00.
3. Pada realisasi APBD TA 2022 terdapat surplus sebelum pembiayaan sebesar Rp165.933.737.561,83. Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp214.206.368.418,74 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp380.140.105.980,57.

SiLPA TA 2022 berasal dari pelampauan target pendapatan daerah sebesar Rp193.324.943.280,88 atau 13,99%; efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp186.771.942.700,95 atau 11,70% dan Pelampauan pembiayaan netto sebesar Rp43.219.998,74 atau 0,02%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2022 dan 2021

Perbandingan realisasi TA 2022 dengan TA 2021 disajikan pada Tabel 3.1.2. Berdasarkan Tabel 3.1.2 tersebut, nampak bahwa:

1. Pendapatan daerah TA 2022 naik sebesar Rp232.254.224.154,26 atau 17,30%.



2. Belanja daerah TA 2022 turun sebesar Rp11.869.039.267,11 atau 0,84%.
3. Pembiayaan Neto turun sebesar Rp88.146.305.859,54 atau 29,15% sedangkan SiLPA naik sebesar Rp155.976.957.561,83 atau 69,58%.

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2022 dan TA 2021

	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	TA.2022 - TA.2021 (Rp)	%
I	Pendapatan dan Belanja				
	Pendapatan Daerah	1.574.848.507.549,88	1.342.594.283.395,62	232.254.224.154,26	17,30
	Belanja Daerah	1.408.914.769.988,05	1.420.783.809.255,16	(11.869.039.267,11)	(0,84)
	Surplus (defisit)	165.933.737.561,83	(78.189.525.859,54)	244.123.263.421,37	(312,22)
II	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	224.206.368.418,74	302.352.674.278,28	(78.146.305.859,54)	(25,85)
	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	214.206.368.418,74	302.352.674.278,28	(88.146.305.859,54)	(29,15)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	380.140.105.980,57	224.163.148.418,74	155.976.957.561,83	69,58

3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2022

Realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp1.408.914.769.988,05 terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.013.633.493.802,50, belanja modal sebesar Rp201.501.385.149,55, belanja tidak terduga sebesar Rp2.515.261.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp191.264.630.036,00.

3.1.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dengan menggunakan total realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebagai tolak ukur *persentase*, jumlah masing-masing perbandingan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp166.386.113.020,88 atau sebesar 10,57% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.574.848.507.549,88;
- b. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.407.985.852.088,00 atau sebesar 89,40% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.574.848.507.549,88;
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar Rp476.542.441,00 atau sebesar 0,03% dari keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.574.848.507.549,88;
- d. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp491.961.749.591,00 atau sebesar 34,92% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;
- e. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp469.412.076.976,50 atau sebesar 33,32% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;



- f. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp33.859.162.335,00 atau sebesar 2,40% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;
- g. Realisasi Belanja Bansos TA 2022 sebesar Rp18.400.504.900,00 atau sebesar 1,31% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;
- h. Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp201.501.385.149,55 atau sebesar 14,30% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;
- i. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp2.515.261.000,00 atau sebesar 0,18% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05;
- j. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp191.264.630.036,00 atau sebesar 13,58% dari total realisasi belanja daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya di bidang pendapatan Tahun 2022 adalah masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang perpajakan daerah yang menyebabkan selalu ada tunggakan pajak.

Sedangkan pada pos belanja daerah terealisasi sebesar 88,30% dibandingkan dengan anggarannya. Tidak tercapainya target Belanja TA 2022 merupakan akibat dari efisiensi anggaran pada tiap-tiap pos belanja.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 6) yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

Tabel 4.1.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kode	Nama SKPD
1	01.01.01	Dinas Pendidikan
2	01.02.01	Dinas Kesehatan
3	01.02.02	RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
4	01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	01.04.01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
6	01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	01.06.01	Dinas Sosial
9	02.03.01	Dinas Ketahanan Pangan
10	02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	02.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	02.09.01	Dinas Perhubungan
14	02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	02.11.01	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
16	02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	02.13.01	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
18	02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	03.01.01	Dinas Perikanan
20	03.03.01	Dinas Pertanian
21	03.06.01	Dinas Perdagangan
22	04.01.01	Sekretariat Daerah
23	4.01.01.1	Bagian Hukum
24	4.01.01.2	Bagian Pemerintahan
25	4.01.01.3	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Kode	Nama SKPD
26	4.01.01.4	Bagian Kesejahteraan Rakyat
27	4.01.01.5	Bagian Organisasi
28	4.01.01.6	Bagian Umum
29	4.01.01.7	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
30	4.01.01.8	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
31	04.02.01	Inspektorat Kabupaten
32	04.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	04.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
34	04.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	04.08.01	Sekretariat DPRD
36	04.11.01	Kecamatan Sungai Raya
37	04.11.02	Kecamatan Padang Batung
38	04.11.03	Kecamatan Telaga Langsat
39	04.11.04	Kecamatan Angkinang
40	04.11.05	Kecamatan Kandangan
41	04.11.05.1	Kelurahan Kandangan Kota
42	04.11.05.2	Kelurahan Kandangan Barat
43	04.11.05.3	Kelurahan Kandangan Utara
44	04.11.05.4	Kelurahan Jambu Hilir
45	04.11.06	Kecamatan Simpur
46	04.11.07	Kecamatan Daha Selatan
47	04.11.08	Kecamatan Daha Utara
48	04.11.09	Kecamatan Kalumpang
49	04.11.10	Kecamatan Loksado
50	04.11.11	Kecamatan Daha Barat
51	04.12.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry, Rumah Sakit Daha Sejahtera, Puskesmas Kandangan, dan Puskesmas Negara. Selain itu terdapat pula unit kerja sebagai Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang mengelola anggaran JKN, sehingga masih berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada bulan September ada 11 (sebelas) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai BLUD sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/235/KUM/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu 8



(delapan) Puskesmas juga sudah ditetapkan menjadi BLUD pada bulan November berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/285/KUM/2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian seluruh pelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan menjadi BLUD, akan tetapi penerapan anggaran dan penatausahaan BLUD dimulai pada tahun anggaran 2023. Adapun nama-nama UPT Dinas Kesehatan, diuraikan dalam Tabel 4.1.2 berikut:

Tabel 4.1.2 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kode	Nama SKPD
1	1.02.1.1	Puskesmas Padang Batung
2	1.02.1.2	Puskesmas Kaliring
3	1.02.1.3	Puskesmas Malinau
4	1.02.1.4	Puskesmas Loksado
5	1.02.1.5	Puskesmas Telaga Langsung
6	1.02.1.6	Puskesmas Angkinang
7	1.02.1.7	Puskesmas Bamban
8	1.02.1.8	Puskesmas Kandangan
9	1.02.1.9	Puskesmas Gambah
10	1.02.1.10	Puskesmas Jambu Hilir
11	1.02.1.11	Puskesmas Sungai Raya
12	1.02.1.12	Puskesmas Batang Kulur
13	1.02.1.13	Puskesmas Simpur
14	1.02.1.14	Puskesmas Wasah
15	1.02.1.15	Puskesmas Kalumpang
16	1.02.1.16	Puskesmas Bayanan
17	1.02.1.17	Puskesmas Sungai Pinang
18	1.02.1.18	Puskesmas Baruh Jaya
19	1.02.1.19	Puskesmas Bajayau
20	1.02.1.20	Puskesmas Negara
21	1.02.1.21	Puskesmas Pasungkan
22	1.02.1.22	RSUD Daha Sejahtera

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- Basis Akuntansi
- Prinsip Nilai Perolehan
- Prinsip Realisasi
- Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal



- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar
- a. **Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruaI tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.



c. Prinsip Realisasi (*Realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.4 Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan akuntansi berbasis akrual yang telah dimulai pada Tahun Anggaran 2015 hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dimana pada Pasal 10 Ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi secara akrual tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan sebagai berikut.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

4.4.1 Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)



bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.3 Kualitas Umur Piutang

No.	Kategori Piutang	Piutang Pajak		Piutang Retribusi	
		% penyisihan piutang	Jatuh Tempo	% penyisihan piutang	Jatuh Tempo
1.	Lancar	0,50%	Kurang 1 tahun	0,50%	Kurang 1 bulan
2.	Kurang Lancar	10%	1 s/d 3 tahun	10%	1 s/d 3 bulan
3.	Diragukan	50%	2 s/d 5 tahun	50%	3 s/d 12 bulan
4.	Macet	100%	5 tahun lebih	100%	1 tahun lebih

Penyisihan piutang lain-lain PAD yg sah dan penyisihan Piutang Lainnya mengikuti penyisihan piutang pajak.

- e. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengukuran persediaan:

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

2. Aset Non Lancar

Aset non lancar menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

Investasi non permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa pengelolaan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir yaitu sejak jatuh tempo atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat.

Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih bukan merupakan penghapusan. Dengan demikian, nilai penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, selama nilai pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan investasi nonpermanen dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase (%) tertentu berdasarkan penggolongan kualitas investasi nonpermanen dana bergulir.

Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur.

Penilaian kualitas investasi nonpermanen dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo investasi nonpermanen dana bergulir.

Penilaian kualitas investasi nonpermanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi nonpermanen dana bergulir pada tanggal



laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan/pengembalian pokok dan/atau bunga/imbalance hasil.

Berikut disajikan kualitas dana bergulir dan penilaiannya:

Tabel 4.1.4 Penyisihan Investasi Non Permanen

No.	Umur Sejak Jatuh Tempo	% penyisihan dana bergulir	Kategori
1.	Lebih dari 1 bulan s/d 1 tahun	0,5%	Lancar
2.	1 s/d 3 tahun	10%	Kurang Lancar
3.	3 s/d 5 tahun	50%	Diragukan
4.	Lebih dari 5 tahun	100%	Macet

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya dan Investasi Permanen Lainnya.

Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penilaian

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai



investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Contoh investasi permanen lainnya adalah Pinjaman kepada BUMD, Lembaga Lainnya dan Dana Abadi. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Seluruh aset tetap berupa Tanah dan Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya dikapitalisasi menjadi aset tetap tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (sesuai Bultek 15 Tahun 2014 halaman 26).



c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada saat perolehan aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus

4.4.2 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan utang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.



4.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dari laporan operasional dan ditambah dengan koreksi ekuitas.

4.4.4 Pengukuran Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui dan diukur pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- g. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- h. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.4.5 Pengukuran Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dan diukur pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

4.4.6 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diakui :

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.



- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.4.7 Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengukuran Pendapatan-LO:

- a. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
- b. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
- d. Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- e. Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
- f. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

4.4.8 Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.



Pengakuan Beban:

a. Saat timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran Beban:

a. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

c. Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

4.4.9 Pengukuran Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung yaitu mencatat transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan realisasi anggaran pos-pos yang bersangkutan secara langsung dalam satu tahun periode laporan, yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sesuai dengan aktivitas arus kas serta kenaikan atau (penurunan) bersih kas selama periode. Urusan kas dan perhitungan dilaporkan sebagai Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

4.4.10 Pengukuran Laporan Saldo Perubahan Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai penggunaan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintah (Pemerintah Daerah). SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara



realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan.

4.4.11 Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pelaporan perubahan ekuitas adalah untuk memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas baik berasal dari dampak kumulatif atau koreksi kesalahan dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan surplus/defisit-LO dikurangi koreksi ekuitas.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka mulai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.5.1 Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

4.5.2 Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:



31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
- b. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
- c. Khusus untuk RSUD H. Hasan Basry yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4.5.3 Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2022 investasi pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, PT BPR Hulu Sungai Selatan, BKK disajikan berdasarkan metode ekuitas sedangkan investasi pada PT Bank Kalsel disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan neto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Neto, yakni Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh



terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

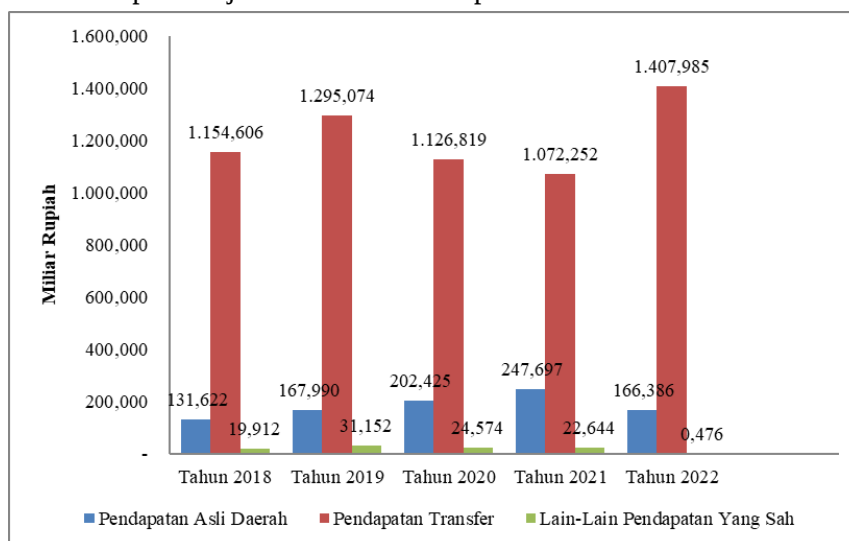
Rincian dan penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Keuangan.

5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.574.848.507.549,88 atau mencapai 113,99% dari target APBD TA 2022 sebesar Rp1.381.523.564.269,00. Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp232.254.224.154,26 atau 17,30% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.342.594.283.395,62. Kenaikan pendapatan dimaksud dapat tercapai karena adanya upaya optimalisasi.

Perbedaan realisasi pendapatan TA 2022 dengan TA 2021 antara lain disebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp81.311.821.545,74 atau 32,83% dari realisasi PAD TA 2021. Selain itu dipengaruhi oleh naiknya realisasi pada Pendapatan Transfer sebesar Rp335.733.635.809,00 atau 31,31% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2021; dan turunnya realisasi Pendapatan Hibah pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp22.167.590.109,00 atau 97,90% dari realisasi TA 2021 yang disebabkan oleh Pendapatan Hibah Dana Bos yang tahun sebelumnya berada di lain-lain pendapatan hibah sesuai perundang-undangan dan Ketika TA 2022 untuk Dana Bos Itu masuk ke Pendapatan Dana Perimbangan – Dak Non fisik BOS Reguler sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp166.386.113.020,88; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.407.985.852.088,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp476.542.441,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2018 terlihat pada Grafik 5.1.

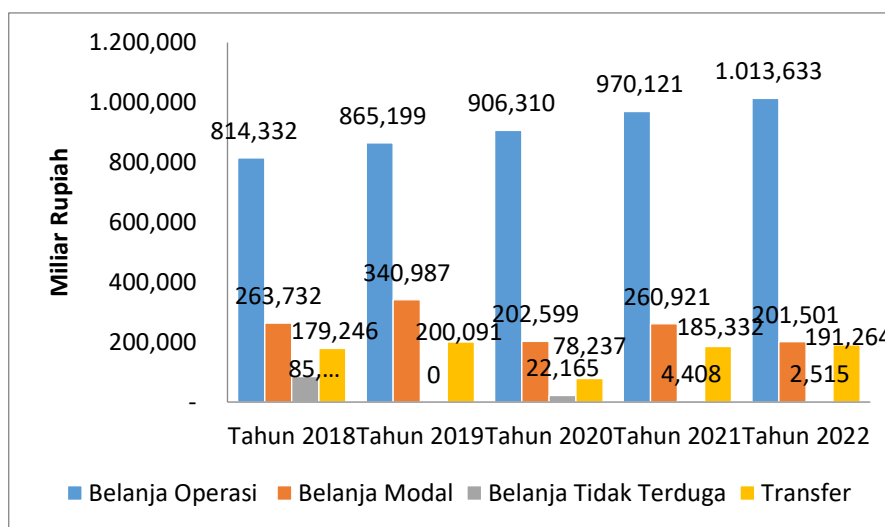


Grafik 5.1: Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2018 - 2022

Belanja TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.408.914.769.988,05 atau sebesar 88,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.595.686.712.689,00. Belanja TA 2022 turun sebesar Rp11.869.039.267,11 atau 0,84% dari realisasi TA



2021 sebesar Rp1.420.783.809.255,16. Realisasi Belanja terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1.013.633.493.802,50; Belanja Modal sebesar Rp201.501.385.149,55; Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.515.261.000,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp191.264.630.036,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2018 terlihat pada Grafik 5.2.



Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.574.848.507.549,88 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.408.914.769.988,05 maka terdapat surplus anggaran sebelum pembiayaan pada TA 2022 sebesar Rp165.933.737.561,83. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2022 adalah sebesar Rp214.206.368.418,74 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan. Surplus anggaran sebelum pembiayaan dan realisasi Pembiayaan Neto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp1.574.848.507.549,88 yang berarti mencapai 113,99% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.381.523.564.269,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pendapatan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah	206.391.856.348,00	166.386.113.020,88	247.697.934.566,62
Pendapatan Transfer	1.175.106.507.921,00	1.407.985.852.088,00	1.072.252.216.279,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.200.000,00	476.542.441,00	22.644.132.550,00
Jumlah	1.381.523.564.269,00	1.574.848.507.549,88	1.342.594.283.395,62

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD pada TA 2022 adalah sebesar Rp166.386.113.020,88 yang berarti mencapai 80,62% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp206.391.856.348,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Pajak Daerah	16.618.459.998,00	17.300.630.533,90	13.543.126.921,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.865.558.800,00	6.818.208.641,00	6.608.175.981,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.709.172.614,00	6.713.672.614,00	6.091.259.048,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173.198.664.936,00	135.553.601.231,98	221.455.372.616,62
Jumlah	206.391.856.348,00	166.386.113.020,88	247.697.934.566,62

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp17.300.630.533,90 atau mencapai 104,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16.618.459.998,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 lebih tinggi Rp3.757.503.612,90 atau 27,74% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.543.126.921,00. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Hotel	446.693.000,00	526.914.322,00	270.634.814,00
Pajak Restoran	2.798.287.000,00	3.105.393.176,50	2.270.484.557,00
Pajak Hiburan	3.426.000,00	16.444.000,00	3.230.000,00
Pajak Reklame	348.200.000,00	364.336.865,00	254.348.560,00
Pajak Penerangan Jalan	7.838.649.000,00	7.937.617.551,00	6.623.284.242,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Parkir	15.927.000,00	18.766.150,00	17.832.750,00
Pajak Air Tanah	11.154.000,00	13.080.000,00	11.520.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	36.637.250,00	31.056.966,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.002.162.998,00	1.689.954.458,40	1.125.193.724,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	1.351.579.000,00	1.472.805.833,00	1.350.953.183,00
BPHTB	1.772.382.000,00	2.118.680.928,00	1.584.588.125,00
Jumlah	16.618.459.998,00	17.300.630.533,90	13.543.126.921,00

Sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan sistem *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Sistem *Self Assesment* yakni pajak daerah yang dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri, sedangkan sistem *Official Assesment* yakni penetapan pajak daerah oleh daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *self assessment* :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Sarang Burung Walet
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *Official Assessment* :

- Pajak Reklame
- Pajak Air Tanah
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan dan mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2021. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah yakni dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yakni:

- Melakukan sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.



2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian saran promosi pajak (*banner* dan *leaflet*).
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD terkait.
5. Melaksanakan program kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait adanya proyek-proyek pusat maupun provinsi yang pelaksanaan pekerjaannya ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini kaitannya dengan pajak mineral bukan logam dan batuan.
8. Penggunaan Alat rekam transaksi pada wajib pajak Hotel dan Restoran.

A. Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel sebesar Rp526.914.322,00 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp446.693.000,00. Serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan realisasi penerimaan dari target tahun 2022 dan tahun 2021 dikarenakan adanya beberapa upaya yang sudah dilakukan, upaya tersebut yakni :

- Melakukan kegiatan pemutakhiran data wajib pajak hotel.
- Upaya koordinasi/pemberitahuan kepada wajib pajak hotel terkait kewajiban pajak hotel melalui telepon dan pesan WhatsApp.
- Pemasangan alat rekam transaksi di 2 (dua) objek hotel.
- Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kandangan dalam rangka penagihan tunggakan pajak.
- Pemberian *reward* kepada wajib pajak hotel yang taat pajak melalui program Anugerah Pajak.

B. Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran pada tahun 2022 sebesar Rp3.105.393.176,50 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.798.287.000,00, namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 penerimaan atas pajak restoran mengalami kenaikan dikarenakan adanya beberapa upaya yang sudah dilakukan, upaya tersebut yakni :

- Melakukan kegiatan pemutakhiran data wajib pajak restoran/rumah makan.
- Melakukan penerimaan pajak restoran dengan pola/sistem jemput bola.
- Pemasangan alat rekam transaksi di 8 (delapan) objek restoran/rumah makan.
- Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kandangan dalam rangka penagihan tunggakan pajak.



- Pemberian *reward* kepada wajib pajak restoran/rumah makan yang taat pajak melalui program Anugerah Pajak.

C. Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2022 sebesar Rp16.444.000,00 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp3.426.000,00 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan adanya upaya optimalisasi pemungutan pajak pada kegiatan arena permainan oleh kelompok pada pekan pasar malam yang sebelumnya libur selama pandemi covid-19.

D. Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 sebesar Rp364.336.865,00 melampaui target yang direncanakan sebesar Rp348.200.000,00 serta naik cukup signifikan dibanding dengan realisasi tahun 2021. Hal ini disebabkan upaya tim dari pemerintah daerah yang lebih intens dalam melakukan penyisiran terhadap objek pajak reklame terpasang yang tidak memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakannya, selanjutnya dilakukan teguran dan penagihan terhadap wajib pajak tersebut.

E. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp7.937.617.551,00 dapat melebihi target yang direncanakan sebesar Rp7.838.649.000,00 dan melebihi penerimaan di tahun 2021.

F. Pajak Parkir

Untuk realisasi pajak parkir sebesar Rp18.766.150,00 mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp15.927.000,00 serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021.

G. Pajak Air Tanah

Realisasi pajak air tanah sebesar Rp13.080.000,00 dapat mencapai target yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp11.154.000,00 serta mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021.

H. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi pajak sarang burung walet tahun 2022 sebesar Rp36.637.250,00 telah mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00, hal ini karena semakin optimalnya pengelolaan dan pengawasan pajak sarang burung walet.

I. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.689.954.458,40 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp2.002.162.998,00 namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan adanya



pandemik Covid-19 sehingga pemerintah daerah maupun pemerintah desa melakukan *refocusing*/pemangkasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini menyebabkan rendahnya kebutuhan terhadap mineral bukan logam dan batuan dan berakibat terhadap penerimaan pajak dari jenis ini.

J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp1.472.805.833,00 mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.351.579.000,00 serta mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2021 karena semakin optimalnya upaya penagihan pajak yang dilakukan secara *door to door*.

K. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada tahun 2022 sebesar Rp2.118.680.928,00 melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.772.382.000,00 dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 disebabkan karena upaya verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap harga transaksi/nilai obyek pajak diajukan wajib pajak sehingga dapat mendekati harga riil dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai pajak.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp6.818.208.641,00 atau mencapai 69,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp9.865.558.800,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 lebih tinggi Rp210.032.660,00 atau 3,18% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.608.175.981,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2022 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Jasa Umum:			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	678.157.200,00	758.285.380,00	732.381.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	2.050.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	629.940.000,00	370.860.000,00	362.705.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	555.920.000,00	313.291.800,00	354.462.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Retribusi Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Pasar	783.900.000,00	749.380.000,00	813.536.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	213.218.600,00	224.896.000,00	305.690.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	55.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.700.000,00	15.480.500,00	14.885.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	303.435.000,00	306.500.000,00	303.435.000,00
Jumlah	3.260.270.800,00	2.738.693.680,00	2.889.145.100,00
Retribusi Jasa Usaha:			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	561.588.000,00	566.741.200,00	528.006.240,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.997.146.000,00	1.528.558.551,00	1.611.671.881,00
Retribusi Terminal	44.380.000,00	17.040.000,00	12.949.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.738.124.000,00	876.295.500,00	843.856.500,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	554.200.000,00	316.385.000,00	175.350.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	22.600.000,00	12.850.000,00	9.850.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	14.700.000,00	17.005.000,00	17.842.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.089.850.000,00	368.051.000,00	186.331.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.200.000,00	42.117.000,00	72.990.000,00
Jumlah	6.103.788.000,00	3.745.043.251,00	3.458.846.621,00
Retribusi Perizinan Tertentu:			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	466.500.000,00	334.321.710,00	258.994.260,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	35.000.000,00	150.000,00	1.190.000,00
Jumlah	501.500.000,00	334.471.710,00	260.184.260,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	9.865.558.800,00	6.818.208.641,00	6.608.175.981,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2022:

A. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp758.285.380,00 terdiri atas penerimaan yang dipungut oleh Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar Rp755.430.380,00 dan balai kesehatan oleh Dinas Pertanian berupa penerimaan atas retribusi pelayanan kesehatan hewan sebesar Rp2.855.000,00.
- 2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp370.860.000,00 berasal dari retribusi yang dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp313.291.800,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp16.639.800,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp296.652.000,00.



- 4) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp749.380.000,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan berupa retribusi pelayanan pasar – los.
- 5) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp224.896.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 6) Realisasi Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta Rp0,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 7) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp15.480.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.
- 8) Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp306.500.000,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp566.741.200,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp229.465.000,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD

SKPD	Tahun 2022 Realisasi (Rp)
Sekretariat Daerah - Bagian Umum	52.240.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	156.225.000,00
Kecamatan Padang Batung	6.000.000,00
Kecamatan Simpur	3.000.000,00
Kecamatan Daha Selatan	12.000.000,00
Jumlah	229.465.000,00

- b. Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp42.870.000,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Penyewaan Tanah per SKPD

SKPD	Tahun 2022 Realisasi (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	31.200.000,00
Kecamatan Simpur	1.000.000,00
Kecamatan Kalumpang	10.670.000,00
Jumlah	42.870.000,00



- c. Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp73.477.700,00 yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Penyewaan Bangunan per SKPD

SKPD	Tahun 2022 Realisasi (Rp)
Dinas Perdagangan	46.477.700,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	600.000,00
Kecamatan Angkinang	3.000.000,00
Kecamatan Kandangan	23.400.000,00
Jumlah	73.477.700,00

- d. Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp95.642.000,00 yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp116.700.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- f. Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp8.586.500,00 yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian.
- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp1.528.558.551,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.
- 3) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp17.040.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 4) Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp876.295.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp129.748.000,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp746.547.500,00.
- 5) Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp316.385.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 6) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp12.850.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pertanian.
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp17.005.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 8) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp368.051.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.



- 9) Realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebesar Rp42.117.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perikanan sebesar Rp40.250.000,00 dan pendapatan dari hasil penjualan karet pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.867.000,00.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu terdiri atas realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp334.321.710,00 dan Izin Trayek sebesar Rp150.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.8 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu SKPD	Retribusi IMB Realisasi (Rp)	Retribusi Izin Trayek Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	334.321.710,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	150.000,00
Jumlah	334.321.710,00	150.000,00

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2022 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2021 dikarenakan adanya optimalisasi oleh SKPD pengelola. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni:

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 adalah sebesar Rp6.713.672.614,00 atau mencapai 100,07% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.709.172.614,00. Hal ini berarti realisasi TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp622.413.566,00 atau 10,22% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.091.259.048,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2022. Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi (penyertaan modal) Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel sebesar Rp55.000.000.000,00 dan pada Koperasi Swarga sebesar Rp75.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.9 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
BPD Kalsel	6.709.172.614,00	6.709.172.614,00	6.086.759.048,00
KPN Swarga	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Jumlah	6.709.172.614,00	6.713.672.614,00	6.091.259.048,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 adalah sebesar Rp135.553.601.231,98 atau mencapai 78,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp173.198.664.936,00. Hal ini berarti realisasi TA 2022 turun sebesar Rp85.901.771.384,64 atau 38,79% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp221.455.372.616,62. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.10 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	390.422.816,00	253.364.337,00
Jasa Giro	6.132.144.000,00	6.373.533.843,29	5.814.298.197,46
Pendapatan Bunga	7.824.063.000,00	99.041.095,88	4.899.274.956,64
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	485.540.294,00	173.189.525,20	38.314.166,95
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	53.635.651,00	41.485.797,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	13.000.000,00	850.000,00	47.205.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.457.878.924,83	1.186.473.874,78
Pendapatan BLUD	149.133.047.000,00	118.218.983.951,78	200.392.360.009,79
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.610.870.642,00	8.786.065.424,00	8.742.946.277,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	39.650.000,00
Jumlah	173.198.664.936,00	135.553.601.231,98	221.455.372.616,62

A. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp390.422.816,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.674.834,00 merupakan hasil penjualan lelang TA 2022.
2. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.099.999,00 berupa hasil penjualan lelang TA 2022.



3. Hasil penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp47.160.000,00 berupa penerimaan atas biaya kompensasi pembongkaran trotoar TA 2022.
 4. Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.000.000,00 berupa penerimaan Hasil Penjualan Hewan yang sakit sebanyak 2 Ekor pada Dinas Pertanian.
 5. Hasil Penjualan Aset lainnya sebesar Rp115.487.983,00 berupa Hasil Penjualan Lelang Hewan.
- B. Penerimaan jasa giro sebesar Rp6.373.533.843,29 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:
1. Jasa giro atas kas daerah sebesar Rp6.287.422.536,41;
 2. Jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp86.111.306,88.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25 ayat (1) bahwa bunga bank dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah maka Jasa Giro yang diterima oleh pemegang kas dana JKN harus langsung disetorkan ke Kas Daerah, sehingga Jasa Giro Kas JKN mulai Tahun 2013 sudah masuk ke Kas Daerah.
- C. Pendapatan dari bunga sebesar Rp99.041.095,88 merupakan pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada dana cadangan.
- D. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp173.189.525,20 yang terdiri atas:

**Tabel 5.1.11 Rincian Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Realisasi (Rp)
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	157.396.875,20
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Lingkungan Hidup	10.042.550,00
Bidang Pangan	4.400.000,00
Bidang Sekretariat Daerah	1.350.100,00
Jumlah	173.189.525,20

- E. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp53.635.651,00 terdiri atas:
1. Denda pajak restoran sebesar Rp22.086.956,00;
 2. Denda pajak reklame sebesar Rp2.416.240,00;
 3. Denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp18.813.038,00; dan
 4. Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar



Rp10.319.417,00.

- F. Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp850.000,00 terdiri atas denda retribusi Pelayanan Kesehatan.
- G. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.457.878.924,83 terdiri atas beberapa pengembalian sebagai berikut:
1. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp31.154.657,00.
 2. Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp950.000,00.
 3. Pengembalian kelebihan pembayaran jasa pihak ketiga sebesar Rp1.166.101.089,83.
 4. Pengembalian Bendahara Pengeluaran sebesar Rp11.260.500,00.
 5. Pengembalian kelebihan pembayaran bantuan sosial dan Hibah sebesar Rp248.412.678,00.
- H. Pendapatan BLUD sebesar Rp118.218.983.951,78 terdiri atas pendapatan BLUD:
1. RSUD Brigjend H. Hasan Basry sebesar Rp100.132.077.568,06.
 2. Puskesmas Kandungan sebesar Rp1.415.588.622,71.
 3. Puskesmas Negara sebesar Rp1.805.427.307,08.
 4. RS Daha Sejahtera sebesar Rp14.865.890.453,93.
- I. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp8.786.065.424,00 berasal dari semua FKTP/ Puskesmas penerima dana Kapitasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12 Rincian Puskesmas Penerima Dana Kapitasi JKN

Pendapatan Dana Kapitasi JKN	Realisasi (Rp)
Puskesmas Padang Batung	462.519.365,00
Puskesmas Kaliring	542.355.639,00
Puskesmas Malinau	163.523.445,00
Puskesmas Loksado	233.442.927,00
Puskesmas Telaga Langsung	480.486.416,00
Puskesmas Angkinang	590.448.370,00
Puskesmas Bamban	252.743.298,00
Puskesmas Gambah	312.651.203,00
Puskesmas Jambu Hilir	833.140.145,00
Puskesmas Sungai Raya	470.738.284,00
Puskesmas Batang Kulur	271.978.564,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Dana Kapitasi JKN	Realisasi (Rp)
Puskesmas Simpur	599.216.601,00
Puskesmas Wasah	305.329.773,00
Puskesmas Kalumpang	342.634.925,00
Puskesmas Bayanan	619.790.067,00
Puskesmas Sungai Pinang	671.174.208,00
Puskesmas Baruh Jaya	649.687.151,00
Puskesmas Bajayau	346.200.577,00
Puskesmas Pasungkan	638.004.466,00
Jumlah	8.786.065.424,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2022 alokasi dana transfer ke daerah ditetapkan melalui Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Kemudian dirubah dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp1.407.985.852.088,00 yang berarti mencapai 119,82% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.175.106.507.921,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.13 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.096.718.921,00	1.287.672.092.839,00	1.003.434.645.997,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.009.789.000,00	120.313.759.249,00	68.817.570.282,00
Jumlah	1.175.106.507.921,00	1.407.985.852.088,00	1.072.252.216.279,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau yang disingkat dengan TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dana desa.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp1.168.300.582.839,00 atau 119,37% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD sebesar Rp978.725.208.921,00 yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dana Bagi Hasil (DBH)	285.809.466.000,00	496.224.513.847,00	197.773.311.486,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	473.900.465.300,00	473.900.465.240,00	474.753.627.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	101.910.247.688,00	99.395.904.042,00	71.332.731.438,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.105.029.933,00	98.779.699.710,00	87.753.043.073,00
Jumlah	978.725.208.921,00	1.168.300.582.839,00	831.612.712.997,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil sebesar Rp496.224.513.847,00 yang terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Pajak Penghasilan (PPh), DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Bagi Hasil

Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Bagi Hasil Pajak (DBH)	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	22.861.259.000,00	25.165.958.206,00	52.447.681.903,00
DBH dari Pajak Penghasilan	6.361.863.000,00	6.577.312.000,00	6.162.265.000,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	297.000,00	9.810,00	624,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	77.513.000,00	363.567.992,00	68.554.300,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Land-Rent	0,00	1.171.507.808,00	67.910.025,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalti	254.486.322.000,00	460.884.318.031,00	137.227.649.277,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	103.386.000,00	103.529.000,00	441.631.207,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00
Jumlah	285.809.466.000,00	496.224.513.847,00	197.773.311.486,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU TA 2022 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya pada TA 2022 sebesar Rp473.900.465.240,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan



daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penerimaan DAK Fisik pada TA 2022 sebesar Rp99.395.904.042,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagai berikut:

Tabel 5.1.16 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bidang Pendidikan	20.111.979.000,00	19.921.550.783,00	3.092.726.000,00
Bidang Kesehatan dan KB	12.844.937.766,00	11.311.956.427,00	19.441.442.498,00
Bidang Pertanian	7.213.719.000,00	7.116.944.319,00	954.722.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	1.108.297.850,00
Bidang Jalan	42.197.481.000,00	41.628.740.600,00	20.227.037.040,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	8.046.080.964,00	8.006.025.463,00	5.459.390.000,00
Bidang Sanitasi	5.083.429.000,00	5.083.429.000,00	2.097.726.000,00
Bidang Irigasi	6.412.620.958,00	6.327.257.450,00	16.142.287.050,00
Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	2.809.103.000,00
Jumlah	101.910.247.688,00	99.395.904.042,00	71.332.731.438,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022. Penerimaan DAK Non Fisik pada TA 2022 sebesar Rp98.779.699.710,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
BOS Reguler	23.839.286.566,00	21.244.764.356,00	0,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	64.203.496.020,00	56.907.248.020,00	65.073.906.600,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.055.000.000,00	1.331.750.000,00	928.750.000,00
Tunjangan Khusus Guru PNSD	1.626.619.800,00	737.199.292,00	973.424.000,00
BOP PAUD	4.159.200.000,00	130.200.000,00	4.543.605.750,00
BOP Pendidikan Kesenjangan	3.655.700.000,00	189.800.000,00	4.046.500.000,00
BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	689.913.650,00	689.913.650,00	592.672.150,00
BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1.473.842.777,00	1.629.876.000,00	9.760.835.073,00
BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.904.576.856,00	13.067.489.528,00	0,00
BOKKB- Jaminan Persalinan	16.060.000,00	0,00	0,00
PK2UKM	400.800.000,00	400.800.000,00	0,00
Fasilitasi Penanaman Modal	309.819.800,00	309.820.000,00	335.173.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.794.314.464,00	1.164.438.864,00	0,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	1.035.426.500,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	524.600.000,00	524.600.000,00	462.750.000,00
Jumlah	117.105.029.933,00	98.779.699.710,00	87.753.043.073,00

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun 2022 direalisasi sebesar Rp119.371.510.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp119.371.510.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya terdiri atas pendapatan dana penyesuaian (DID) dan pencatatan pendapatan dana desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.18 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	11.572.948.000,00	11.572.948.000,00	53.518.401.000,00
Dana Desa yang Bersumber dari APBN	107.798.562.000,00	107.798.562.000,00	118.303.532.000,00
Jumlah	119.371.510.000,00	119.371.510.000,00	171.821.933.000,00

Realisasi pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2022 berupa BOS Reguler, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum termasuk sekolah swasta.

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)

Pengelolaan Dana Insentif Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.07/2022. Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari APBN TA 2022 sebesar Rp11.572.948.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp11.572.948.000,00.

Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp11.572.948.000,00 diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara 2 (dua) tahap, tahap pertama diterima tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp5.786.474.000,00 dan tahap kedua diterima tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp5.786.474.000,00.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp107.798.562.000,00 disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer langsung



ke Rekening Kas Desa (RKD). Tata cara pencatatan Dana Desa diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah pada TA 2022 adalah sebesar Rp120.313.759.249,00 yang berarti mencapai 156,23% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD sebesar Rp77.009.789.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Kendaraan Bermotor	6.977.255.000,00	10.039.568.018,00	6.452.254.145,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.489.292.000,00	11.829.868.613,00	5.925.087.370,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.929.673.000,00	84.111.888.973,00	43.569.150.687,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	65.447.000,00	125.310.546,00	108.066.138,00
Pajak Rokok	10.548.122.000,00	14.207.123.099,00	12.763.011.942,00
Jumlah	77.009.789.000,00	120.313.759.249,00	68.817.570.282,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat direalisasi pada TA 2022 sebesar Rp476.542.441,00 atau mencapai 1.891,04% dari total anggaran yang telah ditetapkan pada APBD sebesar Rp25.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.20 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Hibah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	25.200.000,00	476.542.441,00	55.024.550,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	22.589.108.000,00
Jumlah	25.200.000,00	476.542.441,00	22.644.132.550,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah tahun 2022 sebesar Rp476.542.441,00 terdiri dari penerimaan atas Belanja Hibah Air Limbah Setempat yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA 2022 sesuai Nomor PHD-64/MK.7/DTK.03/ALS/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp441.000.000,00 dan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp35.542.441,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.21 Rincian Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	441.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	25.200.000,00	35.542.441,00	53.958.750,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	1.065.800,00
Jumlah	25.200.000,00	476.542.441,00	55.024.550,00

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Pos realisasi pendapatan ini pada tahun 2021 digunakan untuk mencatat penerimaan hibah dana BOS melalui Pemerintah Provinsi. Sedangkan pada Tahun 2022 untuk penerimaan transfer Dana BOS langsung disalurkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai ke Sekolah-Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Negeri yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Oleh karena itu pencatatan penerimaan Dana BOS Reguler TA 2022 untuk Dana Bos dicatat pada Pendapatan Transfer Dana Perimbangan – DAK Non fisik BOS Reguler sesuai dengan Perpres Nomor 104 Tahun 2021.

Tabel 5.1.22 Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS	Tahun 2022 Realisasi (Rp)	Tahun 2021 Realisasi (Rp)
SD Negeri	0,00	17.051.618.000,00
SMP Negeri	0,00	5.537.490.000,00
Jumlah	0,00	22.589.108.000,00



5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi Belanja pada TA 2022 sebesar Rp1.408.914.769.988,05 yang berarti mencapai 88,30% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.595.686.712.689,00. Belanja menurut jenisnya terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.23 Rincian Realisasi Belanja

Belanja	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	1.163.390.841.357,00	1.013.633.493.802,50	970.121.278.940,00
Belanja Modal	226.635.028.763,00	201.501.385.149,55	260.921.215.974,16
Belanja Tidak Terduga	14.033.415.569,00	2.515.261.000,00	4.408.917.341,00
Belanja Transfer	191.627.427.000,00	191.264.630.036,00	185.332.397.000,00
Jumlah	1.595.686.712.689,00	1.408.914.769.988,05	1.420.783.809.255,16

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 adalah sebesar Rp1.013.633.493.802,50 yang berarti mencapai 87,13% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.163.390.841.357,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.24 Rincian Belanja Operasi

Belanja Operasi	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	554.991.508.132,00	491.961.749.591,00	482.702.664.650,00
Belanja Barang dan Jasa	545.688.294.270,00	469.412.076.976,50	444.359.498.382,00
Belanja Hibah	42.133.430.655,00	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00
Belanja Bantuan Sosial	20.577.608.300,00	18.400.504.900,00	17.600.518.000,00
Jumlah	1.163.390.841.357,00	1.013.633.493.802,50	970.121.278.940,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp491.961.749.591,00 yang berarti mencapai 88,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp554.991.508.132,00. Realisasi Belanja Pegawai merupakan belanja yang berasal dari gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.25 Rincian Realisasi Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	329.116.735.498,00	294.981.538.595,00	282.110.539.724,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.537.074.240,00	114.215.022.787,00	102.647.182.121,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	78.740.541.947,00	66.164.096.603,00	80.252.542.574,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.129.165.750,00	15.491.161.056,00	16.630.984.414,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	651.990.697,00	308.330.550,00	259.830.385,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.816.000.000,00	801.600.000,00	801.585.432,00
Jumlah	554.991.508.132,00	491.961.749.591,00	482.702.664.650,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp469.412.076.976,50 yang berarti mencapai 86,02% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp545.688.294.270,00. Realisasi belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan realisasi selama TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1.26 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang	61.408.528.750,55	51.265.837.024,00	190.727.194.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Jasa	169.091.357.150,00	151.362.485.326,50	155.293.295.594,00
Belanja Pemeliharaan	31.925.359.348,00	29.025.936.183,00	22.497.725.910,00
Belanja Perjalanan Dinas	55.260.682.973,00	49.448.051.867,00	36.104.573.303,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.000.989.238,00	24.800.077.734,00	20.048.523.591,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.176.093.792,00	18.282.650.015,00	19.688.185.448,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	181.825.283.018,45	145.227.038.827,00	0,00
Jumlah	545.688.294.270,00	469.412.076.976,50	444.359.498.382,00

a. Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2022 adalah sebesar Rp51.265.837.024,00 terdiri atas belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1.27 Rincian Belanja Barang

Belanja Barang (Persediaan)	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Pakai Habis	61.408.528.750,55	51.265.837.024,00	190.658.418.536,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	68.776.000,00
Jumlah	61.408.528.750,55	51.265.837.024,00	190.727.194.536,00

Terdapat belanja barang dan jasa BOP PAUD sebesar Rp104.991.000,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp170.585.000,00 pada belanja barang pakai habis karena penganggaran untuk BOP PAUD dan BOP Kesetaraan ada pada akun belanja tersebut, akan tetapi angka tersebut belum termasuk sekolah swasta.

b. Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa sebesar Rp151.362.485.326,50 terdiri atas beberapa belanja jasa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.28 Rincian Realisasi Belanja Jasa

Belanja Jasa	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Jasa Kantor	98.644.236.770,00	85.235.327.616,50	91.656.393.268,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.211.549.000,00	56.943.347.027,00	58.915.337.342,00
Belanja Sewa Tanah	9.300.000,00	2.500.000,00	605.746.800,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.014.056.000,00	876.367.877,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	203.990.000,00	98.417.000,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	397.025.000,00	268.188.636,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Jasa	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	5.645.818.880,00	4.683.834.516,00	2.105.578.342,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	317.225.000,00	310.056.672,00	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	40.500.000,00	39.400.000,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	508.350.000,00	153.632.342,00	51.720.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, BinteK dan Diklat	3.089.706.500,00	2.750.175.750,00	1.832.519.842,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	9.600.000,00	1.237.890,00	126.000.000,00
Jumlah	169.091.357.150,00	151.362.485.326,50	155.293.295.594,00

c. Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp29.025.936.183,00 yang terdiri dari belanja Pemeliharaan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.29 Rincian Realisasi Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pemeliharaan Tanah	787.500.000,00	767.845.000,00	397.315.321,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.199.444.026,00	1.584.764.717,00	2.150.767.853,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.255.858.138,00	8.906.061.076,00	3.677.245.041,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.639.842.184,00	17.740.015.390,00	16.020.866.695,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	42.715.000,00	27.250.000,00	251.531.000,00
Jumlah	31.925.359.348,00	29.025.936.183,00	22.497.725.910,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp49.448.051.867,00. Berikut disajikan perbandingan dengan realisasi tahun 2021:

Tabel 5.1.30 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Perjalanan Dinas	55.260.682.973,00	49.448.051.867,00	36.104.573.303,00
Jumlah	55.260.682.973,00	49.448.051.867,00	36.104.573.303,00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp24.800.077.734,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.31 Realisasi Belanja untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain

Belanja Untuk Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Uang	9.898.809.774,00	9.242.864.320,00	4.882.555.720,00
Belanja Jasa	16.102.179.464,00	15.557.213.414,00	15.165.967.871,00
Jumlah	26.000.989.238,00	24.800.077.734,00	20.048.523.591,00

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2022 direalisasi sebesar Rp18.282.650.015,00. Belanja barang dan jasa dan BOS terdiri atas belanja barang pada masing-masing sekolah negeri penerima dana bos dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Sekolah	Tahun 2022 Realisasi (Rp)	Tahun 2021 Realisasi (Rp)
SDN	13.298.038.294,00	14.950.633.628,00
SMPN	4.984.611.721,00	4.737.551.820,00
Jumlah	18.282.650.015,00	19.688.185.448,00

Pada belanja barang dan jasa BOS SD Negeri sebesar Rp13.298.038.294,00 terdapat pengembalian kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp73.318.872,00 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) SD Negeri yang telah digabungkan dengan SD Negeri lainnya sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Kepala KPPN Barabai dengan Nomor 421.2/4722/Disdikbud tanggal 23 September 2022 tentang Penyampaian Bukti Setor dan Pengembalian Sisa Dana BOS.

Realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS Tahun 2022 yang disajikan dalam laporan keuangan ini belum termasuk sekolah swasta.

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 direalisasi sebesar Rp145.227.038.827,00. Belanja barang dan jasa dan BLUD terdiri atas belanja barang pada masing-masing BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

BLUD	Belanja Barang (Rp)
RSUD Brigjend H Hasan Basry	129.007.454.665,00
RS Daha Sejahtera	13.109.889.137,00
BLUD Puskesmas Kandangan	1.256.174.050,00
BLUD Puskesmas Negara	1.853.520.975,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

BLUD	Belanja Barang (Rp)
Jumlah	145.227.038.827,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2021 realisasinya masuk pada belanja barang.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan hibah terakhir diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp33.859.162.335,00 yang berarti mencapai 80,36% dari total anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp42.133.430.655,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.34 Rincian Belanja Hibah

Belanja Hibah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	4.181.100.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Ormas yang Berbadan Hukum	41.449.480.335,00	33.175.212.015,00	19.993.547.588,00
Belanja Hibah Dana BOS (Satdikdas Swasta)	0,00	0,00	600.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.320,00	683.950.320,00	683.950.320,00
Jumlah	42.133.430.655,00	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2022 sebesar Rp0,00 dan Realisasi TA 2021 sebesar Rp4.181.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Table 5.1.35 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	Hibah BOP PAUD Tahap I	0,00	2.181.900.000,00	Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/143/KUM/2021
	Hibah BOP PAUD Tahap II	0,00	1.999.200.000,00	Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/273/KUM/2021



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Jumlah		0,00	4.181.100.000,00	

b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 direalisasi sebesar Rp33.175.212.015,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.36 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan PerUU

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	PPG Guru PAI	0,00	125.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/162/KUM/2021
	PAUD, SD, SMP	130.000.000,00	140.848.000,00	NPHD No. 1122/MOU/2022 dan NPHD No. 421.3/5345 sd 5347/Disdikbud
	PKBM	0,00	3.732.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/144/KUM/2021 dan SK Bupati HSS Nomor: 188.45/272/KUM/2021
	GNOTA Kab HSS	333.763.500,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/139/KUM/2022
	MI dan MTS	525.000.000,00	0,00	NPHD No: 1099 sd 1133/MOU/2022,
	KPOTI Kab HSS	250.000.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/268/KUM/2022
	Ponpres Abdul Karim dan Ponpres Dalam Pagar	344.182.820,00	0,00	NPHD No 421.3/2202/ Disdikbud dan NPHD No 421.3/5586/ Disdikbud
	SMP Ibnu Mas'ud Puti dan SMPIT Tarbiyatul Furgan	709.289.500,00	0,00	NPHD No 421.3/5584/ Disdikbud dan NPHD No 421.3/5585/ Disdikbud
Dinas Kesehatan	PMI	500.000.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/85/KUM/2022
Dinas Ketahanan Pangan	Kelompok Tani Daun Subur	174.594.000,00	0,00	BAST No.526.1/337/DisKP
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	KONI	10.000.000.000,00	2.375.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/57/KUM/2022
	NPC	1.000.000.000,00	285.000.000,00	
	Karang Taruna	0,00	38.000.000,00	
	KNPI	200.000.000,00	142.500.000,00	
	Kwarcab Pramuka	400.000.000,00	237.500.000,00	
	Kormi	220.000.000,00	0,00	
Dinas Pertanian	Peserta Temu Teknis	0,00	18.000.000,00	Hadiah Lomba
Bagian Kesejahteraan Rakyat	BAZNAS	250.000.000,00	250.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/34/KUM/2022
	MUI	3.100.000.000,00	3.070.657.900,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Badan Kesbangpol	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	2.300.000.000,00	2.335.860.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/280/KUM/2022
	DHC'45) Kab. Hulu Sungai Selatan	0,00	350.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/170/KUM/2021
Jumlah		20.436.829.820,00	13.100.365.900,00	

Tabel 5.1.37 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat keterangan terdaftar

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Kesehatan	PMI Kab HSS	0,00	469.826.000,00	NPHD antara Pemkab HSS dengan PMI Kab HSS Nomor 800/1117/Dinkes Tahun 2021
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Pondok Pesantren Putri Dalam Pagar	0,00	758.664.000,00	Berita Acara Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial No.663/1/BA.VHB/DisperaKPLH/2021 dan Berita Acara Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial No.663/2/BA.VHB/DisperaKPLH/2021
Dinas Perikanan	KUB Karya Bersama, KUB Awang Sejahtera, KUB Taluk Tamba	198.856.500,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Perahu Motor Tempel dan Perahu
	KUB Usaha Bersama, KUB Maju Bersama, KUB Tani Bersama	186.273.600,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Alat Tangkap Ikan Tempirai
	KUB Anugerah Bersama	135.000.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Alat Tangkap Ikan Rempa
	Kelompok Pengawas AKBAR	185.752.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Pengadaan Alat Tangkap untuk Ekx Pengguna Alat Setrum (Tempirai)
	Kelompok Perikanan Karya Abadi	42.500.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Pengadaan Perahu
	KUB Harapan Maju	23.130.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Alat Tangkap Ikan Tempirai
	Lokasi penebaran Ikan	63.243.000,00	0,00	Pengadaan Bibit Ikan
	KUB Harapan Indah I	9.658.468,00	0,00	SK Bupati HSS No. 188.45/298/KUM/2022 Alat Tangkap Ikan Selambau
	KT . Sumber Rejeki, KT. Padang Hariung, Gapoktan Usaha Baisut, KT. Mekar Sari, KT Kulampayan, dan KT Suka	0,00	139.500.000,00	Pembangunan jaringan irigasi usaha tani



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pertanian	KT Jaya Samurai, KT Lok Nyiur, KT Neng Wang Sarkati, KT Log Tugin, KT Lok Telaga Bahari, KT Wana Makmur, KT Swarga, KT Mangupil, KT. Almuttaqin, KT Padang Parangan dan KT Pulau Sarindit	2.031.341.667,00	1.327.250.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/196/2022 dan No : 188.45/157/KUM/2022 berupa JUT
	KT Hidup Makmur	0,00	119.500.000,00	Pembangunan/rehab DAM parit
	KT Karya Tani, Masy Peduli Gambut, KT Berkat Mufakat, KT Palapah dan KT Gawi Banua	0,00	197.949.400,00	Hibah peralatan dan mesin pengendali kebakaran lahan dan hutan dengan BA No:
	KT Mali-mali, KT Balanti, KT Sungai Kedayan dan KT Usaha Berkat	0,00	97.379.138,00	Hibah peralatan dan mesin alat cultivator dan traktor roda 2
	KT Mufakat, KT Rasau Bakti, KT Kacipak, KT Kalampaian, Gapoktan Bahagia dan KT Buntit	434.135.700,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/196/2022 berupa Pondok Pertemuan
	Gapoktan Maju Bersama, KT Mufakat, KT Anglai dan KT Katunggang	1.665.392.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/157/KUM/2022 berupa Combine Harvester
	KT Berkat Subur dan Gapoktan Amban Basirang	270.841.900,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/196/2022 dan No : 188.45/157/KUM/2022 berupa RJIT
	KT Bina Bersama dan KT Suka Maju	462.482.477,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/196/2022 dan No : 188.45/157/KUM/2022 berupa Sumur BOR
	KT Balanti dan KT Bangkuang	370.720.721,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/157/KUM/2022 berupa UV Dryer
	KT Tirai Bambu	519.722.819,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/157/KUM/2022 berupa RMU
	KT Pasungguhan	149.734.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/191/KUM/2022 berupa UPPB
	PPK dan Pembantu PPK	13.800.000,00	0,00	Honor PPK dan Pembantu PPK Pengadaan Barang dan Jasa (DAK Fisik)
Jumlah		6.762.584.852,00	3.110.068.538,00	

Tabel 5.1.38 Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial kemasyarakatan

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Balai Adat Loksado	0,00	60.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/127/KUM/2021
	Yayasan Ibnu atha'illah	500.000.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/268/KUM/2022
	TPA AL AZHAR	20.129.400,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/216/KUM/2022



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
	PKBM	682.284.343,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/216/KUM/2022
	TK Tumingki, TK Surya Pagi, TK Qurrata A'yun, TK Serumpun, TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3, TK Batu Bini, TK Kencana Murni, TK Pelangi Kantawan, TK Permata Bunda, dan TK Timda Ilmu	562.239.400,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/216/KUM/2022, dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/317/KUM/2022
	Pengawasan Pondok Nginap Ponpres Abdul Karim	12.654.000,00	0,00	NPHD No 421.3/2202/ Disdikbud dan 023/VII/PP.AK/2022
Satpol PP	Kerukunan BPK Kab HSS	0,00	653.500.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/101/KUM/2021
Dinas Ketahanan Pangan	Gapoktan Maju bersama dan Gapoktan Bumi Raya	0,00	258.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/64/KUM/2021 dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/259/KUM/2021
	KWT Mandiri 1. Sari Purnawati dan KWT Mekar Sari 1 Nurdiani	0,00	99.910.800,00	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS Nomor 04A Tahun 2021
Dinas Perikanan	Kelompok Pokdakan Lentera, Sumber Pulau Besar, Bersama dan Sinar Harapan	0,00	370.861.000,00	Budidaya Ikan Haruan dan Tauman
	Kelompok Basamaan, Kel Jam'ah Polklahsar Berkah, KUB Berjat Sabar, KUB Sukamaju, KUB Sumber Usaha, KUB Permata Indah	0,00	534.756.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk perikanan
	KUB Harapan Maju	162.500.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Pengadaan Perahu Motor Tempel
	Pokdakan Telaga Berkah, Pokdakan Makmur Bersama dan Pokdakan Bungasai	504.673.700,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Budidaya Ikan Gabus Haruan di Kolam Tanah
	Pokdakan Nila Sari, Pokdakan Suka Maju, dan Desa Jelatang	174.588.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Budidaya Ikan dalam Net Tancap
	Pokdakan Maju Bersama	99.100.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/298/KUM/2022 berupa Demplot di Kolam Bundar Sistem Bioflok
	Poklahsar Usaha Harapan dan Poklahsar dapur sekawan	2.810.000,00	0,00	Pengadaan Bahan Pengolahan Albumin
		2.718.500,00	0,00	Alat-Alat Bimtek Pengolahan Albumin



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	Hibah Kepada	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Keterangan
Dinas Pertanian	KT kalaka, KT. Mengupil, KT Sumber Rejeki, KT Tani Makmur	0,00	55.450.000,00	Pengadaan alat pasca panen thresher
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mesjid/Langgar/Majelis Ta'lim/Kubah Makam	2.420.000.000,00	1.450.635.350,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/34/KUM/2022, dan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/261/KUM/2022
	Nahdatul Ulama (NU)	93.500.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/34/KUM/2022
	Pondok Pesantren	280.000.000,00	250.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/34/KUM/2022
Kelurahan Kandungan Utara	Masyarakat Kel Kdg Utara	6.800.000,00	50.000.000,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/228/KUM/2022 berupa Hibah WC dan Listrik
Kelurahan Kandungan Kota	Masyarakat Kel Kdg Kota	50.250.000,00	0,00	BAST No. 1581/BAST-WC/KKK/2022 tgl 11 Nopember 2022 (12 Buah WC keluarga prasejahtera)
Kelurahan Kandungan Barat	Masyarakat Kel Kdg Barat	51.550.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/228/KUM/2022 berupa Hibah Daya Listrik
Badan Kesbangpol	DHC 45	350.000.000,00	0,00	Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 188.45/203/KUM/2022
Jumlah		5.975.797.343,00	3.783.113.150,00	

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS direalisasikan sebesar Rp0,00 yang merupakan belanja hibah uang dana BOS yang diterima Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Swasta untuk TA 2022 belanja hibah tersebut masuk ke belanja hibah berdasarkan perundang-undangan.

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direalisasikan sebesar Rp683.950.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.39 Rincian Belanja Bantuan keuangan Kepada Partai Politik

Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	155.123.509,00	155.123.509,00	155.123.509,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	69.260.935,00	69.260.935,00	69.260.935,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	172.136.946,00	172.136.946,00	172.136.946,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	51.604.417,00	51.604.417,00	51.604.417,00
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	78.252.784,00	78.252.784,00	78.252.784,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	35.256.625,00	35.256.625,00	35.256.625,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	51.390.057,00	51.390.057,00	51.390.057,00
Partai Demokrat (DEMOKRAT)	33.096.099,00	33.096.099,00	33.096.099,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	37.828.948,00	37.828.948,00	37.828.948,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah	683.950.320,00	683.950.320,00	683.950.320,00

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 diantaranya menyebutkan pada point e bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis Belanja Hibah obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik ini di realisasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/210/KUM/2022 pada tanggal 08 Agustus 2022.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bantuan sosial TA 2022 direalisasi sebesar Rp18.400.504.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.40 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Sosial kepada Individu	5.179.850.000,00	3.370.031.900,00	3.591.835.000,00
Bantuan Sosial kepada Keluarga	12.086.626.000,00	11.828.848.000,00	11.072.058.000,00
Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	319.200.000,00	256.075.000,00	100.575.000,00
Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.991.932.300,00	2.945.550.000,00	2.836.050.000,00
Jumlah	20.577.608.300,00	18.400.504.900,00	17.600.518.000,00

Bantuan sosial berupa uang atau barang dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD yang membidangi,



namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial. Bantuan Sosial berupa uang dan barang dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.41 Rincian Realisasi Bantuan Sosial per SKPD

SKPD	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
Dinas Sosial	17.715.198.000,00	17.308.527.000,00
Dinas Perhubungan	82.800.000,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	162.600.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	154.375.000,00	0,00
Dinas Perikanan	179.400.000,00	0,00
Dinas Pertanian	101.700.000,00	0,00
Kecamatan Telaga Langsat	4.431.900,00	0,00
Kelurahan Kandangan Barat	0,00	291.991.000,00
Jumlah	18.400.504.900,00	17.600.518.000,00

Penyaluran dana Bantuan Sosial secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial

Belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial terealisasi sebesar Rp17.715.198.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.42 Rincian Realisasi Jenis Bantuan Sosial

Penyaluran Dana Bantuan Sosial	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu:		
Tali Asih Veteran dan Janda Veteran	80.500.000,00	89.500.000,00
Pakaian / Seragam Veteran dan Janda Veteran	10.800.000,00	0,00
Sembako Veteran dan Janda Veteran	0,00	22.750.000,00
Jaminan Hidup Lanjut Usia (JADUP LU)	1.655.100.000,00	2.480.850.000,00
Bersama Untuk Peduli Anak Yatim (BERUPAYA)	97.400.000,00	108.600.000,00
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	88.200.000,00	78.000.000,00
Alat Bantu Disabilitas	0,00	46.375.000,00
Sembako Penyandang Disabilitas	0,00	45.000.000,00
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Untuk Penyandang Disabilitas	169.800.000,00	27.000.000,00
Perawatan Diri Orang Dengan gangguan Kejiwaan (ODK)	0,00	10.400.000,00
Pakaian /Baju kaos untuk anak anak terlantar/siswa PSBR	0,00	7.500.000,00
Usaha Ekonomi Produktif	769.000.000,00	579.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Penyaluran Dana Bantuan Sosial	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
Masyarakat terdampak Covid 19	0,00	201.300.000,00
Kenaikan BBM Bagi Penerima Rastrada	1.489.200.000,00	0,00
Sub Jumlah	4.360.000.000,00	3.696.375.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga:		
Program Rumah Sejahtera (PRS)	7.297.500.000,00	9.504.723.000,00
Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA)	3.112.148.000,00	1.271.379.000,00
Sub Jumlah	10.409.648.000,00	10.776.102.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan:		
Permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	2.945.550.000,00	2.836.050.000,00
Sub Jumlah	2.945.550.000,00	2.836.050.000,00
Jumlah	17.715.198.000,00	17.308.527.000,00

2. Dinas Perhubungan

Belanja bantuan sosial pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp82.800.000,00 berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga atas dampak kenaikan harga bahan bakar minyak TA 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/302/KUM/2022 pada tanggal 18 Nopember 2022 yang mana setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp600.000,00.

3. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

Belanja bantuan sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian terealisasi sebesar Rp162.600.000,00 berupa bantuan langsung tunai program pengendalian inflasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sebanyak 271 orang yang menerima selama 2 bulan dengan besaran Rp300.000,00 per bulan sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/291/KUM/2022 dan SK Bupati Nomor 188.45/292/KUM/2022 tanggal 15 Nopember 2022.

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja bantuan sosial pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terealisasi Rp154.375.000,00 berupa bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sesuai Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/248/KUM/2022 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Program Bapak Asuh Anak Stunting TA 2022.

5. Dinas Perikanan



Belanja bantuan sosial pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp179.400.000,00 berupa bantuan sosial kepada individu atau nelayan untuk pembelian BBM pada bulan Nopember dan desember TA 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/301/KUM/2022 Tentang Penetapan dan Besaran Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Individu untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022.

6. Dinas Pertanian

Belanja bantuan sosial pada Dinas Pertanian terealisasi sebesar Rp101.700.000,000 berupa bantuan kepada masyarakat kelompok tani untuk program dan pengembangan sarana pertanian sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/290/KUM/2022 tanggal 15 November 2022.

7. Kecamatan Telaga Langsat

Belanja bantuan sosial pada Kecamatan Telaga Langsat terealisasi sebesar Rp4.431.900,00 berupa bantuan kepada individu berupa bahan bangunan untuk bantuan kebakaran sesuai dengan BASTB Nomor 138/186/Kessos-CTL tanggal 13 Desember 2022.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp201.501.385.149,55 yang berarti mencapai 88,91% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp226.635.028.763,00.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.43 Rincian Realisasi Belanja Modal per Jenis

Belanja Modal	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Tanah	12.925.000.000,00	117.926.000,00	1.563.402.500,00
Peralatan dan Mesin	47.561.437.225,00	43.292.195.973,00	55.907.592.945,00
Bangunan dan Gedung	71.159.078.700,00	69.144.610.697,55	108.565.226.735,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.117.230.338,00	88.389.484.279,00	93.351.134.994,00
Aset Tetap Lainnya	872.282.500,00	557.168.200,00	1.533.858.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Belanja Modal	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah	226.635.028.763,00	201.501.385.149,55	260.921.215.974,16

Belanja modal dan realisasi aset yang diperoleh dari belanja modal dijelaskan pada bab Neraca mengenai Aset Tetap.

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.44 Rincian Realisasi Belanja Modal per Obyek Belanja

Uraian Belanja Modal	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	12.925.000.000,00	117.926.000,00	1.563.402.500,00
Pengadaan Tanah Persil	3.345.000.000,00	117.926.000,00	479.798.000,00
Pengadaan Tanah Lapangan	9.580.000.000,00	0,00	1.083.604.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.561.437.225,00	43.292.195.973,00	55.907.592.945,00
Pengadaan Alat Besar Darat	80.000.000,00	79.800.000,00	0,00
Pengadaan Alat Bantu	587.190.550,00	477.521.000,00	432.273.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.764.566.250,00	1.873.720.000,00	2.442.960.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	2.356.200.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	14.342.400,00	12.500.000,00	0,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	20.043.000,00	19.377.500,00	0,00
Pengadaan Alat Ukur	225.204.600,00	204.773.600,00	43.418.000,00
Pengadaan Alat Pengolahan	6.650.000,00	0,00	237.990.000,00
Pengadaan Alat Kantor	4.190.293.386,00	3.624.188.282,00	17.166.926.871,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.760.897.853,00	1.595.348.797,00	4.564.004.300,00
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	232.902.350,00	210.478.646,00	357.965.000,00
Pengadaan Alat Studio	1.435.771.660,00	1.329.636.540,00	941.551.500,00
Pengadaan Alat Komunikasi	108.356.850,00	93.920.000,00	125.875.000,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	2.051.800,00	1.850.000,00	0,00
Pengadaan Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	51.850.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	8.876.902.131,00	7.717.591.568,00	11.627.023.134,00
Pengadaan Alat Kesehatan Umum	17.761.085.407,00	17.544.474.597,00	3.816.381.129,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	920.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.340.000.000,00	1.285.617.000,00	2.080.349.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	854.900,00	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	495.247.300,00	472.475.000,00	128.850.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	422.950.000,00	25.300.000,00	0,00
Pengadaan Komputer Unit	3.535.331.784,00	3.438.142.346,00	5.008.641.444,00
Pengadaan Peralatan Komputer	2.173.071.878,00	1.912.636.497,00	4.243.059.199,00
Pengadaan Alat Deteksi	0,00	0,00	650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian Belanja Modal	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	278.550.000,00	257.280.000,00	0,00
Pengadaan Alat Pelindung	2.125.000,00	2.100.000,00	0,00
Pengadaan Alat Kerja Penerbangan	55.614.000,00	55.600.000,00	0,00
Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	100.000.000,00	96.999.000,00	10.368.000,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	22.038.618,00
Pengadaan Alat SAR	0,00	0,00	16.100.000,00
Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	150.233.000,00
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	407.884.400,00	394.610.600,00	39.965.750,00
Pengadaan Peralatan Olahraga	633.999.726,00	516.705.000,00	42.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.159.078.700,00	69.144.610.697,55	108.565.226.735,16
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.188.843.700,00	66.206.157.647,55	105.623.338.067,16
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.256.960.000,00	2.234.028.000,00	1.627.393.194,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	665.397.200,00
Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	713.275.000,00	704.425.050,00	649.098.274,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.117.230.338,00	88.389.484.279,00	93.351.134.994,00
Pengadaan Jalan	66.907.999.380,00	63.151.407.492,00	43.509.300.778,00
Pengadaan Jembatan	3.551.750.000,00	1.829.203.750,00	14.189.982.413,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.218.410.958,00	9.095.075.350,00	18.886.052.869,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai	3.601.670.000,00	3.578.881.013,00	3.545.328.324,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	564.702.428,00
Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.351.600.000,00	6.311.544.499,00	1.072.349.201,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.370.550.000,00	1.355.781.500,00	2.704.883.741,00
Pengadaan Instalasi Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	3.158.160.500,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	6.000.000,00	5.970.000,00	0,00
Pengadaan Jaringan Listrik	3.106.250.000,00	3.058.620.675,00	5.631.874.740,00
Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	88.500.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.282.500,00	557.168.200,00	1.533.858.800,00
Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	493.364.300,00	243.586.700,00	1.252.138.800,00
Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam	119.968.200,00	119.771.900,00	38.495.000,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	34.250.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	195.950.000,00	180.809.600,00	96.975.000,00
Pengadaan Aset Tidak Berwujud	63.000.000,00	13.000.000,00	112.000.000,00
Jumlah	226.635.028.763,00	201.501.385.149,55	260.921.215.974,16

Belanja modal tersebut termasuk di dalamnya adalah realisasi belanja modal Dana BOS sebesar Rp2.966.722.092,00, dan belanja modal Dana BOP sebesar Rp44.423.100,00, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.1.45 Belanja Modal Dana BOS dan Dana BOP

Belanja Modal BOS dan BOP	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
BOS SD	2.485.137.592,00	2.339.395.736,00
BOS SMP	481.584.500,00	986.771.957,00
BOP PAUD	25.208.100,00	0,00
BOP KESETARAAN	19.215.000,00	0,00
Jumlah	3.011.145.192,00	3.326.167.693,00

Tabel 5.1.46 Rincian Belanja Modal Dana BOS dan Dana BOP per Jenis Belanja

Belanja Modal BOS dan BOP	Jumlah Sekolah	Nilai (Rp)		Jumlah (Rp)
		Dana BOS	Dana BOP	
Peralatan dan Mesin:				2.767.558.492,00
- BOS SDN	239	2.368.435.592,00	0,00	
- BOS SMPN	32	390.404.800,00	0,00	
- BOP PAUD	4	0,00	6.933.100,00	
- BOP KESETARAAN	1	0,00	1.785.000,00	
		2.758.840.392,00	8.718.100,00	
Aset Tetap Lainnya:				243.586.700,00
- BOS SDN	239	116.702.000,00	0,00	
- BOS SMPN	32	91.179.700,00	0,00	
- BOP PAUD	4	0,00	18.275.000,00	
- BOP KESETARAAN	1	0,00	17.430.000,00	
		207.881.700,00	35.705.000,00	
Jumlah				3.011.145.192,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi belanja tidak terduga selama tahun 2022 sebesar Rp2.515.261.000,00 atau 17,92% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp14.033.415.569,00. Perbandingan belanja tidak terduga TA 2022 dan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.1.47 Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Tidak Terduga	14.033.415.569,00	2.515.261.000,00	4.408.917.341,00
Jumlah	14.033.415.569,00	2.515.261.000,00	4.408.917.341,00

Adapun rincian belanja tidak terduga Tahun 2022 direalisasi pada beberapa belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1.48 Rincian Belanja Tidak Terduga

Uraian Belanja Tidak Terduga	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Santunan Korban Bencana Kebakaran	149.500.000,00
Santunan Korban Bencana Alam	106.650.000,00
Santunan Biaya Berobat	97.611.000,00
Bansos Tidak Terencana (Santunan Kematian)	2.161.500.000,00
Jumlah	2.515.261.000,00

Realisasi belanja tidak terduga yang disalurkan sepenuhnya ke Dinas Sosial berasal dari BPKPD sebesar Rp2.515.261.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan santunan Korban Bencana sebesar Rp256.150.000,00 berupa bantuan untuk korban bencana kebakaran sebesar Rp149.500.000,00 disalurkan berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial; dan bencana alam sebesar Rp106.650.000,00 yang disalurkan berdasarkan rekomendasi dari tim verifikasi dan diserahkan kepada keluarga.
- Bantuan santunan biaya berobat sebesar Rp97.611.000,00 yang diserahkan sesuai hasil verifikasi dan diserahkan kepada individu, dan
- Bantuan Santunan kematian sebesar Rp2.161.500.000,00 yang diberikan kepada keluarga.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan belanja yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pendapatan terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Kepada Desa.

Realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp191.264.630.036,00 yang berarti mencapai 99,81% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp191.627.427.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.49 Rincian Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bagi Hasil	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	188.998.562.000,00	188.635.765.036,00	182.703.532.000,00
Jumlah	191.627.427.000,00	191.264.630.036,00	185.332.397.000,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi belanja bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.628.865.000,00 merupakan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 144 Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasikan sebesar 100,00% dari total anggaran yang telah ditetapkan pada APBD sebesar Rp2.628.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.50 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Belanja Bagi Hasil	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bagi Hasil Pajak	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Jumlah	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah (BHPD) TA 2022 sebesar Rp1.528.865.000,00 merupakan belanja bagi hasil pajak daerah yang disalurkan kepada 144 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022. Penyaluran terhadap BHPD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 35%, tahap II sebesar 55%, dan tahap III sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah (BHRD) TA 2022 sebesar Rp1.100.000.000,00 merupakan belanja bagi hasil retribusi daerah yang disalurkan kepada 144 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran



2022. Penyaluran terhadap BHRD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I sebesar 35%, tahap II sebesar 55%, dan tahap III sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2022 sebesar Rp188.635.765.036,00 atau mencapai 99,81% dari total anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp188.998.562.000,00. Belanja transfer bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan kepada desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.51 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	186.098.562.000,00	186.098.562.000,00	182.703.532.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	2.900.000.000,00	2.537.203.036,00	0,00
Jumlah	188.998.562.000,00	188.635.765.036,00	182.703.532.000,00

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa terdiri atas belanja transfer alokasi dana desa yang bersumber dari APBD dan dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp186.098.562.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.52 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa

Bantuan Keuangan kepada Desa	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Alokasi Dana Desa	78.300.000.000,00	78.300.000.000,00	64.400.000.000,00
Dana Desa	107.798.562.000,00	107.798.562.000,00	118.303.532.000,00
Jumlah	186.098.562.000,00	186.098.562.000,00	182.703.532.000,00

Transfer bantuan keuangan kepada desa terdiri atas:

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp78.300.000.000,00 yang diberikan kepada 144 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui 3 tahapan realisasi;
- Dana Desa sebesar Rp107.798.562.000,00 dengan mekanisme pencairan yang diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa



oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.
5. Berdasarkan SP2DD tersebut, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa.
6. Penerbitan SP2DD dan SPBDD dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Realisasi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa merupakan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD terealisasi sebesar Rp2.537.203.036,00 dari anggaran sebesar Rp2.900.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan pemilihan kepala desa (Pilkades).

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2022 adalah Rp214.206.368.418,74 yang berarti mencapai 100,02% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp214.163.148.420,00 Pembiayaan Neto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.53 Rincian Pembiayaan Neto

Pembiayaan	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	224.163.148.420,00	224.206.368.418,74	302.352.674.278,28
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	214.163.148.420,00	214.206.368.418,74	302.352.674.278,28

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp224.206.368.418,74 atau 100,02% dari total anggaran perubahan sebesar Rp224.163.148.420,00. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA anggaran tahun sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada BUMDES dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.54 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	224.163.148.420,00	224.163.148.418,74	302.352.674.278,28
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	43.220.000,00	0,00
Jumlah	224.163.148.420,00	224.206.368.418,74	302.352.674.278,28

5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun sebelumnya dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2022.

Penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp224.163.148.418,74. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2021. Penetapan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2022.

Penggunaan SiLPA berasal dari:

1. Sisa kas di Kas Daerah sebesar Rp164.313.797.944,95;
2. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Rp12.500.000,00;
3. Sisa kas di Kas BLUD sebesar Rp58.907.198.654,79;
4. Sisa kas di Kas Dana Kapitasi JKN sebesar Rp924.998.385,00; dan



5. Sisa kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp4.653.434,00.

5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2022 sebesar Rp43.220.000,00 yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman pada BUMDes Kecamatan Angkinang sebesar Rp8.220.000,00 dan BUMDes Kecamatan Padang Batung sebesar Rp35.000.000,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 dari total yang dianggarkan sesuai APBD sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai saldo atas pembentukan dana cadangan tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024. Pembentukan dana cadangan melalui penempatan deposito di Bank Kalsel dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan tujuan agar seluruh keperluan pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 5.1.55 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Tahun 2022		Tahun 2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan surplus anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp165.933.737.561,83 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp214.206.368.418,74 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57. SiLPA TA 2022 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, efisiensi anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dari target pendapatan sebesar Rp1.381.523.564.269,00 realisasinya sebesar



Rp1.574.848.507.549,88 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp193.324.943.280,88.

2. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.595.686.712.689,00 realisasinya sebesar Rp1.408.914.769.988,05 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp186.771.942.700,95.

Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

- a. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp149.757.347.554,50;
 - b. Efisiensi anggaran belanja modal sebesar Rp25.133.643.613,45;
 - c. Efisiensi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp11.518.154.569,00; dan
 - d. Efisiensi anggaran belanja transfer sebesar Rp362.796.964,00.
3. Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp214.163.148.420,00 realisasinya sebesar Rp214.206.368.418,74 sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp43.219.998,74.

SiLPA tahun 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57 memiliki nilai yang sama dengan saldo kas pada neraca yang terdiri dari:

1. Sisa kas di Kas Daerah sebesar Rp371.416.747.099,50;
2. Sisa kas di Kas BLUD sebesar Rp7.787.788.190,57;
3. Sisa kas di Kas Bendahara Kapitasi JKN sebesar Rp935.525.007,50; dan
4. Sisa kas di Kas Bendahara BOS sebesar Rp45.683,00.



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal berasal dari saldo anggaran lebih TA 2021 sebesar Rp224.163.148.418,74 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp224.163.148.418,74 direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA TA 2022 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022 sebesar Rp224.163.148.418,74.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022

Berdasarkan surplus anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp165.933.737.561,83 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp214.206.368.418,74 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57. SiLPA TA 2022 tersebut berasal dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, dan pelampauan target pembiayaan neto, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- A. Dari target pendapatan sebesar Rp1.381.523.564.269,00 realisasinya sebesar Rp1.574.848.507.549,88 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp193.324.943.280,88. Pelampauan target pendapatan tersebut berasal dari pelampauan target Pendapatan Transfer sebesar Rp232.879.344.167,00; ditambah pelampauan target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp451.342.441,00; dikurangi tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp40.005.743.327,12.
- B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.595.686.712.689,00 realisasinya sebesar Rp1.408.914.769.988,05 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp186.771.942.700,95. Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
 1. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp149.757.347.554,50 yang terdiri atas:
 - Efisiensi anggaran pembayaran belanja pegawai sebesar Rp63.029.758.541,00.
 - Efisiensi anggaran pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp76.276.217.293,50.
 - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja hibah sebesar Rp8.274.268.320,00.
 - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.177.103.400,00.
 2. Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp25.133.643.613,45 dengan



rincian:

- Sisa anggaran belanja modal tanah sebesar Rp12.807.074.000,00.
 - Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4.269.241.252,00.
 - Sisa anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2.014.468.002,45.
 - Sisa anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp5.727.746.059,00.
 - Sisa anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp315.114.300,00.
3. Efisiensi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp11.518.154.569,00.
4. Efisiensi anggaran belanja transfer sebesar Rp362.796.964,00.
- C. Dari anggaran pembiayaan netto sebesar Rp214.163.148.420,00 realisasinya sebesar Rp214.206.368.418,74 sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp43.219.998,74. Pelampauan tersebut berasal dari penerimaan kembali pinjaman kepada BUMDes sebesar Rp43.220.000,00 dan efisiensi Penggunaan Silpa sebesar Rp1,26.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57 Dari SiLPA TA 2022 sebesar Rp380.140.105.980,57 terdapat SiLPA terikat sebesar Rp16.436.572.097,07 yang terdiri dari:

1. Sisa DAK Fisik Tahun 2022 sebesar Rp2.135.525.113,00;
2. Sisa DAK Non Fisik Tahun 2022 sebesar Rp4.778.206.366,00;
3. Sisa DID Tahun 2022 sebesar Rp799.481.737,00;
4. Dana BLUD sebesar Rp7.787.788.190,57;
5. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp935.525.007,50; dan
6. Dana BOS sebesar Rp45.683,00.



5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2021 sebagai komparatif.

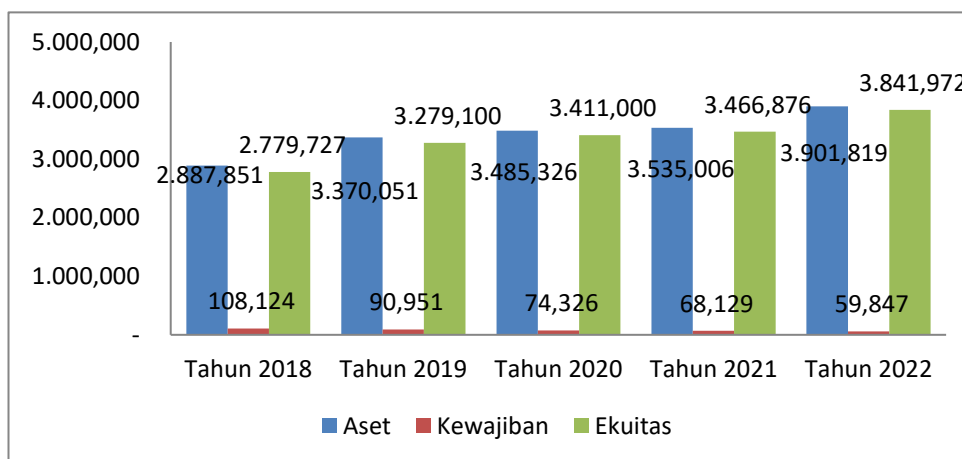
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Ringkasan Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian:	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	461.278.134.689,88	300.479.365.657,66
Investasi Jangka Panjang	89.021.341.839,44	88.392.391.429,69
Aset Tetap	3.160.352.349.464,71	3.135.870.443.805,03
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
Aset Lainnya	181.168.047.496,00	10.264.422.391,00
Jumlah Aset	3.901.819.873.490,03	3.535.006.623.283,38
Kewajiban Jangka Pendek	59.847.165.024,00	68.129.947.361,50
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	59.847.165.024,00	68.129.947.361,50
Ekuitas	3.841.972.708.466,03	3.466.876.675.921,88
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.901.819.873.490,03	3.535.006.623.283,38

Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas dana selama lima tahun terakhir untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 5.3: Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca Tahun 2018-2022



5.3.1 Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.901.819.873.490,03 dan Rp3.535.006.623.283,38 naik sebesar Rp366.813.250.206,65 atau 10,38%.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.2 Ringkasan Aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	461.278.134.689,88	300.479.365.657,66
Investasi Jangka Panjang	89.021.341.839,44	88.392.391.429,69
Aset Tetap	3.160.352.349.464,71	3.135.870.443.805,03
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
Aset Lainnya	181.168.047.496,00	10.264.422.391,00
Jumlah Aset	3.901.819.873.490,03	3.535.006.623.283,38

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp461.278.134.689,88 dan Rp300.479.365.657,66 naik sebesar Rp160.798.769.032,22 atau 53,51%. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas	380.417.752.650,57	224.163.148.418,74
Piutang Pajak	1.234.818.279,00	1.147.114.564,86
Piutang Retribusi	1.959.020.325,00	1.736.952.445,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	15.217.526.161,88	22.857.583.833,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	39.093.499.836,00	34.415.878.502,00
Piutang Lainnya	31.000.000,00	31.000.000,00
Penyisihan Piutang	(6.586.080.633,93)	(6.345.145.825,41)
Persediaan	29.910.598.071,36	22.472.833.719,47
Jumlah Aset Lancar	461.278.134.689,88	300.479.365.657,66

Tabel 5.3.4 Rincian Kas Neraca

Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	371.416.747.099,50	164.313.797.944,95
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.500.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.787.788.190,57	58.907.198.654,79
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	935.525.007,50	924.998.385,00
Kas di Bendahara Dana BOS	45.683,00	4.653.434,00
Kas Lainnya	277.646.670,00	0,00
Jumlah Kas	380.417.752.650,57	224.163.148.418,74



5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp371.416.747.099,50 dan Rp164.313.797.944,95. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp207.102.949.154,55 atau 126,04%. Peningkatan saldo kas di kas daerah antara lain disebabkan oleh naiknya dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Pada kas di kas daerah terdapat kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Kas tersebut terdiri dari sisa dana sebagai berikut :

Tabel 5.3.5 Rincian Kas di Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
DAK Fisik	2.135.525.113,00	56.229.840,00
DAK Non Fisik	4.778.206.366,00	11.274.230.798,00
DID	799.481.737,00	7.586.319.284,00
Jumlah Kas di Kas Daerah	7.713.213.216,00	18.916.779.922,00

1. Rekening Giro

Rekening giro bank merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6 Rincian Rekening Giro

Rekening Giro pada Bank Kal-Sel Cab. Kandangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Umum Daerah (Kasda) No. 008.00.03.00017.0 / 2003897519	371.416.747.099,50	164.313.797.944,95
Jumlah Rekening Giro	371.416.747.099,50	164.313.797.944,95

2. Deposito

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022 tidak mempunyai saldo pada rekening deposito.

Penempatan deposito diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Milik Daerah Dalam Rangka Manajemen Kas yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa BUD dapat menempatkan uang milik daerah dalam rangka manajemen kas dalam bentuk deposito pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan/pemegang Rekening Kas Umum Daerah apabila saldo kas pada Kas Umum Daerah melebihi Saldo Kas Minimal. Besarnya uang milik daerah yang ditempatkan paling banyak adalah sebesar kelebihan saldo pada perhitungan Saldo Kas Minimal.

Selama tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak



menempatkan uang milik daerah dalam bentuk deposito karena tingkat bunga deposito yang diberikan oleh pihak bank sama dengan tingkat bunga giro yaitu sebesar 3%.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun non tunai yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD. Saldo kas di rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.500.000,00.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.787.788.190,57 dan Rp58.907.198.654,79 turun sebesar Rp51.119.410.464,22 atau 86,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
RSUD Hasan Basry	680.964.453,35	50.127.432.935,29
Puskesmas Kandangan	246.582.880,16	199.928.307,45
Puskesmas Negara	292.371.696,17	461.707.864,09
RS Daha Sejahtera	6.567.869.160,89	8.118.129.547,96
Jumlah Kas di BLUD	7.787.788.190,57	58.907.198.654,79

1. RSUD Hasan Basry

Saldo kas BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp680.964.453,35 dan Rp50.127.432.935,29 turun sebesar Rp49.446.468.481,94 atau 98,64%.

Tabel 5.3.8 Rincian Kas BLUD RSUD Hasan Basry

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Pendapatan pada BSI		
No. Rekening 8337402880	679.671.038,37	50.125.995.923,54
Rekening Pengeluaran pada BSI		
No. Rekening 8337401310	1.293.414,98	1.437.011,75
Jumlah Kas di BLUD	680.964.453,35	50.127.432.935,29



2. Puskesmas Kandangan

Puskesmas Kandangan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/398/KUM/2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangan sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp246.582.880,16 dan Rp199.928.307,45 naik sebesar Rp46.654.572,71 atau 23,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian Kas BLUD Puskesmas Kandangan

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Pendapatan pada Bank Kalsel		
No. Rekening 3200311301	0,00	0,00
Rekening Pengeluaran pada Bank Kalsel		
No. Rekening 2003898132	246.582.880,16	199.928.307,45
Jumlah Kas di BLUD	246.582.880,16	199.928.307,45

3. Puskesmas Negara

Puskesmas Negara ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/399/KUM/2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Negara sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp292.371.696,17 dan Rp461.707.864,09 turun sebesar Rp169.336.167,92 atau 36,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian Kas BLUD Puskesmas Negara

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Pendapatan pada Bank Kalsel		
No. Rekening 3200292722	0,00	0,00
Rekening Pengeluaran pada Bank Kalsel		
No. Rekening 2003898191	292.371.696,17	461.707.864,09
Jumlah Kas di BLUD	292.371.696,17	461.707.864,09

4. RS Daha Sejahtera

Rumah Sakit Daha Sejahtera ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/396/KUM/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Daha Sejahtera sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 18 Desember 2020. Saldo kas BLUD RS



Daha Sejahtera per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.567.869.160,89 dan Rp8.118.129.547,96 turun sebesar Rp1.550.260.387,07 atau 19,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.11 Rincian Kas BLUD RS Daha Sejahtera

Kas di BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Rekening Pendapatan pada Bank Kalsel		
No. Rekening 3200180061	0,00	0,00
Rekening Pengeluaran pada Bank Kalsel		
No. Rekening 2003901869	6.567.869.160,89	8.118.129.547,96
Jumlah Kas di BLUD	6.567.869.160,89	8.118.129.547,96

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas Dana Kapitasi JKN adalah dana kapitasi Puskesmas atas Pelayanan Kesehatan ke BPJS yang masih belum digunakan. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp935.525.007,50 dan Rp924.998.385,00. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN naik sebesar Rp10.526.622,50 atau 1,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Puskesmas Padang Batung	51.338.834,00	45.475.210,00
Puskesmas Kaliring	55.564.220,50	54.370.274,00
Puskesmas Malinau	11.359.300,00	17.818.755,00
Puskesmas Loksado	24.960.678,00	32.720.473,00
Puskesmas Telaga Langsat	61.131.025,00	51.117.934,00
Puskesmas Angkinang	49.040.848,00	58.570.243,00
Puskesmas Bamban	17.791.652,00	21.992.127,00
Puskesmas Gambah	35.149.580,00	37.169.422,00
Puskesmas Jambu Hilir	111.413.380,00	131.616.305,00
Puskesmas Sungai Raya	30.045.748,00	45.864.354,00
Puskesmas Batang Kulur	18.782.567,50	16.509.286,00
Puskesmas Simpur	69.579.832,00	61.934.674,00
Puskesmas Wasah	28.462.212,75	27.787.096,00
Puskesmas Kalumpang	40.833.068,50	19.566.981,00
Puskesmas Bayanan	47.289.878,00	58.403.733,00
Puskesmas Sungai Pinang	71.699.442,00	58.573.967,00
Puskesmas Baruh Jaya	74.245.615,50	88.992.162,00
Puskesmas Bajayau	36.848.486,00	29.662.761,00
Puskesmas Pasungkan	99.988.639,75	66.852.628,00
Jumlah	935.525.007,50	924.998.385,00



5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp45.683,00 dan Rp4.653.434,00 turun sebesar Rp4.607.751,00 atau 99,02%. Mulai Tahun 2017, penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dikelola melalui mekanisme APBD. Kas di Bendahara Dana BOS merupakan sisa kas pada masing-masing sekolah penerima dana BOS Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

Sekolah	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)
		Penerimaan	Pengeluaran	Pengembalian	
SD	4.463.934,00	15.778.756.952,00	15.709.857.014,00	73.318.872,00	45.000,00
SMP	189.500,00	5.466.007.404,00	5.466.196.221,00	0,00	683,00
Jumlah	4.653.434,00	21.244.764.356,00	21.176.053.235,00	73.318.872,00	45.683,00

Rincian per sekolah pada *Lampiran 1 dan 2*.

Terdapat pengembalian sebesar Rp73.318.872,00 yang merupakan sisa dana kas BOS sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi karena dilakukan penggabungan (*regrouping*) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/208/KUM/2022 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut rincian daftar sekolah penggabungan beserta sisa kas yang sudah dikembalikan:

Tabel 5.3.14 Rincian Sisa Kas Dana BOS Sekolah Penggabungan

No.	Nama Sekolah	Sisa Kas Dana BOS (Rp)
1	SD Negeri Tawia Timur	3.660.652,00
2	SD Negeri Tawia	915.000,00
3	SD Negeri Karang Paci	2.964.035,00
4	SD Negeri Kalumpang Selatan	4.308.008,00
5	SD Negeri 2 Kandangan Kota	9.051.550,00
6	SD Negeri Ganda	1.074.522,00
7	SD Negeri Padang	3.015.000,00
8	SD Negeri Tabihi	1.051.000,00
9	SD Negeri Kapuh Padang	3.385.000,00
10	SD Negeri 2 Hamalau	3.631.063,00
11	SD Negeri Pakuan Timur	2.253.600,00
12	SD Negeri Amawang Kanan	1.060.500,00
13	SD Negeri 3 Baruh Jaya	1.166.158,00
14	SD Negeri 2 Amawang Kiri	3.273.376,00
15	SD Negeri 1 Sungai Kupang Palas	3.178.631,00
16	SD Negeri Sungai Paring Dalam	350.893,00
17	SD Negeri 1 Karang Jawa Muka	5.289.094,00
18	SD Negeri 2 Mandampa	1.308.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Nama Sekolah	Sisa Kas Dana BOS (Rp)
19	SD Negeri Padang Batung	3.282.583,00
20	SD Negeri 2 Sungai Kali	378.500,00
21	SD Negeri 1 Kayu Abang	3.080.486,00
22	SD Negeri 4 Kandangan Barat	3.407.761,00
23	SD Negeri 2 Batang Kulur Kiri	2.615.000,00
24	SD Negeri 2 Parigi	3.615.500,00
25	SD Negeri 2 Bago Tanggul	1.360.160,00
26	SD Negeri Ida Manggala	942.000,00
27	SD Negeri Hantarukung	3.700.000,00
Jumlah		73.318.872,00

Atas sisa kas dana BOS tersebut sudah dilakukan pengembalian pada tanggal 2 September 2022.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya digunakan untuk mencatat kas selain kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp277.646.670,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan uang jaminan bongkar reklame yang terdapat pada rekening penampungan jaminan bongkar reklame. Diakui sebagai kas lainnya dan kewajiban pemda terhadap pihak ketiga.

5.3.1.1.8 Piutang Pajak

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pendapatannya. Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.234.818.279,00 dan Rp1.147.114.564,86 naik sebesar Rp87.703.714,14 atau 7,65%. Piutang Pajak Tahun 2022 terdiri dari Piutang PBB-P2 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Pajak

Piutang Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang PBB - P2	534.507.691,00	560.875.728,00
Piutang PPJ	700.310.588,00	583.449.694,00
Piutang Pajak Reklame	0,00	2.789.142,86
Jumlah Piutang Pajak	1.234.818.279,00	1.147.114.564,86

1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) per 31 Desember 2022 dan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

2021 masing-masing sebesar Rp534.507.691,00 dan sebesar Rp560.875.728,00 turun sebesar Rp26.368.037,00 atau 4,70% terdiri atas tagihan PBB-P2 dan penerimaan atas ketetapan PBB-P2 TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16 Rincian Saldo Piutang PBB-P2

Piutang PBB	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Sampai dengan Tahun 2011	54.020.157,00	0,00	0,00	54.020.157,00
Tahun 2012	28.650.705,00	17.656,00	0,00	28.633.049,00
Tahun 2013	26.076.058,00	831.560,00	0,00	25.244.498,00
Tahun 2014	47.920.047,00	1.067.148,00	0,00	46.852.899,00
Tahun 2015	801.786,00	194.776,00	0,00	607.010,00
Tahun 2016	96.448.948,00	7.145.622,00	0,00	89.303.326,00
Tahun 2017	98.400.390,00	11.196.473,00	0,00	87.203.917,00
Tahun 2018	51.427.318,00	1.546.008,00	0,00	49.881.310,00
Tahun 2019	6.588.490,00	933.598,00	0,00	5.654.892,00
Tahun 2020	122.441.869,00	2.507.398,00	0,00	119.934.471,00
Tahun 2021	28.099.960,00	6.751.063,00	0,00	21.348.897,00
Tahun 2022	0,00	1.440.614.531,00	1.446.437.796,00	5.823.265,00
Jumlah	560.875.728,00	1.472.805.833,00	1.446.437.796,00	534.507.691,00

Penerimaan selama TA 2022 terdiri atas penerimaan tahun berjalan dan pelunasan tahun sebelumnya. Atas pembayaran tersebut sudah dilakukan identifikasi untuk memastikan NOP dan tahun pajak yang dibayar. Pada tahun 2022 tidak dilakukan penghapusan piutang PBB karena Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui BPKPD masih berupaya maksimal untuk melakukan penagihan piutang.

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum dibayar oleh PLN sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp700.310.588,00 dan Rp583.449.694,00 naik sebesar Rp116.860.894,00 atau 20,03%. Piutang Pajak Penerangan Jalan untuk bulan Desember Tahun 2022 telah diterima seluruhnya pada tanggal 12 Januari 2023. Berikut disajikan mutasi piutang pajak penerangan jalan selama tahun 2022:

Tabel 5.3.17 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Piutang PPJ	583.449.694,00	583.449.694,00	700.310.588,00	700.310.588,00
Jumlah	583.449.694,00	583.449.694,00	700.310.588,00	700.310.588,00



3. Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.789.142,86. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo atas piutang pajak reklame.

5.3.1.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atas piutang pajak. Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp373.790.410,13 dengan rincian penyisihan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.18 Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2

Kategori Umur Piutang PBB-P2	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	5.823.265,00	0,50%	29.116,33
Kurang Lancar	141.283.368,00	10%	14.128.336,80
Diragukan	55.536.202,00	50%	27.768.101,00
Macet	331.864.856,00	100%	331.864.856,00
Jumlah	534.507.691,00		373.790.410,13

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 bahwa piutang yang sifatnya tidak diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah maka tidak diberlakukan penyisihan atas piutang tersebut. Oleh karena itu atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum tidak dilakukan penyisihan piutang.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Akun piutang retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.959.020.325,00 dan Rp1.736.952.445,00. Saldo Piutang Retribusi naik sebesar Rp222.067.880,00 atau 12,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.19 Rincian Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan)	1.902.048.845,00	1.652.113.445,00
Retribusi Menara (Dinas Kominfo)	3.065.000,00	3.065.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	53.906.480,00	81.774.000,00
Jumlah	1.959.020.325,00	1.736.952.445,00

Rincian Piutang retribusi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



1. Dinas Perdagangan

Piutang retribusi pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.902.048.845,00 dan Rp1.652.113.445,00. Piutang retribusi pelayanan pasar naik sebesar Rp249.935.400,00 atau 15,13% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian piutang retribusi pada Dinas Perdagangan disajikan sebagai berikut berikut:

Tabel 5.3.20 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2011	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Tahun 2012	77.871.850,00	0,00	0,00	77.871.850,00
Tahun 2013	53.920.000,00	0,00	0,00	53.920.000,00
Tahun 2014	90.840.800,00	0,00	0,00	90.840.800,00
Tahun 2015	100.815.850,00	1.230.000,00	0,00	99.585.850,00
Tahun 2016	159.150.200,00	6.760.200,00	0,00	152.390.000,00
Tahun 2017	161.240.500,00	3.725.200,00	0,00	157.515.300,00
Tahun 2018	116.097.100,00	9.284.400,00	0,00	106.812.700,00
Tahun 2019	180.227.800,00	14.393.400,00	0,00	165.834.400,00
Tahun 2020	268.982.665,00	21.654.200,00	0,00	247.328.465,00
Tahun 2021	440.044.680,00	145.792.750,00	0,00	294.251.930,00
Tahun 2022	0,00	0,00	454.317.550,00	454.317.550,00
Jumlah	1.650.571.445,00	202.840.150,00	454.317.550,00	1.902.048.845,00

Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar grosir selama tahun 2022 sebesar Rp454.317.550,00 terdiri atas piutang retribusi yang terdapat pada 3 lokasi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Pasar Kandangan sebesar Rp313.183.050,00;
2. Pasar Angkinang sebesar Rp11.475.000,00; dan
3. Pasar Negara sebesar Rp129.659.500,00.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo atas piutang retribusi pelayanan pasar los karena tidak terdapat setoran lewat tahun anggaran, sehingga mutasi piutang retribusi pelayanan pasar los disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Los

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Kurang setor pasar los	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00



2. Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.065.000,00 merupakan piutang retribusi menara telekomunikasi pada PT Tower Bersama Grup. Berikut disajikan rincian pelunasan dan penambahan piutang retribusi menara selama tahun 2022:

Tabel 5.3.22 Rincian Piutang Retribusi Menara

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
PT Tower Bersama Grup	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00
Jumlah	3.065.000,00	0,00	0,00	3.065.000,00

Tidak terdapat penerimaan atas piutang retribusi Menara dari PT Tower Bersama Group selama tahun 2022. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya melakukan penagihan dengan mengirimkan surat tagihan.

3. Dinas Kesehatan

Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp53.906.480,00 dan Rp81.774.000,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan klaim BPJS.

Tabel 5.3.23 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Rawat Inap Puskesmas	81.774.000,00	81.774.000,00	53.906.480,00	53.906.480,00
Jumlah	81.774.000,00	81.774.000,00	53.906.480,00	53.906.480,00

Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dikategorikan lancar.

5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang retribusi dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang retribusi. Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.678.224.602,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir

Kategori Umur Piutang Retribusi Pasar/Pertokoan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	454.317.550,00	50%	227.158.775,00
Macet	1.447.731.295,00	100%	1.447.731.295,00



Kategori Umur Piutang Retribusi Pasar/Pertokoan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Jumlah	1.902.048.845,00		1.674.890.070,00

Tabel 5.3.25 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Kategori Umur Piutang Retribusi Menara	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	3.065.000,00	100%	3.065.000,00
Jumlah	3.065.000,00		3.065.000,00

Tabel 5.3.26 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kategori Umur Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	53.906.480,00	0,50%	269.532,40
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	53.906.480,00		269.532,40

5.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan piutang yang terdiri dari piutang BLUD dan piutang pinjaman kepada kelompok masyarakat. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.217.526.161,88 dan Rp22.857.583.833,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa jenis piutang yang termasuk piutang lainnya direklasifikasi saldo awalnya menjadi piutang lain-lain PAD yang sah yaitu piutang bunga deposito, piutang BLUD, piutang hasil pengelolaan dana bergulir, dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan. Seluruh penerimaan atas piutang tersebut masuk ke dalam pos LRA lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 5.3.27 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pendapatan Bunga	1.232.876,72	0,00
Piutang BLUD	10.725.750.856,00	18.408.555.333,00
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.643.551.000,00	3.643.551.000,00
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	593.562.500,00	593.562.500,00
Piutang TGR	211.915.000,00	211.915.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	41.513.929,16	0,00
Jumlah	15.217.526.161,88	22.857.583.833,00

1. Piutang Pendapatan Bunga

Piutang pendapatan bunga merupakan kekurangan perhitungan pendapatan bunga deposito atas dana cadangan yang harus diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang pendapatan bunga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.232.876,72. Atas kekurangan pembayaran pendapatan bunga tahun 2022 tersebut sudah ditransfer oleh Bank Kalsel ke Kas Daerah pada tanggal 3 Februari 2023.

Tabel 5.3.28 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Bunga

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	0,00	0,00	1.232.876,72	1.232.876,72
Jumlah	0,00	0,00	1.232.876,72	1.232.876,72

2. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan kewajiban pihak ketiga terhadap BLUD. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.725.750.856,00 dan Rp18.408.555.333,00 turun sebesar Rp7.682.804.477,00 atau 41,73%. Piutang BLUD tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Piutang BLUD

Piutang BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
BLUD RSUD H. Hasan Basry	9.537.583.656,00	14.412.681.493,00
BLUD Puskesmas Kandangan	0,00	2.985.000,00
BLUD Puskesmas Negara	24.799.000,00	35.954.000,00
BLUD RS Daha Sejahtera	1.163.368.200,00	3.956.934.840,00
Jumlah	10.725.750.856,00	18.408.555.333,00

a. Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry

Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry Kandangan berupa Jasa Pelayanan atau Retribusi Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.537.583.656,00 dan Rp14.412.681.493,00 dengan rincian mutasi selama tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.30 Rincian Piutang BLUD RS Hasan Basry

RSUD HASAN BASRY	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Covid	8.168.952.900,00	8.168.952.900,00	298.454.000,00	298.454.000,00
BPJS Kesehatan	6.083.967.587,00	6.083.967.587,00	9.055.374.698,00	9.055.374.698,00
BPJS Ketenagakerjaan	0,00	0,00	55.266.322,00	55.266.322,00
PT. Hasnur	0,00	0,00	2.532.206,00	2.532.206,00
Inhealth	0,00	0,00	10.817.313,00	10.817.313,00
PT Tribuana Mas	0,00	0,00	641.250,00	641.250,00
Pemda HST	98.575.358,00	98.575.358,00	0,00	0,00
PT.Pertamina	0,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
AS ADMEDIKA	0,00	0,00	1.045.080,00	1.045.080,00
P2TP2A (Dinas Perindungan Anak Kab.HSS)	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
Pasien Umum Tahun 2022	0,00	0,00	84.697.074,00	84.697.074,00
Sewa Mini Market (Koperasi RSHB)	39.960.000,00	39.960.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
Sewa Tempat BSI	7.141.935,00	7.141.935,00	0,00	0,00
Sewa tempat fotocopy (Adya)	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Denda Pihak ke 3 keterlambatan 2 hari	0,00	0,00	3.294.000,00	3.294.000,00
Sewa Kantin	9.600.000,00	9.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Pasien Umum Tahun 2021	3.618.713,00	250.000,00	0,00	3.368.713,00
Retribusi parkir umum	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
Jumlah	14.412.681.493,00	14.408.447.780,00	9.533.349.943,00	9.537.583.656,00

Piutang BLUD RS Hasan Basry diakui berdasarkan berita acara verifikasi untuk pendapatan BPJS dan Covid, dan berdasarkan surat tagihan/konfirmasi piutang untuk perusahaan, pihak ketiga dan perorangan.

b. Piutang BLUD Puskesmas Kandangan

Piutang BLUD Puskesmas Kandangan berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.985.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.31 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Kandangan

PUSKESMAS KANDANGAN	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00

Piutang BLUD Puskesmas Kandangan diakui berdasarkan berita acara verifikasi dari BPJS atas klaim yang diajukan. Pendapatan atas klaim BPJS sudah diterima seluruhnya pada tahun 2022, sehingga tidak ada



piutang.

c. Piutang BLUD Puskesmas Negara

Piutang BLUD Puskesmas Negara berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp24.799.000,00 dan Rp35.954.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Negara

PUSKESMAS NEGARA	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Rawat Inap	32.600.000,00	32.600.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00
BPJS Rawat Jalan	3.354.000,00	3.354.000,00	3.049.000,00	3.049.000,00
Jumlah	35.954.000,00	35.954.000,00	24.799.000,00	24.799.000,00

Piutang BLUD Puskesmas Negara diakui berdasarkan berita acara verifikasi dari BPJS atas klaim yang diajukan.

d. Piutang BLUD RS Daha Sejahtera

Piutang BLUD RS Daha Sejahtera berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.163.368.200,00 dan Rp3.956.934.840,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.33 Rincian Piutang BLUD RS. Daha Sejahtera

RS DAHA SEJAHTERA	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Klaim Covid-19	3.460.269.000,00	3.460.269.000,00	0,00	0,00
Klaim BPJS	496.665.840,00	496.665.840,00	1.163.368.200,00	1.163.368.200,00
Jumlah	3.956.934.840,00	3.956.934.840,00	1.163.368.200,00	1.163.368.200,00

Piutang BLUD RS Daha Sejahtera diakui berdasarkan berita acara verifikasi dari BPJS atas klaim yang diajukan.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Saldo piutang hasil pengelolaan dana bergulir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.643.551.000,00 merupakan piutang yang terdiri atas piutang pinjaman DPKUP (penggemukan sapi) dan piutang pengembangan sapi yang dikelola oleh Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

a. Piutang Pinjaman DPKUP

DPKUP merupakan piutang lainnya berupa hewan ternak (penggemukan sapi) yang diserahkan kepada masyarakat yang



penyalurannya dilakukan melalui Dinas Pertanian. Saldo Piutang DPKUP per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.863.726.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.34 Rincian Piutang DPKUP

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2012	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Tahun 2013	346.450.000,00	0,00	0,00	346.450.000,00
Tahun 2014	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
Tahun 2015	459.000.000,00	0,00	0,00	459.000.000,00
Tahun 2016	978.276.000,00	0,00	0,00	978.276.000,00
Jumlah	1.863.726.000,00	0,00	0,00	1.863.726.000,00

Tidak ada penerimaan kembali atas piutang DPKUP selama Tahun 2022. Pada bulan November tahun 2022, piutang dana bergulir DPKUP yang sudah tergolong macet diproses oleh Kejaksaan Negeri Kandangan. Piutang ini menimbulkan tunggakan sejak tahun 2017 dan menjadi temuan berulang setiap tahunnya oleh BPK-RI. Hampir semua petugas teknis di bidang peternakan pada Dinas Pertanian sudah dimintai keterangan, juga sekitar 45 orang peternak, pengelola awal kegiatan, dan penjual sapi sudah diminta keterangannya. Beberapa orang petugas teknis dan peternak berdasarkan panggilan sebagai saksi. Pada tanggal 14 September 2022 telah diterbitkan Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm.

b. Piutang Pinjaman Pengembangan Sapi

Saldo piutang pinjaman pengembangan sapi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.779.825.000,00.

Tabel 5.3.35 Rincian Piutang Pengembangan Sapi

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2006 s/d Tahun 2010	33.100.000,00	0,00	0,00	33.100.000,00
Tahun 2007 s/d Tahun 2012	288.150.000,00	0,00	0,00	288.150.000,00
Tahun 2008 s/d Tahun 2012	430.000.000,00	0,00	0,00	430.000.000,00
Tahun 2009 s/s Tahun 2015	937.950.000,00	0,00	0,00	937.950.000,00
Tahun 2010 s/d Tahun 2014	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00
Tahun 2012 s/d Tahun 2016	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00
Tahun 2013 s/d Tahun 2017	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Tahun 2015 s/d Tahun 2021	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00
Jumlah	1.779.825.000,00	0,00	0,00	1.779.825.000,00



Tidak terdapat pengembalian dari beberapa kelompok ternak selama tahun 2022.

4. Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Saldo piutang dari angsuran/cicilan penjualan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp593.562.500,00. Piutang dari angsuran/cicilan penjualan merupakan tagihan atas penjualan alat mesin pertanian berupa *Hand Tractor*, *Power Thresher* dan Pompa Air, yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Tidak ada penysetoran atas angsuran pinjaman Alsintan selama tahun 2022.

Tabel 5.3.36 Rincian Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Hand Traktor dan Power Thresher (2004-2007)	65.870.000,00	0,00	0,00	65.870.000,00
Hand Traktor (2005-2008)	61.200.000,00	0,00	0,00	61.200.000,00
Pompa Air (2005-2010)	460.992.500,00	0,00	0,00	460.992.500,00
Hand Traktor (2008-2009)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Jumlah	593.562.500,00	0,00	0,00	593.562.500,00

5. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Saldo piutang tuntutan ganti rugi (TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp211.915.000,00. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah terdiri atas saldo piutang ganti rugi dari temuan pemeriksaan yang berdasarkan keputusan pembebanan telah dan akan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang terdapat pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry berupa tagihan terhadap Bendahara Penerimaan Jamkesda TA 2012 yang ditetapkan berdasarkan LHPt BPK atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2016 Nomor 21/LHPt/XIX.BJM/2016 tanggal 30 Desember 2016. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada pembayaran atas ganti rugi tersebut.

Tabel 5.3.37 Rincian Piutang Bagian Lancar TGR

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
RSUD Hasan Basry	211.915.000,00	0,00	0,00	211.915.000,00
Jumlah	211.915.000,00	0,00	0,00	211.915.000,00

Terkait piutang TGR atas nama Mansyuri, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Selatan menerbitkan surat Nomor SP-008/PUPNC.17/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Penagihan Langsung dan Penyampaian Surat Paksa a.n Mansyuri.

6. Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang remunerasi dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)



merupakan piutang bunga (remunerasi) atas dana transfer non tunai (TDF) yang ditempatkan pada Bank Indonesia (BI). Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka pemerintah daerah mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF). Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat pemberitahuan tentang Pemutakhiran Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

Saldo piutang remunerasi dana transfer TDF per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.513.929,16.

Tabel 5.3.38 Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	0,00	41.513.929,16	41.513.929,16
Jumlah	0,00	0,00	41.513.929,16	41.513.929,16

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi ke dalam kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang lainnya dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya. Saldo penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah terdiri atas:

Tabel 5.3.39 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga

Kategori Umur Piutang Pendapatan Bunga	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	1.232.876,72	0,50%	6.164,38
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	1.232.876,72		6.164,38

Tabel 5.3.40 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry

Kategori Umur Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	9.533.349.943,00	0,50%	47.666.749,72
Kurang Lancar	4.233.713,00	10%	423.371,30
Diragukan	0,00	50%	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Kategori Umur Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	9.537.583.656,00		48.090.121,02

Tabel 5.3.41 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Negara

Kategori Umur Piutang BLUD Puskesmas Negara	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	24.799.000,00	0,50%	123.995,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	24.799.000,00		123.995,00

Tabel 5.3.42 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RS Daha Sejahtera

Kategori Umur Piutang BLUD RS Daha Sejahtera	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	1.163.368.200,00	0,50%	5.816.841,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
Jumlah	1.163.368.200,00		5.816.841,00

Tabel 5.3.43 Rincian Penyisihan Piutang DPKUP

Kategori Umur Piutang DPKUP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	1.863.726.000,00	100%	1.863.726.000,00
Jumlah	1.863.726.000,00		1.863.726.000,00

Tabel 5.3.44 Rincian Penyisihan Piutang Pengembangan Sapi

Kategori Umur Piutang DPKUP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,0
Macet	1.779.825.000,00	100%	1.779.825.000,00
Jumlah	1.779.825.000,00		1.779.825.000,00



Tabel 5.3.45 Rincian Penyisihan Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Kategori Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan PA	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	593.562.500,00	100%	593.562.500,00
Jumlah	593.562.500,00		593.562.500,00

Tabel 5.3.46 Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR

Kategori Umur Piutang Bag. Lancar TGR	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	211.915.000,00	100%	211.915.000,00
Jumlah	211.915.000,00		211.915.000,00

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Alokasi piutang transfer pemerintah pusat atas dana perimbangan dihitung berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Tidak ada alokasi kurang bayar untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

5.3.1.1.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang transfer antar daerah merupakan piutang atas dana bagi hasil pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) serta penerimaan Pajak Rokok.

Saldo piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.093.499.836,00 dan Rp34.415.878.502,00. Piutang bagi hasil pajak tersebut merupakan pendapatan bagi hasil pajak provinsi yang belum diterima pada Triwulan IV/2022 periode Oktober s/d Desember yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

ditambah dengan sisa pendapatan bagi hasil pajak provinsi Triwulan III dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.47 Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)
		Koreksi Saldo Awal	Pelunasan	Penambahan	
PKB	4.126.360.320,00	0,00	4.126.360.320,00	2.425.067.402,00	2.425.067.402,00
BBNKB	4.558.426.864,00	0,00	4.558.426.864,00	2.656.953.918,00	2.656.953.918,00
PBBKB	23.386.168.417,00	0,00	23.386.168.417,00	31.302.931.496,00	31.302.931.496,00
PAP	20.498.449,00	0,00	20.498.449,00	61.794.671,00	61.794.671,00
Pajak Rokok	2.324.424.452,00	1.864.011.356,00	4.188.435.808,00	2.646.752.349,00	2.646.752.349,00
Jumlah	34.415.878.502,00	1.864.011.356,00	36.279.889.858,00	39.093.499.836,00	39.093.499.836,00

Terdapat koreksi saldo awal piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.864.011.356,00 disebabkan karena adanya bagi hasil pajak rokok yang diterima kasda pada tanggal 27 Juli 2022 atas Pajak Rokok bulan Desember 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Desember Tahun 2021.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 terdiri atas dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Triwulan IV dan sisa Triwulan III yang meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp2.425.067.402,00 merupakan dana bagi hasil penerimaan pajak Triwulan IV periode Bulan Oktober – Desember 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022. Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah diterima seluruhnya pada tanggal 28 Februari 2022.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2.656.953.918,00 merupakan dana bagi hasil BBNKB Triwulan IV sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022. Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah diterima seluruhnya pada tanggal 28 Februari 2022.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp31.302.931.496,00 yang terdiri atas:
 - Sisa dana bagi hasil PBBKB Triwulan III sebesar 16% sesuai Peraturan



Gubernur Nomor 068 Tahun 2022 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2022 sebesar Rp26.029.278.031,00. Sisa Dana bagi hasil PBBKB periode Juli – September sudah diterima dan masuk rekening kas daerah pada tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp4.164.684.485,00;

- Dana bagi hasil PBBKB Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Desember Tahun 2022 sebesar Rp27.138.247.011,00. Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sudah diterima seluruhnya pada tanggal 28 Februari 2022.
- 4. Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp61.794.671,00 merupakan dana bagi hasil Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022. Bagi hasil Pajak Air Permukaan (PAP) sudah seluruhnya diterima pada tanggal 28 Februari 2022.
- 5. Pajak Rokok sebesar Rp2.646.752.349,00 merupakan dana bagi hasil Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan November Tahun 2022. Bagi hasil Pajak Rokok sudah diterima seluruhnya pada tanggal 28 Februari 2022.

Berdasarkan Bultek Akuntansi nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

5.3.1.1.13 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp31.000.000,00. Piutang Lainnya merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

Tabel 5.3.48 Rincian Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pinjaman DPM LUEP	28.000.000,00	28.000.000,00
Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah	31.000.000,00	31.000.000,00

1. Piutang DPM LUEP

Piutang DPM-LUEP merupakan piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP yang belum terlunasi sampai dengan 31 Desember 2022. Pinjaman



DPM LUEP diberikan kepada Badan Usaha Perdesaan yang bergerak dalam jual beli gabah dan beras dengan tujuan mengamankan harga gabah dan beras di tingkat petani sesuai dengan harga referensi pemerintah. Saldo Piutang DPM LUEP per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp28.000.000,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.49 Rincian Piutang DPM LUEP

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2015	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
Jumlah	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00

Saldo piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.000.000,00 merupakan saldo piutang tahun 2015 yang masih harus dibayar oleh penerima pinjaman dikurangi pelunasan cicilan selama tahun 2022. Tidak ada penerimaan atas piutang pinjaman LUEP selama Tahun 2022.

2. Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP

Piutang denda pinjaman DPM LUEP merupakan piutang atas denda yang timbul dari Piutang Pinjaman DPM LUEP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 9/Pen.Somasi/2011/PN.Kgn. pada Tahun 2011 berupa kewajiban denda sebesar Rp3.000.000,00.

5.3.1.1.13.1 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi ke dalam kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang lainnya dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya. Saldo penyisihan piutang lainnya terdiri atas:

Tabel 5.3.50 Rincian Penyisihan Piutang DPM LUEP

Kategori Umur Piutang DPM LUEP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	28.000.000,00	100%	28.000.000,00
Jumlah	28.000.000,00		28.000.000,00

Tabel 5.3.51 Rincian Penyisihan Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP

Kategori Umur Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	3.000.000,00	100%	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Kategori Umur Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Jumlah	3.000.000,00		3.000.000,00

5.3.1.1.14 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp29.910.598.071,36 (**Lampiran 3**) dan Rp22.472.833.719,47 naik sebesar Rp7.437.764.351,89 atau 33,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.52 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	237.030.810,00	126.567.360,00
Bahan Kimia	454.506.115,75	477.319.645,19
Bahan Bakar dan Pelumas	327.005.378,00	84.278.255,00
Bahan Baku	132.782.535,00	48.023.350,00
Bahan/Bibit Tanaman	64.580.285,00	175.706.000,00
Isi Tabung Gas	23.184.000,00	13.170.300,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	12.465.000,00	16.953.500,00
Bahan Lainnya	12.675.827.696,67	5.331.585.727,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	210.252.505,40	182.433.112,60
Suku Cadang Alat Pertanian	2.664.000,00	0,00
Alat Tulis Kantor	180.794.366,00	178.647.956,00
Bahan cetak	728.922.311,00	776.332.745,00
Benda Pos	3.044.000,00	448.000,00
Bahan Komputer	218.370.000,00	0,00
Alat Listrik	343.973.571,00	672.806.285,62
Perlengkapan Dinas	88.561.550,00	34.773.050,00
Suvenir/Cinderamata	223.173.394,00	68.655.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	443.720.995,00	337.405.610,00
Obat	13.111.882.280,68	13.489.338.898,06
Obat-obatan Lainnya	120.175.660,00	0,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	288.826.617,86	458.388.925,00
Pakan	18.855.000,00	0,00
Jumlah	29.910.598.071,36	22.472.833.719,47

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai



wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis persediaan:

a. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi

Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp237.030.810,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa patok tanda batas tanah reklasifikasi dari aset tetap.

b. Persediaan Bahan Kimia

Saldo persediaan bahan kimia sebesar Rp454.506.115,75 merupakan persediaan obat-obatan cairan kimia yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp388.643.055,75; pada Dinas Perikanan sebesar Rp406.250,00; dan persediaan obat cairan kimia dan pupuk pada Dinas Pertanian sebesar Rp65.456.810,00.

c. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas

Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp327.005.378,00 merupakan persediaan bahan bakar solar yang terdapat pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp326.705.378,00; dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp300.000,00.

d. Persediaan Bahan Baku

Saldo persediaan bahan baku sebesar Rp132.782.535,00 merupakan persediaan bahan baku makanan untuk makan minum pasien pada BLUD RSUD H. Hasan Basry.

e. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

Saldo persediaan bahan/bibit tanaman sebesar Rp64.580.285,00 merupakan persediaan bibit tanaman yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.

f. Persediaan Isi Tabung Gas

Saldo persediaan isi tabung gas sebesar Rp23.184.000,00 merupakan persediaan isi tabung gas pasien (oksigen) yang terdapat pada BLUD RSUD H. Hasan Basry.

g. Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp12.465.000,00 merupakan persediaan bibit ikan yang terdapat pada Dinas Perikanan.

h. Persediaan Bahan Lainnya

Saldo persediaan bahan lainnya sebesar Rp12.675.827.696,67 merupakan persediaan yang berasal dari sisa persediaan BTT Covid dan persediaan bahan habis pakai BLUD puskesmas dan rumah sakit dan yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp820.407.258,00; dan



pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp11.855.420.438,67.

i. Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium

Saldo persediaan suku cadang alat laboratorium sebesar Rp210.252.505,40 merupakan persediaan alat-alat laboratorium yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.

j. Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian

Saldo persediaan suku cadang alat pertanian sebesar Rp2.664.000,00 merupakan sisa persediaan alat-alat pertanian yang terdapat pada Dinas Pertanian.

k. Persediaan Alat Tulis Kantor

Saldo persediaan alat tulis kantor sebesar Rp180.794.366,00 berupa sisa persediaan alat tulis kantor yang terdapat pada beberapa SKPD (termasuk dari Dana BOS dan BLUD) sebagai berikut:

Tabel 5.3.53 Saldo Persediaan ATK per SKPD

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan (Dana BOS SD dan SMP)	8.058.000,00
Dinas Kesehatan	5.220.000,00
RSUD BLUD Hasan Basry	139.097.838,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.395.600,00
Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH	690.000,00
Dinas Sosial	1.452.500,00
Dinas Perhubungan	11.811.100,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1.005.000,00
Sekretariat Daerah	7.983.000,00
Sekretariat DPRD	4.081.328,00
Jumlah	180.794.366,00

l. Persediaan Bahan Cetak

Saldo persediaan bahan cetak sebesar Rp728.922.311,00 merupakan persediaan cetak buku, kalender, register, karcis dan blanko cetakan yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.54 Persediaan Bahan Cetak per SKPD

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Kesehatan	17.165.500,00
RSUD H. Hasan Basry	276.283.511,00
Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH	6.939.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	96.625.000,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.840.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.950.000,00
Dinas Perdagangan	66.232.000,00
Sekretariat Daerah	91.345.900,00
BPKPD	152.541.400,00
Jumlah	728.922.311,00

m. Persediaan Benda Pos

Saldo persediaan benda pos per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.044.000,00 berupa sisa persediaan materai yang terdapat pada beberapa SKPD (termasuk dari Dana BOS) sebagai berikut:

Tabel 5.3.55 Persediaan Benda Pos per SKPD

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	64.000,00
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	2.000.000,00
Dinas Sosial	30.000,00
Dinas Pertanian	950.000,00
Jumlah	3.044.000,00

n. Persediaan Bahan Komputer

Saldo persediaan bahan komputer sebesar Rp218.370.000,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa tinta printer sebesar Rp370.000,00; dan sisa persediaan yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp218.000.000,00 berupa perlengkapan untuk cetak blanko.

o. Persediaan Alat Listrik

Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp343.973.571,00 berupa persediaan kabel, lampu, dan peralatan kelistrikan lainnya yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.56 Persediaan Alat Listrik per SKPD

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	60.000,00
RSUD H. Hasan Basry	36.125.261,00
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	307.498.310,00
Bagian Umum	290.000,00
Jumlah	343.973.571,00



p. Persediaan Perlengkapan Dinas

Saldo persediaan perlengkapan dinas sebesar Rp88.561.550,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp48.376.500,00 berupa pakaian dinas lapangan dan pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa baju seragam untuk acara lingkungan sebesar Rp40.185.050,00.

q. Persediaan Suvenir/Cinderamata

Saldo persediaan souvenir/cinderamata sebesar Rp223.173.394,00 merupakan persediaan yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.57 Persediaan Souvenir/Cinderamata

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
RSUD H. Hasan Basry	132.418.394,00
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	7.820.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	82.235.000,00
Sekretariat Daerah	700.000,00
Jumlah	223.173.394,00

r. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp443.720.995,00 berupa persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.58 Persediaan Bahan Pembersih per SKPD

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	1.247.250,00
RSUD BLUD Hasan Basry	271.450.060,00
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	115.281.585,00
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	54.153.100,00
Dinas Pertanian	1.589.000,00
Jumlah	443.720.995,00

s. Persediaan Obat

Saldo persediaan obat sebesar Rp13.111.882.280,68 merupakan persediaan obat-obatan medis yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.719.746.797,00; BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp6.096.235.938,68; dan Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA sebesar Rp295.899.545,00.



t. Persediaan Obat-obatan Lainnya

Saldo persediaan obat-obatan lainnya sebesar Rp120.175.660,00 merupakan persediaan obat-obatan untuk hewan ternak yang terdapat pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.570.400,00; dan Dinas Pertanian sebesar Rp117.605.260,00.

u. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp288.826.617,86 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa baju seragam, dan barang-barang untuk hadiah sebesar Rp100.419.242,86; dan pada Dinas Sosial berupa bahan makanan pokok untuk bantuan bencana, peralatan rumah tangga untuk bantuan pelatihan sebesar Rp188.407.375,00.

v. Persediaan Pakan

Saldo persediaan pakan sebesar Rp18.855.000,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada Dinas Perikanan berupa pakan untuk ternak ikan.

Selain saldo persediaan tersebut diatas, terdapat juga persediaan yang sudah tidak terpakai lagi/usang/*expired* yang terdapat pada beberapa SKPD sebesar Rp1.280.438.211,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.59 Rincian Persediaan Usang TA 2022

No	SKPD	Persediaan	Sisa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Obat pada UPT Gudang Farmasi	460.794.188,00	835.962.581,02
		Obat pada RS Daha Sejahtera	74.416.379,00	
		Obat pada 21 Puskesmas	276.516.114,02	
		Obat pada bangsal covid	16.738.300,00	
		Blanko dan karcis	7.497.600,00	
2	RSUD BLUD H. Hasan Basry	Obat-obatan	144.287.594,73	144.287.594,73
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Karcis retribusi	7.225.425,00	223.441.707,47
		Bahan Kimia	216.216.282,47	
4	Dinas Perdagangan	Karcis	41.228.825,00	41.228.825,00
5	Dinas Perhubungan	Karcis	8.324.692,00	8.324.692,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	Karcis	3.860.445,00	3.860.445,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Persediaan	Sisa (Rp)	Jumlah (Rp)
7	BPKPD	Blanko/Karcis	23.332.366,00	23.332.366,00
TOTAL				1.280.438.211,22

Sampai dengan laporan ini dibuat telah dilakukan usulan untuk pemusnahan persediaan usang. Persediaan usang tahun berjalan disajikan sebagai beban lain-lain pada Laporan Operasional.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan umur lebih dari satu tahun. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp89.021.341.839,44 dan Rp88.392.391.429,69. Selama Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan dalam Investasi Jangka Panjang.

Tabel 5.3.60 Rincian Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan INP Dana Bergulir	0,00	0,00
INP Lainnya Netto	0,00	0,00
Investasi Permanen	89.021.341.839,44	88.392.391.429,69
Jumlah Investasi Jangka Panjang	89.021.341.839,44	88.392.391.429,69

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo pada Investasi Non Permanen Lainnya.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*). Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp89.021.341.839,44 dan Rp88.392.391.429,69.

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp89.021.341.839,44 dan Rp88.392.391.429,69. Tidak ada penambahan penyertaan modal selama Tahun 2022.



Tabel 5.3.61 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Bank Kalsel	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Perusahaan Daerah	29.215.467.478,86	28.552.019.911,23
BPR HSS	4.100.885.228,58	4.092.162.386,46
Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00
BKK	80.053.495,00	80.053.495,00
BUMDes	549.935.637,00	593.155.637,00
Jumlah	89.021.341.839,44	88.392.391.429,69

1. Bank Kalsel

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Kalsel per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp55.000.000.000,00. Besaran persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas penyertaan modal pada Bank Kalsel yaitu 3,49% sehingga dicatat dengan metode biaya. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel selama tahun 2022.

2. Perusahaan Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp29.215.467.478,86 dan Rp28.552.019.911,23. Perusahaan Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas PDAM Tirta Dharma Kandangan dan PD Sasangga Banua dengan rincian nilai penyertaan modal sebagai berikut:

Tabel 5.3.62 Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Penambahan	Bagian Laba/ (Rugi)	
PDAM Tirta Dharma Kandangan	27.172.652.461,13	0,00	663.447.567,63	27.836.100.028,76
PD Sasangga Banua	1.379.367.450,10	0,00	0,00	1.379.367.450,10
Jumlah	28.552.019.911,23	0,00	663.447.567,63	29.215.467.478,86

a. PDAM Tirta Dharma Kandangan

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma Kandangan per 31 Desember 2022 dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 82% berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Dharma Kandangan *Audited*. Tidak ada penambahan investasi pada PDAM Tirta Dharma Kandangan tahun 2022.

Selama tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan *Audited* yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti (BAMS), PDAM Tirta Dharma Kandangan mencatat bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai



Selatan sebesar Rp663.447.567,63. Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma Kandangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp27.836.100.028,76 dan Rp27.172.652.461,13.

PDAM Tirta Dharma Kandangan terhitung mulai 1 Januari 2023 berubah status kedudukannya menjadi perusahaan perseroan daerah dengan nama PT Tirta Amandit (Perseroda).

b. PD Sasangga Banua

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PD Sasangga Banua per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.379.367.450,10. Status PD Sasangga Banua sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan ini sudah dilikuidasi dengan diterbitkannya Laporan Likuidasi PD Sasangga Banua oleh Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, SH.,MH. namun masih menunggu Raperda pengesahan pembubaran oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai surat Bupati kepada Ketua DPRD dengan Nomor 500/271/Ekobang tanggal 15 April 2020 perihal Tindak Lanjut Pembubaran PD Sasangga Banua.

Data utama likuidasi adalah data yang disajikan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, yaitu: Laporan Keuangan Penutupan Perusahaan Daerah Sasangga Banua Untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 15 September 2012 dan 31 Desember 2011 dengan posisi neraca pada saat penutupan sebagai berikut:

Tabel 5.3.63 Neraca Penutupan PD Sasangga Banua

Uraian:	2012 (Rp)	2011 (Rp)
Aset Lancar	1.865.406.091,60	1.818.328.158,48
Aset Tidak Lancar	0,00	0,00
Jumlah Aset	1.865.406.091,60	1.818.328.158,48
Kewajiban Jangka Pendek	486.038.641,50	1.853.065.661,56
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban	486.038.641,50	1.853.065.661,56
Modal (penyertaan modal Kab. HSS)	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00
Akumulasi Kerugian	(1.670.632.549,90)	(3.084.737.503,08)
Jumlah Ekuitas	1.379.367.450,10	(34.737.503,08)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.865.406.091,60	1.818.328.158,48

3. PT BPR Hulu Sungai Selatan

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PT BPR Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Hulu Sungai Selatan *Audited* sebesar



Rp4.100.885.228,58 dan Rp4.092.162.386,46. Tidak ada penambahan investasi pada BPR HSS selama tahun 2022.

Selama tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Hulu Sungai Selatan *Audited*, mencatat bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp8.722.842,12. Penilaian penyertaan modal dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan sebesar 55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.64 Rincian Penyertaan Modal pada PT BPR Hulu Sungai Selatan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Penambahan	Bagian Laba/ (Rugi)	
PT BPR Hulu Sungai Selatan	4.092.162.386,46	0,00	8.722.842,12	4.100.885.228,58
Jumlah	4.092.162.386,46	0,00	8.722.842,12	4.100.885.228,58

4. KPN Swarga

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada KPN Swarga Kandungan dicatat dengan metode biaya (kepemilikan sebesar 1,51%). Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.000.000,00. Selama Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan atas penyertaan modal pada KPN Swarga Kandungan.

5. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Daha Utara

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) Daha Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp80.053.495,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada BKK Daha Utara sampai dengan tahun anggaran 2022. Laporan Keuangan BKK Daha Utara belum diaudit.

6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per 31 Desember 2022 dan 2021 Rp549.935.637,00 sebesar Rp593.155.637,00. Tidak ada pembekuan untuk BUMDes tetapi ada kesepakatan bersama agar masing-masing BUMDes melalui RUPS harus mengembalikan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Surat Nomor: 500.2/413/Ekobang Tanggal 23 Mei 2012. Berikut disajikan mutasi pengembalian penyetoran modal dari 2 (dua) BUMDes:

Tabel 5.3.65 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMDes

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2021 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
BUMDes Kandungan	81.421.539,00	0,00	81.421.539,00
BUMDes Padang Batung	273.800.000,00	35.000.000,00	238.800.000,00
BUMDes Sungai Raya	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2021 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
BUMDes Simpur	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
BUMDes Angkinang	76.334.098,00	8.220.000,00	68.114.098,00
Jumlah	593.155.637,00	43.220.000,00	549.935.637,00

5.3.1.3 ASET TETAP

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Mulai Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Perubahan penggolongan dan kodefikasi barang berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 sudah dapat diakomodir melalui SIMDA BMD. Penyesuaian kebijakan akuntansi atas Permendagri 108 diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.160.352.349.464,71 dan Rp3.135.870.443.805,03, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.66 Ringkasan Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tanah	617.424.484.442,00	613.374.512.442,00
Peralatan dan Mesin	610.310.663.406,51	568.337.097.233,51
Gedung dan Bangunan	1.247.876.856.262,37	1.184.329.541.409,32
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.893.304.474.948,08	1.816.821.269.231,45
Aset Tetap Lainnya	40.049.628.805,83	49.793.305.379,83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	102.359.936.525,00	74.349.264.800,00
Akumulasi Penyusutan	(1.350.973.694.925,08)	(1.171.134.546.691,08)
Jumlah	3.160.352.349.464,71	3.135.870.443.805,03

Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penambahan aset dari belanja modal tahun 2022 termasuk didalamnya berasal dari belanja modal dana BOS dan BLUD; (2) penerimaan aset dari donasi/hibah; (3) penambahan aset dari belanja non modal tahun 2022; (4) klasifikasi masuk berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; dan (5) koreksi pengelompokan



yang menambah nilai aset.

Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap; (2) klasifikasi keluar berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang fisiknya belum selesai dikerjakan; (3) koreksi pengelompokan yang mengurangi nilai aset; (4) reklasifikasi ke aset lainnya (aset tidak berwujud dan aset rusak berat); dan (5) reklasifikasi menjadi barang ekstrakompabel.

Mutasi Aset Tetap (tanpa akumulasi penyusutan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022 sesuai realisasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.67 Rincian Mutasi Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Selama TA 2022		31 Desember 2022 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	613.374.512.442,00	5.512.518.770,00	(1.462.546.770,00)	617.424.484.442,00
Peralatan dan Mesin	568.337.097.233,51	52.877.003.947,50	(10.903.437.774,50)	610.310.663.406,51
Gedung dan Bangunan	1.184.329.541.409,32	114.892.824.101,55	(51.345.509.248,50)	1.247.876.856.262,37
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.816.821.269.231,45	106.946.021.859,98	(30.462.816.143,35)	1.893.304.474.948,08
Aset Tetap Lainnya	49.793.305.379,83	1.068.047.200,00	(10.811.723.774,00)	40.049.628.805,83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	74.349.264.800,00	30.062.885.375,00	(2.052.213.650,00)	102.359.936.525,00
Jumlah	4.307.004.990.496,11	311.359.301.254,03	(107.038.247.360,35)	4.511.326.044.389,79

5.3.1.3.1 Tanah

Berdasarkan PSAP 07, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp617.424.484.442,00 dan Rp613.374.512.442,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp4.049.972.000,00 atau 0,66% dari saldo Aset Tetap Tanah tahun 2021. Adapun daftar aset tetap tanah pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.68 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	90.001.193.875,00	90.231.143.875,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	21.801.194.144,00	18.969.668.144,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	23.807.989.232,00	23.807.989.232,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	163.700.178.997,00	163.700.178.997,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	57.387.824.425,00	55.522.105.425,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	267.223.770,00	0,00
7	Dinas Sosial	1.168.223.949,00	2.112.092.949,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	96.705.000,00	96.705.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.500.000,00	100.500.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	144.000.000,00	144.000.000,00
11	Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA	527.500.000,00	527.500.000,00
12	Dinas Perhubungan	19.163.573.410,00	19.163.573.410,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	639.367.770,00	639.367.770,00
14	Dinas Tenaga Kerja, KUK, dan Perindustrian	2.264.482.900,00	2.166.532.900,00
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.669.500.000,00	1.669.500.000,00
16	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	7.671.235.745,00	7.353.135.745,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.089.114.000,00	5.089.114.000,00
18	Dinas Perikanan	482.725.537,00	482.725.537,00
19	Dinas Pertanian	55.595.112.610,00	55.595.112.610,00
20	Dinas Perdagangan	16.267.983.917,00	16.267.983.917,00
21	Sekretariat Daerah	10.237.067.000,00	10.258.571.000,00
22	Bagian Pemerintahan	16.968.143.421,00	16.968.143.421,00
23	Bagian Umum	46.647.211.480,00	46.647.211.480,00
24	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	1.341.900.000,00	1.341.900.000,00
25	Inspektorat Daerah	1.343.181.200,00	1.343.181.200,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	13.716.828.316,00	13.716.828.316,00
27	Badan Kepegawaian dan PSDM	1.466.199.543,00	1.466.199.543,00
28	Sekretariat DPRD	343.200.000,00	343.200.000,00
29	Kecamatan Sungai Raya	12.800.866.580,00	12.800.866.580,00
30	Kecamatan Padang Batung	7.928.206.164,00	7.928.206.164,00
31	Kecamatan Telaga Langsat	1.820.959.852,00	1.820.959.852,00
32	Kecamatan Angkinang	4.968.288.754,00	4.968.288.754,00
33	Kecamatan Kandangan	1.412.694.120,00	1.412.694.120,00
34	Kelurahan Kandangan Kota	261.126.770,00	261.126.770,00
35	Kelurahan Kandangan Barat	75.636.770,00	75.636.770,00
36	Kelurahan Kandangan Utara	109.476.345,00	109.476.345,00
37	Kelurahan Jambu Hilir	986.812.718,00	986.812.718,00
38	Kecamatan Simpur	2.720.023.992,00	2.620.023.992,00
39	Kecamatan Daha Selatan	16.145.178.337,00	16.145.178.337,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
40	Kecamatan Daha Utara	1.943.802.280,00	1.943.802.280,00
41	Kecamatan Kalumpang	4.915.479.959,00	4.915.479.959,00
42	Kecamatan Loksado	1.026.835.500,00	1.026.835.500,00
43	Kecamatan Daha Barat	367.736.060,00	367.736.060,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.000.000,00	267.223.770,00
Jumlah		617.424.484.442,00	613.374.512.442,00

Adapun mutasi tanah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.69 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	613.374.512.442,00
Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2022	5.512.518.770,00
Pengurangan Aset Tetap tanah Tahun 2022	(1.462.546.770,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	617.424.484.442,00

A. Penambahan Aset Tetap Tanah

Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp5.512.518.770,00 terdiri atas penambahan sebagai berikut:

1. Penambahan berupa Realisasi Belanja Modal Tanah pada LRA sebesar Rp117.926.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.

Rincian mengenai belanja modal Tanah per jenis barang pada **Lampiran 4**.

2. Hibah sebesar Rp133.800.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupa hibah tanah kompleks perumahan, yaitu Komplek Perumahan Gerilya Yulia Permai Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung dengan luasan sebesar 446 m2 sesuai Berita Acara Nomor 01/B.A PSU-GYP/DISPERA KPLH/HSS/X/2022.
3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp1.182.750.000,00 merupakan reklasifikasi dari beban barang dan jasa ke belanja modal atau aset tetap yang seharusnya pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.70 Rincian Reklasifikasi dai Non Modal per SKPD

No	SKPD	Reklas dari	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Beban Pegawai	1.200.000,00	Honorarium jasa apraisal Puskesmas Wasah
		Beban Barjas BLUD	75.400.000,00	Perencanaan dan pengawasan pengurangan tanah RS Daha Sejahtera
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Beban Jasa	27.700.000,00	Jasa konsultasi pengawasan pengurangan lahan TPU Daha Selatan
		Beban Pemeliharaan	760.350.000,00	Pengurangan TPU di Daha Selatan dan Gambah



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Reklas dari	Nilai (Rp)	Keterangan
3	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	Beban Pemeliharaan	318.100.000,00	Pengurangan halaman Gedung Serbaguna
Jumlah			1.182.750.000,00	

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.637.000.000,00, yang terdapat pada Dinas Kesehatan dari KIB C (Gedung dan Bangunan) berupa pengurangan lahan Rumah Sakit Daha Sejahtera.
- Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.441.042.770,00 merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.71 Rincian Mutasi Masuk antar SKPD

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Dinas Sosial	943.869.000,00	Tanah kuburan / tanah untuk makam
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	267.223.770,00	Tanah bangunan kantor
3	Dinas Tenaga Kerja KUKP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	97.950.000,00	Tanah bangunan gedung kantor (tanah eks UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loksado)
4	Kecamatan Simpur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000.000,00	Tanah bangunan gedung kantor (tanah eks UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.000.000,00	Tanah bangunan gedung kantor
Jumlah			1.441.042.770,00	

Mutasi masuk antar SKPD memiliki nilai yang sama dengan mutasi keluar antar SKPD.

B. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp1.462.546.770,00 terdiri atas pengurangan aset tetap sebagai berikut:

- Mutasi keluar SKPD sebesar Rp1.441.042.770,00 merupakan aset yang dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna tetapi pembeliannya atau pengadaannya dari SKPD asal. Mutasi keluar SKPD mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.72 Rincian Mutasi Keluar antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja KUKP	97.950.000,00	Tanah bangunan gedung kantor (tanah eks UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loksado)
		Kecamatan Simpur	100.000.000,00	Tanah bangunan gedung kantor (tanah



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
				eks UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpur)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	32.000.000,00	Tanah bangunan gedung kantor
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	267.223.770,00	Tanah bangunan kantor
3	Dinas Sosial	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	943.869.000,00	Tanah kuburan / tanah untuk makam
Jumlah			1.441.042.770,00	

2. Penghapusan karena dihibahkan sebesar Rp21.504.000,00 yang terdapat pada Sekretariat Daerah berupa tanah (markas komando Polsek Simpur) dihibahkan kepada Polres Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Nomor 032/08/NPHD-BMD/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp610.310.663.406,51 dan Rp568.337.097.233,51 terjadi kenaikan sebesar Rp41.973.566.173,00 atau 7,39% dari total Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.73 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	75.968.853.080,51	71.492.208.263,51
2	Dinas Kesehatan	86.042.226.681,00	77.327.017.456,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	230.159.332.356,00	215.001.910.866,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.028.051.524,00	10.792.426.638,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	43.975.392.943,00	41.465.250.743,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.937.195.328,00	4.851.477.828,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.641.253.896,00	420.825.604,00
8	Dinas Sosial	2.756.095.558,00	2.292.064.158,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.214.339.006,00	1.213.089.006,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.887.556.887,00	2.575.930.887,00
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	801.241.400,00	780.911.400,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	5.364.935.884,00	5.263.035.884,00
13	Dinas Perhubungan	15.688.128.118,00	14.858.138.118,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.282.322.193,00	11.173.573.053,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	3.529.615.474,00	3.305.625.005,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.387.456.084,00	3.275.510.684,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	4.529.036.864,00	3.410.575.864,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.637.624.974,00	2.404.193.974,00
19	Dinas Perikanan	5.809.272.633,00	5.809.272.633,00
20	Dinas Pertanian	11.432.348.945,00	10.974.880.345,00
21	Dinas Perdagangan	4.021.631.004,00	3.926.259.004,00
22	Sekretariat Daerah	897.232.326,00	897.232.326,00
23	Bagian Hukum	389.546.834,00	358.346.834,00
24	Bagian Pemerintahan	1.873.242.561,00	1.873.242.561,00
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.882.367.004,00	1.613.503.004,00
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	341.961.584,00	341.961.584,00
27	Bagian Organisasi	660.118.703,00	596.718.703,00
28	Bagian Umum	23.038.436.976,00	23.415.578.476,00
29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.480.936.033,00	1.216.662.034,00
30	Bagian Perekoniman dan Pembangunan	401.927.294,00	401.927.294,00
31	Inspektorat Daerah	2.274.782.346,00	2.102.481.445,00
32	BAPPELITBANGDA	1.630.631.948,00	1.170.660.758,00
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.467.097.125,00	9.866.043.819,00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.692.357.032,00	3.429.762.032,00
35	Sekretariat DPRD	9.042.988.040,00	7.301.863.390,00
36	Kecamatan Sungai Raya	1.358.005.696,00	1.320.330.696,00
37	Kecamatan Padang Batung	1.426.401.399,00	1.348.438.399,00
38	Kecamatan Telaga Langsat	1.254.019.437,00	1.153.808.437,00
39	Kecamatan Angkinang	1.195.613.437,00	1.150.118.437,00
40	Kecamatan Kandangan	1.966.277.533,00	1.957.440.033,00
41	Kelurahan Kandangan Kota	414.228.906,00	413.273.906,00
42	Kelurahan Kandangan Barat	574.782.877,00	487.837.877,00
43	Kelurahan Kandangan Utara	477.951.232,00	393.316.232,00
44	Kelurahan Jambu Hilir	690.713.731,00	654.043.731,00
45	Kecamatan Simpur	1.327.550.787,00	1.274.175.787,00
46	Kecamatan Daha Selatan	1.562.906.472,00	1.550.131.472,00
47	Kecamatan Daha Utara	1.746.148.603,00	1.702.548.603,00
48	Kecamatan Kalumpang	1.485.906.983,00	1.465.566.983,00
49	Kecamatan Loksado	1.320.907.571,00	1.207.329.571,00
50	Kecamatan Daha Barat	1.354.848.829,00	1.264.873.829,00
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	986.863.275,00	3.793.701.567,00
Jumlah		610.310.663.406,51	568.337.097.233,51



Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.74 Mutasi Peralatan dan Mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 januari 2022	568.337.097.233,51
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	52.877.003.947,50
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	(10.903.437.774,50)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	610.310.663.406,51

A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2022 sebesar Rp52.877.003.947,50 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal (LRA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.292.195.973,00 yang merupakan realisasi Belanja Modal seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai dan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.75 Daftar Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.330.305.892,00
2	Dinas Kesehatan	8.930.304.846,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	17.538.124.597,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	292.866.036,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	1.037.796.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.900.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	218.473.500,00
8	Dinas Sosial	267.675.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.250.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	313.326.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	65.220.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	101.900.000,00
13	Dinas Perhubungan	595.100.600,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.303.932.387,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	49.664.865,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	99.900.000,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.070.323.400,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.700.000,00
19	Dinas Pertanian	253.896.600,00
20	Dinas Perdagangan	37.755.000,00
21	Bagian Hukum	31.200.000,00
22	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	264.764.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
23	Bagian Organisasi	61.900.000,00
24	Bagian Umum	286.630.000,00
25	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	269.373.999,00
26	Inspektorat Daerah	174.843.401,00
27	Bappelitbangda	157.489.000,00
28	BPKPD	283.940.000,00
29	Badan Kepegawaian dan PSDM	262.595.000,00
30	Sekretariat DPRD	1.988.899.650,00
31	Kecamatan Sungai Raya	37.675.000,00
32	Kecamatan Padang Batung	45.963.000,00
33	Kecamatan Telaga Langsat	100.211.000,00
34	Kecamatan Angkinang	49.095.000,00
35	Kecamatan Kandangan	8.837.500,00
36	Kelurahan Kandangan Kota	955.000,00
37	Kelurahan Kandangan Barat	89.345.000,00
38	Kelurahan Kandangan Utara	93.985.000,00
39	Kelurahan Jambu Hilir	52.630.000,00
40	Kecamatan Simpur	53.375.000,00
41	Kecamatan Daha Selatan	12.775.000,00
42	Kecamatan Daha Utara	43.600.000,00
43	Kecamatan Kalumpang	20.340.000,00
44	Kecamatan Loksado	81.578.000,00
45	Kecamatan Daha Barat	67.065.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	194.716.500,00
Jumlah		43.292.195.973,00

Rincian mengenai belanja modal Peralatan dan Mesin per jenis barang pada **Lampiran 5**.

- Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp933.081.506,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.76 Daftar Reklasifikasi dari Belanja Non Modal (Barang dan Jasa)

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Barjas BOS	11.143.000,00	Lemari besi pada SMPN 2 Kandangan
		Beban Persediaan	27.000.000,00	Klotok pada Disdikbud
2	Dinas Kesehatan	Beban pegawai	11.180.000,00	Honor pejabat pengadaan laptop dan alat kesehatan
		Beban Persediaan	81.700.000,00	Kursi kerja, headset gaming, webcam, PC
		Beban barjas BLUD	24.040.000,00	Gorden



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	Beban barjas BLUD	332.478.506,00	Modem, <i>hardisk</i> , gorden ICU, timbangan badan, AC, TV, tangga, kursi plastik, pompa dan camera
4	Dispera KPLH	Beban Persediaan	91.180.000,00	timbangan digital, <i>treker tierod ball joint separator</i> , meja kayu, lemari kayu, CCTV
		Beban Pemeliharaan	3.330.000,00	CCTV
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Beban Pegawai	400.000,00	Honor pejabat pengadaan kegiatan belanja modal pengadaan meubeler
6	Dinas Sosial	Beban Pegawai	1.850.000,00	Honor pengadaan <i>vacum cleaner</i> , laptop, perahu karet
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Beban Persediaan	10.000.000,00	CCTV
8	Dinas Kominfo	Beban Pegawai	2.400.000,00	Honor pengadaan alat studio dan video dan film, perluasan jaringan internet
		Beban Persediaan	159.050.000,00	<i>Sound system</i> , <i>wifi acces point</i> , <i>router microtic</i>
9	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	Beban Persediaan	57.250.000,00	Meja kursi, meja sofa (1set), papan nama, dan kursi rapat
			9.800.000,00	CCTV
		Beban Pemeliharaan	18.730.000,00	Papan skor sepak bola
			14.820.000,00	Pompa air dan tandon air
			5.940.000,00	Tabung pemadam APAR 1 kg
10	Dinas Pertanian	Beban Pegawai	1.750.000,00	Laptop
11	Dinas Perdagangan	Beban Persediaan	25.000.000,00	Tempat sampah beroda, <i>barcode scanner</i> dan <i>module remote barrier gate</i>
		Beban Jasa	1.000.000,00	<i>Barcode scanner</i> dan <i>module remote barrier gate</i>
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Beban Pegawai	4.100.000,00	Honorarium jasa pengadaan <i>drone</i> , kamera, telepon digital, PC, dan printer
13	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Beban Pegawai	1.500.000,00	Honor PPK pengadaan laptop dan AC split
14	Bagian Umum	Beban Pegawai	3.600.000,00	Honor PPK dan PPBJ pengadaan laptop, printer, LCD, <i>finger print</i> , pemotong dahan
15	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Beban Pegawai	500.000,00	Honor PPK pengadaan komputer
16	Inspektorat Daerah	Beban Pegawai	500.000,00	Honor pengadaan barang dan jasa
17	Sekretariat DPRD	Beban Pegawai	1.650.000,00	Honor PPKom pengadaan kendaraan dinas operasional
18	Kecamatan Daha Barat	Beban Persediaan	31.190.000,00	Dispenser, karpet, pintu kaca, gorden, kompor gas, tabung gas
Jumlah			933.081.506,00	

3. Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp594.465.560,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.77 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan	Berita Acara
1	Dinas Kesehatan	170.584.150,00	Dari Kemenkes RI Dirjen Kesehatan Masyarakat berupa Ambulance	KN.02.07/B.I/3445/2022
2	RSUD Hasan Basry Kandangan	1.200.000,00	Dari Ibu Kiki Rachmawati, Jl.Perdagangan Komp. Perdagangan Permai II RT.022 RW.002 berupa Kursi Roda	032/5.215/UM/RSUD-BHBB
		220.983.610,00	Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berupa GLP HFNC 01 GERLINK dan YAMIND DM28-30ST-BP CPAP	442.1/2813/IF/XII/2022
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	42.327.500,00	Dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan berupa sepeda motor trail	No.000.3.3.2/8138/BAK dan No.000.3.3.2/001/SATPOL-PP-DAMKAR Tahun 2022
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	15.370.300,00	Dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa personal komputer, printer dan modem	No.11/BAST/DISPMPPTSP Tahun 2021
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	128.000.000,00	Dari Bank Kalsel berupa mobil Daihatsu Grand Max	No.783/XI/SAR/KDG/21
		13.500.000,00	Dari Bank Kalsel berupa laptop	No.857/XI/OPR/KDG/22
		2.500.000,00	Dari PT TASPEN berupa tablet PC (hadiah terbaik II kepada BPKPD atas ketepatan setoran IWP dan JKK JKM)	-
Jumlah		594.465.560,00		

4. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.612.951.214,50 merupakan mutasi masuk dari KIB lain guna menyesuaikan masing-masing aset dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.78 Rincian Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	7.700.000,00	Lemari kaca pada SDN Bambi Selatan
		KIB C (Gedung Bangunan)	740.373.214,50	Lihat pada tabel 5.3.79
2	RSUD H. Hasan Basry	KIB C (Gedung Bangunan)	29.511.000,00	Konsultan pengawasan penangkal petir
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB D (JIJ)	1.770.000.000,00	Lampu bandell dan lampu sorot
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB C (Gedung Bangunan)	6.050.000,00	Pompa, dan tandon air



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
5	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung Bangunan)	59.317.000,00	Meja kerja, kursi kerja, AC, laptop dan printer
Nilai			2.612.951.214,50	

Berikut disajikan reklasifikasi dari Gedung dan bangunan (KIB C) pada Dinas Pendidikan.

Tabel 5.3.79 Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan

No.	Sekolah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	SMPN 1 Daha Barat	80.620.000,00	Pengadaan meja, kursi, lemari, papan tulis, kotak sampah, wastafel, dan AC
2	SMPN 1 Angkinang	67.472.014,50	Pengadaan kursi, meja, kotak sampah, lemari dan papan tulis
3	SMPN 2 Angkinang	75.157.200,00	Pengadaan kursi, meja, kotak sampah, lemari dan papan tulis
4	SDN 2 Pihanin	54.527.000,00	Pengadaan kipas angin, proyektor, layar, rak buku, rak prakarya, tirai, karpet meja dan kursi
5	SDN Wawaran	204.881.000,00	Pengadaan lemari, kursi, meja, kipas angin, proyektor, layar, rak, papan pengumuman, pagar hias dan karpet
6	SDN 1 Hamalau	2.090.000,00	Pengadaan meja, rak buku dan kursi
7	SDN Muara Ulang	17.430.000,00	Pengadaan meja, kursi, rak buku, dan karpet
8	SDN Sungai Hanyar	1.580.000,00	Pengadaan meja dan kursi
9	TK Pembina Daha Selatan	55.096.000,00	Pengadaan meja, kursi dan loker
10	TK Pembina Telaga Langsat	113.320.000,00	Pengadaan meja, kursi dan loker
11	Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Kandungan	68.200.000,00	Pengadaan meja, kursi, meja jahit, papan tulis, meja <i>display</i> , dan lemari
Total		740.373.214,50	

5. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp5.444.309.694,00 merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.80 Rincian Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin per SKPD

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Satpol PP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.490.000,00	Kendaraan roda 2
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.001.554.792,00	Kendaraan bermotor, alat angkutan, alat ukur, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, mebel, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya, alat



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
				pemadam kebakaran, peralatan studio, alat komunikasi, personal komputer, peralatan komputer, dan alat pelindung
3	Dinas Sosial	Bagian Umum	201.822.000,00	Kendaraan roda 4
		BPKPD	17.834.400,00	Kendaraan roda 2
4	Dinas Perhubungan	Bagian Umum	420.405.000,00	Kendaraan roda 4
		BPKPD	13.145.000,00	Kendaraan roda 2
5	Dinas Naker Kop dan UKP	BPKPD	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat DPRD	249.425.000,00	Kendaraan roda 4
7	Dinas Pertanian	Bagian Umum	201.822.000,00	Kendaraan roda 4
8	Bagian Umum	BPKPD	417.952.500,00	Kendaraan roda 4
9	BAPPELITBANGDA	Bagian Umum	219.850.000,00	Kendaraan roda 4
		BPKPD	256.957.794,00	Kendaraan roda 4
10	BPKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.400.000,00	Kendaraan roda 2
		BAPPELITBANGDA	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
		Dinas Pekerjaan Umum	4.000.000,00	Kendaraan roda 2
11	Kecamatan Padang Batung	BPKPD	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
12	Kecamatan Loksado	BPKPD	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
Jumlah			5.444.309.694,00	

Pada mutasi aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan persetujuan Bupati Nomor 032/732/BPKPD tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp3.009.654.792,00 terdapat barang ekstrakompatabel sebesar Rp8.100.000,00.

B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp10.903.437.774,50 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke ekstrakompatabel sebesar Rp1.201.188.405,50 yaitu kumulatif belanja modal aset tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah Rp750.000,00 untuk setiap unit barang dari seluruh SKPD sebagai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.81 Rincian Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin per SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	627.724.289,50
2	Dinas Kesehatan	200.717.071,00
3	RSUD Hasan Basry	159.792.095,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.241.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	6.129.000,00
6	Dinas Sosial	18.850.000,00
7	Dinas Kominfo	17.650.000,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP	3.324.900,00
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	58.402.400,00
10	Bagian Umum	24.625.000,00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00
12	Kelurahan Kandangan Barat	2.400.000,00
13	Kelurahan Kandangan Utara	9.350.000,00
14	Kelurahan Jambu Hilir	15.960.000,00
15	Kecamatan Angkinang	3.600.000,00
16	Kecamatan Daha Barat	1.780.000,00
17	Inspektorat Daerah	3.042.500,00
Jumlah		1.201.188.405,50

2. Adanya penghapusan barang-barang inventaris berupa Peralatan dan Mesin karena kondisi rusak berat sebesar Rp1.509.132.200,00 yang sampai dengan tanggal neraca telah dilakukan proses penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.82 Daftar Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Rusak Berat

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan	Nomor SK
1	Dinas Kesehatan	300.020.200,00	Mobil Ambulance	Sekda No. 40 Tahun 2022
2	RSUD Hasan Basry	724.480.000,00	Alat kedokteran umum dan meubelair	Sekda No. 27 Tahun 2022
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	386.035.000,00	Furnace kit dan alat laboratorium penunjang lainnya	Sekda No. 27 Tahun 2022
4	Dinas Pekerjaan Umum dan TR	11.000.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
5	Dinas Kependudukan dan Catpil	11.700.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.000.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
7	Dinas Perdagangan	7.000.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
8	Kecamatan Daha Barat	6.500.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
9	BPKPD	44.397.000,00	Sepeda motor	Sekda No. 27 Tahun 2022
Jumlah		1.509.132.200,00		

3. Penghapusan karena dihibahkan sebesar Rp191.070.000,00 berupa peralatan pemancar UHF lainnya yang dihibahkan kepada Majelis Ta'lim Al-Hidayah Lingkungan Mesjid Desa Kapuh pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Hulu Sungai Selatan dengan Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kecamatan Simpur Nomor 032/08/NPHD-BMD/VII/2022 pada tanggal 27 Juli 2022.

4. Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp338.330.437,00 karena belanja modal tidak menambah nilai aset tetap atau tidak tergolong sebagai aset tetap dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.83 Rincian Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa per SKPD

No	SKPD	Reklas ke	Nilai (Rp)	Nama Barang
1	Dinas Pendidikan	Beban Barjas BOS	153.000,00	Peralatan dapur pada SMPN 2 Padang Batung
2	Dinas Kesehatan	Beban Barjas BLUD	1.862.500,00	Sprei, bantal, guling RS Daha Sejahtera
3	RSUD H. Hasan Basry	Beban Barjas BLUD	24.441.090,00	Alat kesehatan umum lainnya
4	Dinas Sosial	Beban Persediaan	6.300.000,00	Rescue rope, ascender, tali karmenel statis, carbiner crew, figure, pulley single
5	Dinas Perhubungan	Beban Persediaan	173.360.600,00	Rambu marka getar dan zebra cross
6	Dinas Kominfo	Beban Persediaan	115.413.247,00	kartu memori, hdmi, flashdisk, connector, kabel LAN, kabel drop, dan tagihan internet
7	Bagian Umum	Beban Persediaan	16.800.000,00	Bed cover/bedding set untuk rumah jabatan KDH dan WKDH
Jumlah			338.330.437,00	

5. Reklasifikasi ke KIB lain dan ke aset lainnya (aset tidak berwujud) sebesar Rp2.155.963.038,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.84 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung Bangunan)	12.000.000,00	Relief pemandangan dinding pada SMPN 2 Kandungan
2	RSUD Hasan Basry	KIB D (JIJ)	2.050.321.000,00	Honor PPK, PBJ, dan pemeliharaan penambahan power supply panel induk
		Aset Lainnya (ATB)	5.842.038,00	Kaspersky small office, software antivirus, account premium zoom, hosting monster dan domain renewal
3	Dinas Perhubungan	KIB F (KDP)	25.300.000,00	Perencanaan pembangunan alat parkir otomatis
4	Dinas Kominfo	KIB D (JIJ)	32.500.000,00	Jaringan listrik video tron
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Aset Lainnya (ATB)	30.000.000,00	Pengembangan Aplikasi Kertas Kerja Pengelolaan BMD, Sistem Informasi Barang Persediaan dan Sistem Informasi Pemetaan Aset BMD
Jumlah			2.155.963.038,00	

6. Mutasi keluar ke SKPD lain sebesar Rp5.444.309.694,00 mempunyai nilai total yang sama dengan mutasi masuk dari SKPD lain dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.85 Rincian Mutasi Keluar Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	BPKPD	4.000.000,00	Kendaraan roda 2
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satpol PP	13.490.000,00	Kendaraan roda 2
		BPKPD	13.400.000,00	Kendaraan roda 2
3	Bagian Umum	Dinas Sosial	201.822.000,00	Kendaraan roda 4
		Dinas Perhubungan	420.405.000,00	Kendaraan roda 4
		Dinas Pertanian	201.822.000,00	Kendaraan roda 4
		Bappelitbangda	219.850.000,00	Kendaraan roda 4
4	BAPPELITBANGDA	BPKPD	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Dinas Sosial	17.834.400,00	Kendaraan roda 2
		Dinas Perhubungan	13.145.000,00	Kendaraan roda 2
		Dinas Naker Kop dan UKP	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
		Bagian Umum	417.952.500,00	Kendaraan roda 4
		Bappelitbangda	256.957.794,00	Kendaraan roda 4
		Kecamatan Padang Batung	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
		Kecamatan Loksado	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
6	Sekretariat DPRD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	249.425.000,00	Kendaraan roda 4
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.001.554.792,00	Kendaraan bermotor, alat angkutan, alat ukur, alat penyimpanan perlengkapan kantor, alat kantor lainnya, mebel, alat pembersih, alat pendingin, alat dapur, alat rumah tangga lainnya, alat pemadam kebakaran, peralatan studio, alat komunikasi, personal komputer, peralatan komputer, dan alat pelindung
Jumlah			5.444.309.694,00	

7. Reklas ke aset lainnya aset rusak berat sebesar Rp63.444.000,00 merupakan aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.86 Rincian Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat

No.	SKPD	Reklas Ke	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Lainnya Rusak Berat	42.744.000,00	Sepeda motor
2	Dinas Perdagangan	Aset Lainnya Rusak Berat	20.700.000,00	Sepeda motor
Jumlah			63.444.000,00	



5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah Perkantoran, Rumah Dinas, Bangunan Tempat Ibadah, Bangunan Menara, Taman, Monumen/Bangunan Bersejarah, Gudang, Gedung dan Museum.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.247.876.856.262,37 dan Rp1.184.329.541.409,32. Terjadi penambahan pada aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.547.314.853,05 atau 5,37% dari total gedung dan bangunan Tahun 2021. Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.87 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	278.555.372.042,09	265.539.471.542,59
2	Dinas Kesehatan	135.954.991.695,00	126.478.552.995,00
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	218.186.687.870,26	195.752.805.263,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	44.443.476.355,00	46.169.777.360,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	50.732.222.046,00	68.568.461.554,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.654.203.080,00	1.654.203.080,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	942.188.700,00	0,00
8	Dinas Sosial	10.413.370.167,71	10.078.282.916,16
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.864.324.500,00	1.851.337.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	579.044.000,00	554.044.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	385.000.000,00	385.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	5.909.355.924,00	5.686.192.124,00
13	Dinas Perhubungan	8.547.430.302,00	8.176.078.302,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.560.079.868,00	1.560.079.868,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	6.497.363.040,00	6.065.328.040,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.740.253.862,00	3.740.253.862,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	122.298.917.861,31	108.155.040.273,31
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.069.702.000,00	4.879.037.000,00
19	Dinas Perikanan	5.882.537.800,00	5.882.537.800,00
20	Dinas Pertanian	31.444.764.321,00	28.192.456.998,00
21	Dinas Perdagangan	167.359.494.281,00	163.779.929.058,00
22	Sekretariat Daerah	2.381.841.000,00	2.381.841.000,00
23	Bagian Pemerintahan	618.573.794,00	618.573.794,00
24	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	37.600.000,00	37.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
25	Bagian Umum	33.054.325.924,34	34.551.433.334,34
26	Inspektorat Daerah	2.061.387.047,74	1.878.441.964,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	15.903.819.411,00	16.190.929.411,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.939.103.837,00	1.758.294.237,00
29	Sekretariat DPRD	5.948.216.717,00	3.337.971.117,00
30	Kecamatan Sungai Raya	2.377.007.036,92	2.377.007.036,92
31	Kecamatan Padang Batung	5.474.584.702,00	5.474.584.702,00
32	Kecamatan Telaga Langsat	2.521.681.786,00	2.501.881.786,00
33	Kecamatan Angkinang	6.783.492.252,00	4.105.966.252,00
34	Kecamatan Kandangan	7.302.191.953,00	7.289.202.953,00
35	Kelurahan Kandangan Kota	981.641.984,00	981.641.984,00
36	Kelurahan Kandangan Barat	635.616.700,00	585.616.700,00
37	Kelurahan Kandangan Utara	1.632.503.959,00	1.392.253.959,00
38	Kelurahan Jambu Hilir	669.502.282,00	453.852.282,00
39	Kecamatan Simpur	5.545.069.045,00	5.144.804.045,00
40	Kecamatan Daha Selatan	23.750.911.378,00	23.750.911.378,00
41	Kecamatan Daha Utara	5.399.520.843,00	4.874.221.843,00
42	Kecamatan Kalumpang	4.619.979.474,00	4.619.979.474,00
43	Kecamatan Loksado	2.187.371.804,00	2.187.371.804,00
44	Kecamatan Daha Barat	3.810.546.297,00	3.544.675.297,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	219.587.320,00	1.141.616.020,00
Jumlah		1.247.876.856.262,37	1.184.329.541.409,32

Adapun mutasi aset Gedung Bangunan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.88 Mutasi Gedung Bangunan Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	1.184.329.541.409,32
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	114.892.824.101,55
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	(51.345.509.248,50)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	1.247.876.856.262,37

A. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp 114.892.824.101,55 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun 2022 sebesar Rp69.144.610.697,55 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.89 Daftar Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.982.462.214,00
2	Dinas Kesehatan	11.741.154.200,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	3.032.966.788,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.375.268.821,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	808.003.000,00
6	Dinas Sosial	320.928.851,55
7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	201.185.800,00
8	Dinas Perhubungan	240.698.000,00
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	743.551.950,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.992.500.000,00
11	Dinas Pertanian	99.675.000,00
12	Dinas Perdagangan	3.287.188.973,00
13	Bagian Umum	913.683.600,00
14	BPKPD	173.742.500,00
15	Sekretariat DPRD	2.228.465.000,00
16	Kelurahan Kandangan Utara	174.150.000,00
17	Kelurahan Jambu Hilir	199.250.000,00
18	Kecamatan Simpur	149.000.000,00
19	Kecamatan Daha Utara	127.636.000,00
20	Kecamatan Daha Barat	353.100.000,00
Jumlah		69.144.610.697,55

Rincian daftar pengadaan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2022 per jenis barang pada **Lampiran 6**.

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.624.027.750,00 yaitu reklas dari KIB lain guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan gedung bangunan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.90 Rincian Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	12.000.000,00	Relief pemandangan dinding SMPN 2 Kandangan
		KIB F (KDP)	447.340.300,00	Lihat pada table 5.3.91
2	Dinas Kesehatan	KIB F (KDP)	258.400.000,00	Lihat pada tabel 5.3.91
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB F (KDP)	364.960.000,00	Lihat pada tabel 5.3.91
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB F (KDP)	50.533.000,00	Konsultansi perencanaan <i>grand design</i> hutan kota Wana Sehati dan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
				perencanaan hutan kota menjadi hutan edukasi
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB F (KDP)	100.775.000,00	Honorarium PPBJ dan perencanaan gedung layanan perpustakaan
6	Dinas Pertanian	KIB F (KDP)	19.969.000,00	Bangunan gedung alsintan BPK Angkinang, dapur BPK Telaga Langsat, tempat parkir BPK Dahanu Selatan, KDP BPK Dahanu Utara, KDP BPK Padang Batung, KDP BPK Kandungan
7	Bagian Umum	KIB F (KDP)	99.470.250,00	Perencanaan rehab kantor Setda, ruang dapur pendopo Bupati, gedung PKK, pelebaran gudang peralatan rumah pintar, dan pemasangan paving blok
8	BKPSDM	KIB F (KDP)	180.809.600,00	Jasa tenaga pengadaan dan pemasangan paving blok halaman kantor gedung 2 BKPSDM
9	Sekretariat DPRD	KIB F (KDP)	89.770.600,00	Konsultan perencanaan rumah dinas Ketua DPRD
Jumlah			1.624.027.750,00	

Reklasifikasi dari aset tetap KDP yang menjadi aset tetap gedung dan bangunan berupa pekerjaan konsultan perencanaan yang telah selesai pengerjaannya baik yang membentuk bangunan baru atau mengkapitalisasi aset yang sudah ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.91 Daftar Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan dari KDP

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi SDN 2 Pandulangan	29.249.000,00	447.340.300,00
		Pembangunan perpustakaan dan rehab ruang guru/kepala sekolah/TU SD	53.471.000,00	
		Pembangunan SD Kecamatan Dahanu Utara dan Dahanu Selatan	32.934.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SD Kecamatan Sungai Raya dan SDN 1 Seranggan	44.550.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SD Kecamatan Kandungan dan Padang Batung	84.480.000,00	
		Perencanaan SD Kecamatan Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsat, Kalumpang, Simpung dan Sungai Raya	86.622.800,00	
		Pembangunan ruang perpustakaan SMPN 2 Kandungan	43.890.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah	33.698.500,00	
		Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SMP	38.445.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Renovasi Puskesmas Negara	79.500.000,00	258.400.000,00
		Renovasi Puskesmas Sungai Raya	79.700.000,00	
		Rehabilitasi Pustu	39.700.000,00	
		Rehabilitasi Poskesdes	59.500.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sungai Raya	49.775.000,00	364.960.000,00
		Honor PPK dan PPBJ pembangunan RTH Sungai Raya	900.000,00	
		Rehabilitasi rumah kepala Dinas PUTR	19.415.000,00	
		Honor PPK dan PPBJ rehab rumah kepala Dinas PUTR	800.000,00	
		Pembangunan lapangan semi indoor takraw	75.535.000,00	
		Pembangunan gedung futsal Kecamatan Loksado	51.085.000,00	
		Pembuatan pelayanan publik Dinas PUTR	20.800.000,00	
		Rehab gedung badminton tipe C dan stadion Dr.H.M.Syafi'i	98.450.000,00	
		Jasa konsultasi reviu desain pembangunan Lapangan Voli 2 Desember	48.200.000,00	

3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp8.801.575.608,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.92 Daftar Reklasifikasi dari Non Modal

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Pegawai	3.000.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ pembangunan perpustakaan SMPN 2 Kandungan
			6.300.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ pemeliharaan SMPN 6 Daha Selatan
			7.500.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ rehabilitasi sedang SMPN 3 Kandungan
			3.600.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ pembangunan perpustakaan SDN Amawang Kiri Muka
			30.000.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ pemeliharaan SDN Ambarai
			19.500.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ rehab SDN Bangkau



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
			2.700.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ rehab SDN Sungai Raya Tengah
			6.300.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan PPBJ sekolah SDN Baru
		Beban Pemeliharaan	27.000.000,00	Pemasangan plafon dan pengecatan ruang pameran museum rakyat
		Beban Jasa	19.891.200,00	Jasa perencanaan rehab rumah dinas SDN 3 Haratai
			89.688.000,00	Jasa perencanaan rehab kelas SDN Hakurung Dalam
2	Dinas Kesehatan	Beban Pemeliharaan	47.195.000,00	Pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan PKM Wasah
			97.500.000,00	Pemeliharaan bangunan Pustu Bayur Puskesmas Wasah
			70.000.000,00	Pemeliharaan bangunan Dinas Kesehatan
		Beban Pegawai	5.600.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan pejabat pengadaan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Raya
			10.800.000,00	Honor PPK, pembantu PPK, dan pejabat pengadaan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Pasungkan
			2.400.000,00	Honor pengadaan barang dan jasa pemeliharaan bangunan Pustu Bayur Puskesmas Wasah
			4.419.000,00	Honor PPK dan pejabat pengadaan renovasi ruang rawat inap Puskesmas Negara
		Beban Jasa	127.794.000,00	Jasa pengawasan renovasi ruang rawat inap Puskesmas Negara
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	Beban Barjas BLUD	583.627.081,79	Honor PPK, pejabat pengadaan, dan pemeliharaan gedung RS Hasan Basry
			65.494.229,47	Pemeliharaan rumah dinas dokter
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Beban Pemeliharaan	203.303.000,00	Honor PPK, PBJ, dan rehabilitasi Gedung Serbaguna Stadion 2 Desember
			199.599.000,00	Pemeliharaan gedung sekretariat MUI
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Beban Jasa	9.850.000,00	Jasa perencanaan pengelolaan persampahan
			68.050.000,00	Jasa pengawasan pembangunan tempat daur ulang, Stadion 2 Desember, tugu dodol, dan peningkatan fungsi hutan untuk taman
		Beban Pemeliharaan	191.680.000,00	Pemeliharaan RTH, taman depan pendopo Bupati, dan tugu dodol kandang
		Beban Pegawai	16.850.000,00	Honor PPK dan pejabat pengadaan pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH
6	Dinas Sosial	Beban Jasa	14.158.400,00	Perubahan daya listrik PLN Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Dinas Ketahanan Pangan	Beban Pemeliharaan	12.987.500,00	Rehab gedung kantor berupa perbaikan pintu depan
8	Dinas PPKBPPPA	Beban Pemeliharaan	21.978.000,00	Pemeliharaan gedung dan perbaikan lantai Balai Penyuluh KB Kecamatan Kandungan
9	Dinas Kependudukan dan Catpil	Beban Pemeliharaan	25.000.000,00	Rehab pemeliharaan gedung kantor dan upah tukang pemeliharaan gedung kantor
10	Dinas Perhubungan	Beban Jasa	32.439.000,00	Jasa perencanaan dan pengawasan rehab kantor, kanopi tempat parkir, pembangunan halte sungai, dan rehab WC
		Beban Pemeliharaan	98.215.000,00	rehab kantor, kanopi tempat parkir pembangunan halte sungai, dan rehab WC
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Beban Pegawai	23.900.000,00	Honor PPK dan PPBJ rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab Stadion 2 Desember
		Beban Jasa	87.200.000,00	Jasa konsultan pengawasan rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab Stadion 2 Desember
		Beban Pemeliharaan	1.898.401.800,00	Rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab Stadion 2 Desember
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Beban Pegawai	4.000.000,00	Honor PPBJ pengadaan gedung kantor
		Beban Jasa	99.440.000,00	Jasa pengawasan pengadaan gedung kantor
13	Dinas Pertanian	Beban Pegawai	2.700.000,00	Honor PPK dan PPBJ Rehab BPP
		Beban Jasa	168.263.000,00	Jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan laboratorium BPP Sungai Raya
		Beban Pemeliharaan	2.961.700.323,00	Pemeliharaan BPP Sungai Raya, Daha Barat, Kalumpang, Daha Utara, Kandungan, Angkinang, Telaga Langsung, Padang Batung, Daha Selatan, dan Loksado
14	Dinas Perdagangan	Beban Pemeliharaan	253.962.000,00	Pemeliharaan gedung bangunan pertokoan/pasar, dan pemeliharaan pasar terpadu dan pasar atrium
15	Bagian Umum	Beban Pegawai	3.900.000,00	Honor pengadaan barang dan jasa (PPK dan PPBJ) pekerjaan rehab gedung kantor
		Beban Jasa	53.073.540,00	Jasa perencanaan, dan pengawasan rehab gedung kantor
		Beban Pemeliharaan	115.347.950,00	Pekerjaan rehab gedung kantor
16	Sekretariat DPRD	Beban Pegawai	4.900.000,00	Honorarium PPKom pemeliharaan WC pos jaga dan kantin, honorarium PPKom dan konsultan pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
				pengadaan rumah jabatan ketua DPRD
17	Kecamatan Kandangan	Beban Pemeliharaan	12.989.000,00	Pemeliharaan gedung Kantor Camat Kandangan
18	Kelurahan Kandangan Barat	Beban Pemeliharaan	50.000.000,00	Pembuatan gedung penyimpanan, dan perbaikan kamar mandi/WC
19	Kelurahan Kandangan Utara	Beban Pegawai	2.700.000,00	Honorarium pengadaan rehab paving PKK Kelurahan Kandangan Utara
		Beban Persediaan	39.750.000,00	Rehab paving PKK Kelurahan Kandangan Utara
		Beban Jasa	23.650.000,00	Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan rehab paving PKK Kelurahan Kandangan Utara
20	Kelurahan Jambu Hilir	Beban Pegawai	1.600.000,00	Honor pengadaan dan PPK pemeliharaan gedung kantor
		Beban Jasa	14.800.000,00	Jasa perencanaan pemeliharaan gedung kantor
21	Kecamatan Telaga Langsat	Beban Pemeliharaan	19.800.000,00	Rehab atap dan plafond
22	Kecamatan Angkinang	Beban Jasa	29.950.000,00	Jasa penambahan daya listrik
		Beban Pemeliharaan	24.850.000,00	Pemeliharaan gedung kantor
23	Kecamatan Daha Utara	Beban Pemeliharaan	397.663.000,00	Honor pengadaan, pengawasan, rehab kantor dan taman Rahimin Kecamatan Daha Utara
24	Kecamatan Daha Barat	Beban Pegawai	1.400.000,00	Honorarium pengadaan pekerjaan urugan dan siring halaman kantor dan gedung sekretariat PKK
		Beban Jasa	44.020.000,00	Jasa perencanaan, pengawasan pekerjaan urugan dan siring halaman kantor dan gedung sekretariat PKK
25	Inspektorat Daerah	Beban Pegawai	2.850.000,00	Honorarium pengadaan pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
		Beban Jasa	23.770.396,00	Jasa perencanaan dan pengawasan pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
		Beban Pemeliharaan	156.324.687,74	Pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
Jumlah			8.801.575.608,00	

4. Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp35.322.610.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.93 Daftar Mutasi Masuk Antar SKPD

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
1	RSUD Hasan Basry	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	18.981.205.508,00	Flat/rumah susun
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	942.188.700,00	Bangunan gedung kantor
3	Dinas Nakerkop dan UKP	Dinas Pendidikan	629.583.000,00	Bangunan gedung kantor eks UPT Disdik Kecamatan Loksado



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
4	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.390.823.838,00	Lapangan <i>dance sport</i> , lapangan <i>petanque</i> , GOS kompleks Stadion 2 Desember, GOR Kecamatan Telaga Langsat, GOS Aluh Idut
5	Dinas Perdagangan	Dinas Nakerkop dan UKP	197.548.000,00	Bangunan gedung sekretariat kantor dan bengkel Dekranasda
6	Sekretariat DPRD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	287.110.000,00	Rumah Negara Golongan I Tipe A (Rumah Dinas Sekda)
7	Kecamatan Angkinang	Bagian Umum	2.622.726.000,00	Bangunan gedung olahraga
8	Kecamatan Simpur	Dinas Pendidikan	251.265.000,00	Bangunan gedung kantor eks UPT Disdik Kecamatan Simpur
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan	20.160.000,00	Bangunan gedung kantor
Jumlah			35.322.610.046,00	

B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp51.345.509.248,50 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp15.715.632.702,50 guna menyesuaikan aset dengan KIB yang seharusnya dan adanya pekerjaan aset gedung bangunan yang masih berupa perencanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.94 Rincian Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	740.373.214,50	Lihat pada table 5.3.95
2	Dinas Kesehatan	KIB F (KDP)	405.200.000,00	Lihat pada table 5.3.96
		KIB A (Tanah)	2.637.000.000,00	Pengurangan lahan RS Daha Sejahtera
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	KIB D (JIJ)	199.900.000,00	Honor PPK, PBJ, dan pemeliharaan jalan paving menuju IPAL
		KIB B (Peralatan dan Mesin)	29.511.000,00	Konsultan pengawasan penangkal petir
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB F (KDP)	11.478.607.988,00	Lihat pada tabel 5.3.96
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB C (Gedung Bangunan)	6.050.000,00	Pompa dan tandon air
6	Dinas Perdagangan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	59.317.000,00	Meja kerja, kursi kerja, laptop dan printer
		KIB F (KDP)	99.816.750,00	Perencanaan lokasi parkir khusus di los Amandit Lt.II Pasar Kandangan
7	Bagian Umum	KIB F (KDP)	59.856.750,00	Pembayaran konsultan perencanaan rehab kantor Setda
Jumlah			15.715.632.702,50	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pada Dinas Pendidikan reklasifikasi dari gedung bangunan ke KIB B (Peralatan dan Mesin) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.95 Tabel Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin
pada Dinas Pendidikan**

No.	Sekolah	Nilai (Rp)	Keterangan
1	SMPN 1 Daha Barat	80.620.000,00	Pengadaan meja, kursi, lemari, papan tulis, kotak sampah, wastafel, dan AC
2	SMPN 1 Angkinang	67.472.014,50	Pengadaan kursi, meja, kotak sampah, lemari dan papan tulis
3	SMPN 2 Angkinang	75.157.200,00	Pengadaan kursi, meja, kotak sampah, lemari dan papan tulis
4	SDN 2 Pihanin	54.527.000,00	Pengadaan kipas angin, proyektor, layar, rak buku, rak prakarya, tirai, karpet meja dan kursi
5	SDN Wawaran	204.881.000,00	Pengadaan lemari, kursi, meja, kipas angin, proyektor, layar, rak, papan pengumuman, pagar hias dan karpet
6	SDN 1 Hamalau	2.090.000,00	Pengadaan meja, rak buku dan kursi
7	SDN Muara Ulang	17.430.000,00	Pengadaan meja, kursi, rak buku, dan karpet
8	SDN Sungai Hanyar	1.580.000,00	Pengadaan meja dan kursi
9	TK Pembina Daha Selatan	55.096.000,00	Pengadaan meja, kursi dan loker
10	TK Pembina Telaga Langsat	113.320.000,00	Pengadaan meja, kursi dan loker
11	Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Kandangan	68.200.000,00	Pengadaan meja, kursi, meja jahit, papan tulis, meja <i>display</i> , dan lemari
Total		740.373.214,50	

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang menjadi aset tetap KDP dikarenakan pekerjaan yang masih berupa kegiatan perencanaan maupun yang belum selesai pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.96 Daftar Reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang Menjadi KDP

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Puskesmas Bamban	83.700.000,00	405.200.000,00
		Pemeliharaan Puskesmas Gambah, Loksado, Bayanan dan Angkinang	94.500.000,00	
		Pemeliharaan Puskesmas Pasungkan	93.500.000,00	
		Pembangunan mushola dan penataan halaman RS Daha Sejahtera	54.500.000,00	
		Jasa apraisal pembelian lahan RS Daha Sejahtera	79.000.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan halaman Polres HSS	2.514.277.500,00	11.478.607.988,00
		Jasa konsultasi perencanaan	89.810.000,00	
		Jasa konsultasi pengawasan	79.790.000,00	
		Honorarium PPK, pembantu PPK dan PPBJ	4.300.000,00	
		Nilai	2.688.177.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
		Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Kantor Bappelitbangda Kab HSS	99.899.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	100.699.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan Kawasan Religi Kapuh	98.698.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	99.498.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan Asrama Amuk Hantarukung Jogjakarta	29.429.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	30.229.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan perluasan Mall Pelayanan Publik Kab.HSS	99.800.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	100.600.000,00	
		Pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center	8.440.654.488,00	
		Honor PPK, Tim Teknis, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pembantu PPK dan PPBJ	18.750.000,00	
		Nilai	8.459.404.488,00	

2. Reklasifikasi ke non modal sebesar Rp174.617.500,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.97 Rincian Reklasifikasi ke Non Modal

No	SKPD	Reklas Ke	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Beban Persediaan	875.000,00	Biaya rapat kegiatan rehab dan pemeliharaan Puskesmas
2	BPKPD	Beban Pegawai	800.000,00	Honorarium pejabat pengadaan patok batas tanah
		Persediaan	172.942.500,00	Patok batas tanah
Jumlah			174.617.500,00	

3. Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp35.322.610.046,00 karena adanya aset gedung bangunan yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna. Mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.98 Daftar Mutasi Keluar Antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Dinas Nakerkop UKP	629.583.000,00	Bangunan gedung kantor eks UPT Disdik Kecamatan Loksado



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
		Kecamatan Simpur	251.265.000,00	Bangunan gedung kantor eks UPT Disdik Kecamatan Simpur
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.160.000,00	Bangunan gedung kantor
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	11.390.823.838,00	Lapangan <i>dance sport</i> , lapangan <i>petanque</i> , GOS kompleks Stadion 2 Desember, GOR Kecamatan Telaga Langsat, GOS Aluh Idut
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	RSUD Hasan Basry Kandungan	18.981.205.508,00	Flat/rumah susun
4	Dinas Nakerkop UKP	Dinas Perdagangan	197.548.000,00	Bangunan gedung sekretariat kantor dan bengkel Dekranasda
5	Bagian Umum	Kecamatan Angkinang	2.622.726.000,00	Bangunan gedung olahraga
6	BPKPD	Sekretariat DPRD	287.110.000,00	Rumah Negara Golongan I Tipe A (Rumah Dinas Sekda)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	942.188.700,00	Bangunan gedung kantor
Jumlah			35.322.610.046,00	

4. Penghapusan sebesar Rp132.649.000,00 yaitu penghapusan aset tetap gedung dan bangunan karena rusak berat pada Kecamatan Daha Barat berupa penghapusan bangunan tempat parkir Kantor Kecamatan Daha Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang bangunan oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.893.304.474.948,08 dan Rp1.816.821.269.231,45. Terjadi penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan untuk Tahun 2022 sebesar Rp76.483.205.716,63 atau 4,21% dari total aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2021 dengan rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.99 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	988.422.321,50	943.422.321,50



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	5.083.514.179,00	4.984.514.179,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	31.817.177.765,00	29.368.456.765,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.702.274.011.532,95	1.633.599.332.419,60
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	123.755.532.188,63	112.352.482.209,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.136.900,00	0,00
7	Dinas Sosial	100.772.880,00	100.772.880,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	3.592.288,00	3.592.288,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.621.000,00	30.621.000,00
10	Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA	46.842.200,00	46.842.200,00
11	Dinas Perhubungan	4.300.802.590,00	4.300.802.590,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	207.370.000,00	134.870.000,00
13	Dinas Naker Kop dan UKP	119.300.000,00	119.300.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	87.323.633,00	41.823.633,00
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.264.672.803,00	1.091.672.803,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.238.450,00	81.238.450,00
17	Dinas Perikanan	3.132.247.000,00	3.132.247.000,00
18	Dinas Pertanian	17.177.943.359,00	17.177.943.359,00
19	Dinas Perdagangan	735.078.000,00	735.078.000,00
20	Bagian Umum	1.054.500.900,00	1.054.500.900,00
21	Inspektorat Daerah	136.433.356,00	136.433.356,00
22	BAPPELITBANGDA	64.950.970,00	64.950.970,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	338.690.400,00	318.690.400,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	27.100.000,00	27.100.000,00
25	Sekretariat DPRD	90.940.450,00	90.940.450,00
26	Kecamatan Sungai Raya	18.500.000,00	18.500.000,00
27	Kecamatan Padang Batung	40.756.400,00	40.756.400,00
28	Kecamatan Telaga Langsat	8.464.143,00	8.464.143,00
29	Kecamatan Kandangan	63.894.065,00	63.894.065,00
30	Kelurahan Kandangan Barat	29.791.000,00	29.791.000,00
31	Kelurahan Kandangan Utara	6.946.250,00	3.013.650,00
32	Kelurahan Jambu Hilir	7.350.000,00	7.350.000,00
33	Kecamatan Simpuro	138.317.324,00	138.317.324,00
34	Kecamatan Daha Selatan	10.990.000,00	10.990.000,00
35	Kecamatan Kalumpang	2.000.000,00	2.000.000,00
36	Kecamatan Loksado	2.400.000,00	2.400.000,00
37	Kecamatan Daha Barat	27.850.600,00	27.850.600,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	6.530.313.876,35
Jumlah		1.893.304.474.948,08	1.816.821.269.231,45



Adapun mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.100 Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	1.816.821.269.231,45
Penambahan Aset Tetap JIJ Tahun 2022	106.946.021.859,98
Pengurangan Aset Tetap JIJ Tahun 2022	(30.462.816.143,35)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	1.893.304.474.948,08

A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp106.946.021.859,98 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2022 sebesar Rp88.389.484.279,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.101 Daftar Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	81.604.716.904,00
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	6.454.334.775,00
4	Dinas Kominfo	40.000.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45.500.000,00
6	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	173.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	20.000.000,00
8	Sekretariat DPRD	3.000.000,00
9	Kelurahan Kandangan Utara	3.932.600,00
Jumlah		88.389.484.279,00

Rincian mengenai daftar pengadaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis barang pada **Lampiran 7**.

2. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp2.423.761.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.102 Rincian Reklasifikasi dari Non Modal

No	SKPD	Reklas dari	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Beban Barjas BLUD	99.000.000,00	Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) RS Daha Sejahtera
2	RSUD Hasan Basry Kandangan	Beban Barjas BLUD	198.500.000,00	Pemeliharaan <i>Incenerator</i>
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Beban Pemeliharaan	106.562.000,00	Pemeliharaan jalan kabupaten
			1.900.000.000,00	Pemeliharaan jalan desa
			119.699.000,00	Pembangunan <i>drainase</i> depan Mesjid Al Hidayah Kapuh
Jumlah			2.423.761.000,00	



3. Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp2.883.747.500,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2022 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.103 Daftar Reklasifikasi ke KIB JIJ

No	Nama SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kominfo	KIB B (Peralatan dan Mesin)	32.500.000,00	Jaringan listrik video tron
2	RSUD Hasan Basry Kandangan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	2.050.321.000,00	Honor PPK, PBJ, dan pemeliharaan penambahan <i>power supply</i> panel induk
		KIB C (Gedung dan Bangunan)	199.900.000,00	Honor PPK, PBJ, dan pembuatan jalan paving menuju IPAL
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB F (KDP)	601.026.500,00	Lihat pada tabel 5.3.104
Jumlah			2.883.747.500,00	

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang telah selesai tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.104 Daftar Reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB D (JIJ)

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Sungai Raya - Kandangan - Simpur	99.339.000,00	601.026.500,00
		Rehabilitasi jaringan irigasi usulan DAK	98.000.000,00	
		Peningkatan jalan Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Angkinang	78.870.000,00	
		Peningkatan jalan Kecamatan Sungai Raya, Simpur, Padang Batung dan Loksado	98.780.000,00	
		Rehabilitas jalan Kecamatan Sungai Raya dan pemeliharaan berkala jalan Telaga Langsung dan Padang Batung	44.330.000,00	
		Pembangunan/rehabilitasi saluran <i>drainase</i> Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota	63.650.000,00	
		Pembuatan <i>drainase</i> /saluran Kelurahan Jambu Hilir, Kandangan Utara dan Kandangan Barat	25.068.000,00	
		Perbaikan saluran air/ <i>drainase</i> Jalan Merdeka Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan	49.957.500,00	
		Perkuatan tebing dengan pasangan bronjong sungai Telaga Pacat Desa Longawang	22.132.000,00	
		Perkuatan tebing Desa Baluti Kecamatan Kandangan	20.900.000,00	

4. Mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp11.393.621.256,35 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.105 Daftar Mutasi Masuk Antar SKPD

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.502.176.976,35	Jembatan pada Jalan Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.863.307.380,00	Jalan desa dan jalan kabupaten
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.136.900,00	Instalasi gardu listrik, jaringan transmisi, dan jaringan telepon
Jumlah			11.393.621.256,35	

5. Hibah yang diterima sebesar Rp1.855.407.824,63 terdapat pada Dispera KPLH berupa hibah jalan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.106 Rincian Hibah Jalan

No	Jenis	Luas (m2)	Alamat	Berita Acara	Nilai (Rp)
1	Jalan Kabupaten Lainnya	700	Jalan permukiman di Kecamatan Negara	No.22.A Tahun 2022 dan No.38 Tahun 2022	1.338.083.400,00
2	Jalan Kabupaten Lainnya	444	Ruas jalan Desa Telaga Langsat RT.01 Kecamatan Telaga Langsat	No.22.A Tahun 2022 dan No.38 Tahun 2022	261.476.917,47
3	Jalan Kabupaten Lainnya	395	Ruas gang Rantauan Desa Bakarung Kecamatan Angkinang	No.22.A Tahun 2022 dan No.38 Tahun 2022	255.847.507,16
Total		395			1.855.407.824,63

B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengurangan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 sebesar Rp30.462.816.143,35 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain dan aset tidak berwujud sebesar Rp19.010.034.887,00 guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.107 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.770.000.000,00	Lampu bandell SHT dan lampu sorot
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB F (KDP)	17.237.034.887,00	Lihat pada table 5.3.108
3	Sekretariat DPRD	Aset Lainnya (ATB)	3.000.000,00	Aplikasi verifikasi online
Jumlah			19.010.034.887,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi ke KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang belum selesai tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.108 Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Menjadi KDP

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK pemeliharaan berkala jalan tahun 2023	99.196.000,00	17.237.034.887,00
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.346.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK rekonstruksi jalan tahun 2023	99.000.900,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.150.900,00	
		Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK penggantian jembatan tahun 2023	99.483.750,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.633.750,00	
		Pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan kapasitas struktur Jalan Pagat-Batu-Muara Hariang Padang Batung	4.189.189.980,00	
		Jasa konsultasi pengawasan peningkatan struktur Jalan Pagat-Batu-Muara Hariang Padang Batung	99.567.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.200.000,00	
		Nilai	4.292.956.980,00	
		Pekerjaan pelebaran Jalan Bakarung - Rantauan Kandangan/Angkinang	3.951.530.315,00	
		Jasa konsultasi pengawasan pelebaran Jalan Bakarung - Rantauan Kandangan / Angkinang	98.198.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	3.750.000,00	
		Nilai	4.053.478.315,00	
		Pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau Simpung	4.843.439.195,00	
		Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan berkala / rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau Simpung	99.666.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.200.000,00	
		Nilai	4.947.305.195,00	
		Pekerjaan pemeliharaan berkala peningkatan kapasitas struktur Sungai Damang - Amawang Kiri Kandangan	3.321.674.547,00	
		Konsultasi pengawasan pemeliharaan berkala peningkatan	99.616.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
		struktur Sungai Damang Kecamatan Kandungan		
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.150.000,00	
		Nilai	3.425.440.547,00	
		Jasa konsultasi perencanaan pembangunan saluran <i>intake</i> D.I. Gumbil Kecamatan Telaga Langsat	14.829.600,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	1.700.000,00	
		Nilai	16.529.600,00	
		Jasa konsultasi perencanaan pelaksanaan Kegiatan Epaksi	99.744.600,00	
		Nilai	99.744.600,00	
		Jasa konsultasi perencanaan penggantian Jembatan Ni'ih Kecamatan Loksado	99.299.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.449.000,00	

- Reklasifikasi ke non modal sebesar Rp12.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang direklas ke beban jasa berupa honorarium petugas *e-monitoring* dan evaluasi DAK bidang irigasi.
- Mutasi Keluar antar SKPD sebesar Rp11.393.621.256,35 karena adanya aset jalan, irigasi dan jaringan yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna. Mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.109 Daftar Mutasi Keluar Antar SKPD

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	4.863.307.380,00	Jalan desa dan jalan kabupaten
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.502.176.976,35	Jembatan pada jalan Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.136.900,00	Instalasi gardu listrik, jaringan transmisi, dan jaringan telepon
Jumlah			11.393.621.256,35	

- Penghapusan sebesar Rp47.160.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa penghapusan trotoar (saluran drainase) yang berasal dari usulan masyarakat dengan kompensasi ganti rugi atas pembongkaran tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 dan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dan Barang Persediaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.110 Rincian Pembongkaran Trotoar (Saluran Drainase)

No.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Nilai (Rp)
1	Nomor 25 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend Sudirman Tibung Raya RT.05/2 Desa Tibung Raya	5 meter	4.500.000,00
2	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani No.63 RT.19 Kelurahan Kandungan Kota	6,5 meter	5.850.000,00
3	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Sudirman No.4 RT.4 Desa Tibung Raya	4 meter	3.600.000,00
4	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Kecamatan Kandungan	2 meter	1.800.000,00
5	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend Sudirman Desa Tibung Raya	5,5 meter	4.950.000,00
6	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Kecamatan Kandungan	10,2 meter	9.180.000,00
7	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani No.14 RT.01 RW.01 Desa Gambah Luar Muka	7,7 meter	6.930.000,00
8	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend. A. Yani Kandungan Utara RT.005 RW.004	4 meter	3.600.000,00
9	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Parincan Muka	7,5 meter	6.750.000,00
Nilai					47.160.000,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp40.049.628.805,83 dan Rp49.793.305.379,83. Aset tetap lainnya untuk Tahun 2022 turun sebesar Rp9.743.676.574,00 atau 19,57% dari total aset tetap lainnya Tahun 2021 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.111 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	29.361.201.503,83	39.715.486.977,83
2	Dinas Kesehatan	137.682.000,00	137.682.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	71.600.500,00	71.600.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.596.425.720,00	3.106.138.720,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	1.008.574.800,00	1.008.574.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.995.460,00	3.995.460,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.042.000,00	0,00
8	Dinas Sosial	41.522.500,00	41.522.500,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	90.750.000,00	90.750.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	11.875.000,00	11.875.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.779.475,00	2.779.475,00
13	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	114.608.000,00	114.608.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.947.849.647,00	1.827.527.747,00
15	Dinas Perikanan	900.000,00	900.000,00
16	Dinas Pertanian	725.276.000,00	725.276.000,00
17	Sekretariat Daerah	9.625.000,00	9.625.000,00
18	Bagian Hukum	45.834.800,00	45.834.800,00
19	Bagian Pemerintahan	72.050.000,00	72.050.000,00
20	Bagian Umum	234.519.000,00	234.519.000,00
21	Inspektorat Daerah	23.459.400,00	23.459.400,00
22	BAPPELITBANGDA	2.263.907.500,00	2.263.907.500,00
23	BPKPD	18.642.750,00	18.642.750,00
24	BKPSDM	30.250.000,00	30.250.000,00
25	Sekretariat DPRD	229.002.750,00	229.002.750,00
26	Kecamatan Padang Batung	250.000,00	250.000,00
27	Kecamatan Daha Selatan	105.000,00	105.000,00
28	Kecamatan Kalumpang	300.000,00	300.000,00
29	Kecamatan Loksado	600.000,00	600.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.042.000,00
Jumlah		40.049.628.805,83	49.793.305.379,83

Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.112 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	49.793.305.379,83
Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	1.068.047.200,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	(10.811.723.774,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	40.049.628.805,83

A. Penambahan Aset Tetap Lainnya

Penambahan aset tetap lainnya selama TA 2022 sebesar Rp1.068.047.200,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



1. Realisasi belanja modal pada LRA TA 2022 sebesar Rp544.168.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.113 Daftar Pengadaan Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243.586.700,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	119.771.900,00
3	BKPSDM	180.809.600,00
Jumlah		544.168.200,00

Rincian mengenai daftar pengadaan Aset Tetap Lainnya per jenis barang pada **Lampiran 8**.

2. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp520.837.000,00 berupa reklasifikasi dari beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.114 Daftar Reklasifikasi dari non modal

No	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Beban Pegawai	550.000,00	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa pembelian buku elektronik
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Beban Jasa	490.287.000,00	Jasa konsultan lingkungan atas pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan untuk normalisasi Sungai Amandit Lama Kab HSS
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beban Persediaan	30.000.000,00	Kostum penari maskot
Jumlah			520.837.000,00	

3. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp3.042.000,00 merupakan aset yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa buku umum, buku hukum, buku ilmu perpustakaan, buku *management* dan perkantoran

B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan aset tetap lainnya selama TA 2022 sebesar Rp10.811.723.774,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain dan aset lainnya sebesar Rp188.509.600,00 yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.115 Daftar Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya)

No	SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	7.700.000,00	Lemari kaca pada SDN Bambi Selatan
2	BKPSDM	KIB C (Gedung Bangunan)	180.809.600,00	Jasa tenaga pengadaan dan pemasangan paving blok halaman kantor gedung 2 BKPSDM
Jumlah			188.509.600,00	



2. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp3.042.000,00 merupakan aset yang berpindah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa buku umum, buku hukum, buku ilmu perpustakaan, buku *management* dan perkantoran
3. Penghapusan sebesar Rp10.620.172.174,00 yaitu penghapusan aset tetap buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp102.359.936.525,00 dan Rp74.349.264.800,00. Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk Tahun 2022 naik sebesar Rp28.010.671.725,00 atau 37,67% dari total KDP Tahun 2021 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.116 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	44.656.000,00	491.996.300,00
2	Dinas Kesehatan	683.697.000,00	434.397.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	1.771.265.950,00	1.148.465.950,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	97.803.700.325,00	70.054.043.950,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	176.896.500,00	227.429.500,00
6	Dinas Sosial	94.968.000,00	94.968.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	19.969.000,00
8	Dinas Perhubungan	333.187.500,00	307.887.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	73.222.000,00	73.222.000,00
10	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	273.812.000,00	262.012.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	100.775.000,00
12	Dinas Perikanan	30.779.000,00	30.779.000,00
13	Dinas Pertanian	211.459.000,00	211.459.000,00
14	Dinas Perdagangan	380.676.750,00	280.860.000,00
15	Bagian Pemerintahan	44.000.000,00	44.000.000,00
16	Bagian Umum	258.720.500,00	298.334.000,00
17	BPKPD	0,00	0,00
18	BKPSDM	49.900.000,00	49.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
19	Sekretariat DPRD	0,00	89.770.600,00
20	Kecamatan Sungai Raya	0,00	0,00
21	Kecamatan Telaga Langsat	79.200.000,00	79.200.000,00
22	Kecamatan Kandangan	5.000.000,00	5.000.000,00
23	Kelurahan Jambu Hilir	14.900.000,00	14.900.000,00
24	Kecamatan Daha Selatan	0,00	0,00
25	Kecamatan Kalumpang	3.950.000,00	3.950.000,00
26	Kecamatan Loksado	25.946.000,00	25.946.000,00
Jumlah		102.359.936.525,00	74.349.264.800,00

Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.117 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	74.349.264.800,00
Penambahan Aset Tetap KDP Tahun 2022	30.062.885.375,00
Pengurangan Aset Tetap KDP Tahun 2022	(2.052.213.650,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	102.359.936.525,00

A. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp30.062.885.375,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari KIB lain sebesar Rp29.305.816.375,00 berupa pekerjaan fisik yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum selesai pengerjaannya atau masih dalam tahap perencanaan sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.118 Rincian Reklasifikasi ke KDP

No	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	405.200.000,00	Lihat pada tabel 5.3.119
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB C (Gedung dan Bangunan)	11.478.607.988,00	Lihat pada tabel 5.3.119
		KIB D (JIJ)	17.237.034.887,00	Lihat pada tabel 5.3.120
3	Dinas Perhubungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	25.300.000,00	Perencanaan pembangunan alat parkir otomatis
4	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	99.816.750,00	Perencanaan lokasi parkir khusus di los Amandit Lt.II Pasar Kandangan
5	Bagian Umum	KIB C (Gedung dan Bangunan)	59.856.750,00	Pembayaran konsultan perencanaan rehab kantor Setda
Jumlah			29.305.816.375,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut disajikan rincian reklasifikasi ke KDP dari Gedung dan Bangunan dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada beberapa SKPD.

Tabel 5.3.119 Rincian Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KDP

Tabel 01.115 Rincian Reklasifikasi dari RIB 5 (Gedung dan Bangunan) ke RIB 6				
No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Puskesmas Bamban	83.700.000,00	405.200.000,00
		Pemeliharaan Puskesmas Gambah, Loksado, Bayanan dan Angkinang	94.500.000,00	
		Pemeliharaan Puskesmas Pasungkan	93.500.000,00	
		Pembangunan mushola dan penataan halaman RS Daha Sejahtera	54.500.000,00	
		Jasa apraisal pembelian lahan RS Daha Sejahtera	79.000.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan halaman Polres HSS	2.514.277.500,00	11.478.607.988,00
		Jasa konsultasi perencanaan	89.810.000,00	
		Jasa konsultasi pengawasan	79.790.000,00	
		Honorarium PPK, pembantu PPK dan PPBJ	4.300.000,00	
		Nilai	2.688.177.500,00	
		Jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Kantor Bappelitbangda	99.899.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	100.699.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan Kawasan Religi Kapuh	98.698.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	99.498.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan Asrama Amuk Hantarukung Jogjakarta	29.429.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	30.229.000,00	
		Jasa konsultasi perencanaan perluasan Mall Pelayanan Publik	99.800.000,00	
		Honorarium PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	100.600.000,00	
		Pembangunan mesjid di kawasan Islamic Center	8.440.654.488,00	
		Honor PPK, Tim Teknis, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pembantu PPK dan PPBJ	18.750.000,00	
		Nilai	8.459.404.488,00	

Tabel 5.3.120 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK pemeliharaan berkala jalan tahun 2023	99.196.000,00	17.237.034.887,00
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.346.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
		Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK rekonstruksi jalan tahun 2023	99.000.900,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.150.900,00	
		Jasa konsultasi perencanaan usulan DAK penggantian jembatan tahun 2023	99.483.750,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.633.750,00	
		Pemeliharaan / rehabilitasi / peningkatan kapasitas struktur Jalan Pagat-Batu-Muara Hariang Padang Batung	4.189.189.980,00	
		Jasa konsultasi pengawasan peningkatan struktur Jalan Pagat-Batu-Muara Hariang Padang Batung	99.567.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.200.000,00	
		Nilai	4.292.956.980,00	
		Pekerjaan pelebaran Jalan Bakarung - Rantauan Kandangan/Angkinang	3.951.530.315,00	
		Jasa konsultasi pengawasan pelebaran Jalan Bakarung - Rantauan Kandangan/Angkinang	98.198.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	3.750.000,00	
		Nilai	4.053.478.315,00	
		Pekerjaan pemeliharaan berkala/rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau Simpung	4.843.439.195,00	
		Jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan berkala/rehabilitasi Jalan Panjampang Bahagia - Hanau Simpung	99.666.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.200.000,00	
		Nilai	4.947.305.195,00	
		Pekerjaan pemeliharaan berkala peningkatan kapasitas struktur Sungai Damang - Amawang Kiri Kandangan	3.321.674.547,00	
		Konsultasi pengawasan pemeliharaan berkala peningkatan struktur Sungai Damang Kecamatan Kandangan	99.616.000,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	4.150.000,00	
		Nilai	3.425.440.547,00	
		Jasa konsultasi perencanaan pembangunan saluran intake D.I. Gumbil Kecamatan Telaga Langsat	14.829.600,00	
		Honorarium PPK, Pembantu PPK, PPBJ	1.700.000,00	
		Nilai	16.529.600,00	
		Jasa konsultasi perencanaan pelaksanaan Kegiatan Epaksi	99.744.600,00	
		Nilai	99.744.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
		Jasa konsultasi perencanaan penggantian Jembatan Ni'ih Kecamatan Loksado	99.299.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ	1.150.000,00	
		Nilai	100.449.000,00	

2. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp737.100.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.121 Rincian Reklasifikasi dari Non Modal

No.	SKPD	Reklas dari Barang dan Jasa	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Beban Pegawai	2.200.000,00	Honor perencanaan Puskesmas Pasungkan dan Puskesmas Bamban
		Beban Barjas BLUD	100.300.000,00	Honor perencanaan review masterplan, honor pejabat pengadaan jasa apraisal pembelian lahan
2	RSUD Hasan Basry Kandangan	Beban Barjas BLUD	622.800.000,00	Pembuatan jalan lingkar RSUD, perencanaan jaringan hidran, dan perencanaan bunker kemoteraphy
3	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	Beban Pemeliharaan	11.800.000,00	Perencanaan rehab kantor Disporapar
Nlai			737.100.000,00	

3. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp19.969.000,00 merupakan aset yang diterima oleh Dinas Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan berupa bangunan gedung alsintan BPK Angkinang, dapur BPK Telaga Langsung, tempat parkir BPK Daha Selatan, BPK Daha Utara, BPK Padang Batung, dan BPK Kandangan.

B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengurangan aset tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.052.213.650,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp2.032.244.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.122 Rincian Reklasifikasi Dari KDP

No	SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	447.340.300,00	Lihat pada tabel 5.3.123
2	Dinas Kesehatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	258.400.000,00	Lihat pada tabel 5.3.123
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB C (Gedung dan Bangunan)	364.960.000,00	Lihat pada tabel 5.3.123
		KIB D (JIJ)	601.026.500,00	Lihat pada tabel 5.3.124
4	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	KIB C (Gedung dan Bangunan)	50.533.000,00	Konsultasi perencanaan <i>grand design</i> hutan kota Wana Sehati dan perencanaan hutan kota menjadi hutan edukasi
5	Dinas Pertanian	KIB C (Gedung dan Bangunan)	19.969.000,00	Bangunan gedung alsintan BPK Angkinang, dapur BPK Telaga Langsung, tempat parkir BPK Daha



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Ke KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
				Selatan, BPK Daha Utara, BPK Padang Batung, BPK Kandungan
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	100.775.000,00	Perencanaan gedung layanan perpustakaan
7	Bagian Umum	KIB C (Gedung dan Bangunan)	99.470.250,00	Perencanaan rehab kantor setda, ruang dapur pendopo Bupati, gedung PKK, pelebaran gudang peralatan, rumah pintar, dan pemasangan paving blok
8	Sekretariat DPRD	KIB C (Gedung dan Bangunan)	89.770.600,00	konsultan perencanaan rumah dinas Ketua DPRD
Jumlah			2.032.244.650,00	

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) dan ke KIB D (JIJ) pada beberapa SKPD.

Tabel 5.3.123 Daftar KDP yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi SDN 2 Pandulangan	29.249.000,00	447.340.300,00
		Pembangunan perpustakaan dan rehab ruang guru/kepala sekolah/TU SD	53.471.000,00	
		Pembangunan SD Kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan	32.934.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SD Kecamatan Sungai Raya dan SDN 1 Seranggan	44.550.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SD Kecamatan Kandungan dan Padang Batung	84.480.000,00	
		Perencanaan SD Kecamatan Padang Batung, Angkinang, Telaga Langsung, Kalumpang, Simpung dan Sungai Raya	86.622.800,00	
		Pembangunan ruang perpustakaan SMPN 2 Kandungan	43.890.000,00	
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah	33.698.500,00	
		Rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas SMP	38.445.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Renovasi Puskesmas Negara	79.500.000,00	258.400.000,00
		Renovasi Puskesmas Sungai Raya	79.700.000,00	
		Rehabilitasi Pustu	39.700.000,00	
		Rehabilitasi Poskesdes	59.500.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sungai Raya	49.775.000,00	364.960.000,00
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00	
		Nilai	50.675.000,00	
		Rehabilitasi Rumah Kepala Dinas PU Kab. HSS	19.415.000,00	
		Honor PPK dan PPBJ	800.000,00	
		Nilai	20.215.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pembangunan lapangan semi <i>indoor</i> takraw	75.535.000,00	
		Pembangunan gedung futsal Kecamatan Loksado	51.085.000,00	
		Pembuatan pelayanan publik Dinas PUTR	20.800.000,00	
		Rehab gedung badminton tipe C dan stadion Dr. H.M. Syafi'i	98.450.000,00	
		Jasa konsultansi reviu desain pembangunan Lapangan Voli 2 Desember	48.200.000,00	

Tabel 5.3.124 Daftar KDP yang menjadi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Sungai Raya - Kandangan - Simpbur	99.339.000,00	601.026.500,00
		Rehabilitasi jaringan irigasi usulan DAK	98.000.000,00	
		Peningkatan jalan Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Angkinang	78.870.000,00	
		Peningkatan Jalan Kecamatan Sungai Raya, Simpbur, Padang Batung dan Loksado	98.780.000,00	
		Rehabilitas Jalan Kecamatan Sungai Raya dan pemeliharaan berkala Jalan Telaga Langsung dan Padang Batung	44.330.000,00	
		Pembangunan/rehabilitasi saluran <i>drainase</i> Jalan Al-Falah Kelurahan Kandangan Kota	63.650.000,00	
		Pembuatan <i>drainase</i> /saluran Kelurahan Jambu Hilir, Kandangan Utara dan Kandangan Barat	25.068.000,00	
		Perbaikan saluran <i>air/drainase</i> Jalan Merdeka Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan	49.957.500,00	
		Perkuatan tebing dengan pasangan bronjong Sungai Telaga Pacat Desa Longawang	22.132.000,00	
		Perkuatan tebing Desa Baluti Kecamatan Kandangan	20.900.000,00	

- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp19.969.000,00 merupakan aset yang berpindah dari Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian berupa bangunan gedung alsintan BPK Angkinang, dapur BPK Telaga Langsung, tempat parkir BPK Daha Selatan, BPK Daha Utara, BPK Padang Batung, dan BPK Kandangan.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perhitungan penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan masing-masing masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.350.973.694.925,08 dan Rp1.171.134.546.691,08. Saldo akumulasi penyusutan TA 2022 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 ditambah beban penyusutan selama tahun 2022 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan dan dikapitalisasi.

Tabel 5.3.125 Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(124.461.893.507,51)	(111.237.077.530,51)
2	Dinas Kesehatan	(80.818.545.931,00)	(70.253.726.454,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(204.573.168.830,00)	(180.234.019.444,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(634.220.121.898,57)	(544.165.347.132,57)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	(90.549.174.890,00)	(73.567.907.205,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.884.915.822,00)	(2.255.781.268,00)
7	BPBD	(3.243.694.773,00)	(216.313.698,00)
8	Dinas Sosial	(4.467.067.862,00)	(3.885.073.268,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(1.493.445.075,00)	(1.384.715.751,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.252.059.459,00)	(2.018.891.493,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(787.708.142,00)	(722.998.404,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA	(5.473.968.601,00)	(5.016.288.950,00)
13	Dinas Perhubungan	(17.823.967.381,00)	(15.936.924.201,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.795.013.662,00)	(5.947.061.894,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(4.703.316.598,00)	(4.227.361.613,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(2.162.004.103,00)	(1.490.178.691,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(17.234.749.493,00)	(13.945.779.629,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.695.627.027,00)	(2.144.936.044,00)
19	Dinas Perikanan	(5.773.880.103,00)	(5.217.320.005,00)
20	Dinas Pertanian	(23.501.708.818,00)	(21.668.331.207,00)
21	Dinas Perdagangan	(31.275.465.846,00)	(27.515.777.552,00)
22	Sekretariat Daerah	(1.701.156.964,00)	(1.529.565.215,00)
23	Bagian Hukum	(342.117.668,00)	(312.525.336,00)
24	Bagian Pemerintahan	(1.870.320.195,00)	(1.808.660.499,00)
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(1.320.109.986,00)	(1.158.426.137,00)
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(313.271.756,00)	(299.929.673,00)
27	Bagian Organisasi	(513.377.339,00)	(463.256.034,00)
28	Bagian Umum	(26.284.076.873,00)	(24.684.822.385,00)
29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(1.126.568.051,00)	(970.515.609,00)
30	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	(376.045.912,00)	(353.693.948,00)
31	Inspektorat Kabupaten	(2.413.804.444,00)	(2.248.296.174,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
32	BAPPELITBANGDA	(1.253.779.236,00)	(853.791.768,00)
33	BPKPD	(9.565.340.286,00)	(9.335.908.008,00)
34	BKPSDM	(3.060.136.164,00)	(2.595.648.286,00)
35	Sekretariat DPRD	(6.339.214.789,00)	(5.645.249.513,00)
36	Kecamatan Sungai Raya	(1.481.074.454,00)	(1.369.909.234,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(1.906.547.592,00)	(1.676.312.241,00)
38	Kecamatan Telaga Langsat	(1.485.544.207,00)	(1.315.096.200,00)
39	Kecamatan Angkinang	(2.027.153.057,00)	(1.489.137.103,00)
40	Kecamatan Kandangan	(2.576.248.480,00)	(2.276.834.936,00)
41	Kelurahan Kandangan Kota	(479.030.580,00)	(407.366.386,00)
42	Kelurahan Kandangan Barat	(429.629.329,00)	(341.923.419,00)
43	Kelurahan Kandangan Utara	(395.166.042,00)	(293.692.702,00)
44	Kelurahan Jambu Hilir	(495.549.299,00)	(387.816.039,00)
45	Kecamatan Simpur	(1.751.302.095,00)	(1.507.097.418,00)
46	Kecamatan Daha Selatan	(4.975.785.154,00)	(4.347.121.176,00)
47	Kecamatan Daha Utara	(2.464.297.901,00)	(2.194.750.511,00)
48	Kecamatan Kalumpang	(1.870.129.154,00)	(1.635.091.911,00)
49	Kecamatan Loksado	(1.495.730.527,00)	(1.326.414.941,00)
50	Kecamatan Daha Barat	(1.663.457.618,00)	(1.510.882.678,00)
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(806.231.951,00)	(3.742.999.777,00)
TOTAL		(1.350.973.694.925,08)	(1.171.134.546.691,08)

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap yang disusutkan:

Tabel 5.3.126 Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)				31 Desember 2022 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(58.123.448.469,51)	(66.152.993.726,00)	(181.382.480,00)	(4.068.832,00)	(124.461.893.507,51)
2	Dinas Kesehatan	(59.702.372.490,00)	(20.258.029.800,00)	(858.143.641,00)	0,00	(80.818.545.931,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(169.692.606.647,00)	(26.117.958.040,00)	(8.762.604.143,00)	0,00	(204.573.168.830,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(9.178.849.259,00)	(3.586.553.202,00)	(621.454.719.437,57)	0,00	(634.220.121.898,57)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(27.563.050.196,00)	(6.771.319.354,00)	(56.214.805.340,00)	0,00	(90.549.174.890,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.735.261.233,00)	(149.654.589,00)	0,00	0,00	(2.884.915.822,00)
7	BPBD	(3.107.304.283,00)	(132.103.226,00)	(4.287.264,00)	0,00	(3.243.694.773,00)
8	Dinas Sosial	(2.242.042.471,00)	(2.204.696.710,00)	(17.828.681,00)	(2.500.000,00)	(4.467.067.862,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(1.084.239.558,00)	(408.815.146,00)	(390.371,00)	0,00	(1.493.445.075,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.152.762.341,00)	(93.016.145,00)	(6.280.973,00)	0,00	(2.252.059.459,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(630.905.295,00)	(156.802.847,00)	0,00	0,00	(787.708.142,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)				31 Desember 2022 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	(4.565.312.240,00)	(899.203.050,00)	(9.453.311,00)	0,00	(5.473.968.601,00)
13	Dinas Perhubungan	(12.186.329.252,00)	(1.753.153.848,00)	(3.884.484.281,00)	0,00	(17.823.967.381,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.547.801.734,00)	(197.018.734,00)	(50.193.194,00)	0,00	(7.795.013.662,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(3.264.081.817,00)	(1.391.721.233,00)	(47.513.548,00)	0,00	(4.703.316.598,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(1.803.008.831,00)	(354.465.428,00)	(4.529.844,00)	0,00	(2.162.004.103,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(2.821.341.602,00)	(14.276.540.236,00)	(136.867.655,00)	0,00	(17.234.749.493,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.191.091.883,00)	(486.307.849,00)	(18.227.295,00)	0,00	(2.695.627.027,00)
19	Dinas Perikanan	(3.586.291.041,00)	(1.149.946.213,00)	(1.037.642.849,00)	0,00	(5.773.880.103,00)
20	Dinas Pertanian	(9.857.875.466,00)	(7.868.883.341,00)	(5.774.950.011,00)	0,00	(23.501.708.818,00)
21	Dinas Perdagangan	(2.565.177.247,00)	(28.314.267.042,00)	(396.021.557,00)	0,00	(31.275.465.846,00)
22	Sekretariat Daerah	(594.755.908,00)	(1.105.156.056,00)	0,00	(1.245.000,00)	(1.701.156.964,00)
23	Bagian Hukum	(342.117.668,00)	0,00	0,00	0,00	(342.117.668,00)
24	Bagian Pemerintahan	(1.774.339.875,00)	(95.980.320,00)	0,00	0,00	(1.870.320.195,00)
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(1.310.271.319,00)	(9.838.667,00)	0,00	0,00	(1.320.109.986,00)
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(313.271.756,00)	0,00	0,00	0,00	(313.271.756,00)
27	Bagian Organisasi	(513.377.339,00)	0,00	0,00	0,00	(513.377.339,00)
28	Bagian Umum	(19.269.304.246,00)	(6.671.698.810,00)	(343.073.817,00)	0,00	(26.284.076.873,00)
29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(1.126.568.051,00)	0,00	0,00	0,00	(1.126.568.051,00)
30	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	(376.045.912,00)	0,00	0,00	0,00	(376.045.912,00)
31	Inspektorat Daerah	(1.899.917.137,00)	(474.258.017,00)	(39.629.290,00)	0,00	(2.413.804.444,00)
32	BAPPELITBANGDA	(1.238.073.175,00)	0,00	(15.706.061,00)	0,00	(1.253.779.236,00)
33	BPKPD	(7.289.612.044,00)	(2.208.690.593,00)	(67.037.649,00)	0,00	(9.565.340.286,00)
34	BKPSDM	(2.677.794.764,00)	(380.421.817,00)	(1.919.583,00)	0,00	(3.060.136.164,00)
35	Sekretariat DPRD	(5.212.660.598,00)	(1.110.188.614,00)	(16.365.577,00)	0,00	(6.339.214.789,00)
36	Kecamatan Sungai Raya	(1.243.252.347,00)	(234.370.023,00)	(3.452.084,00)	0,00	(1.481.074.454,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(1.225.611.918,00)	(676.703.154,00)	(4.232.520,00)	0,00	(1.906.547.592,00)
38	Kecamatan Telaga Langsat	(959.961.038,00)	(524.831.616,00)	(751.553,00)	0,00	(1.485.544.207,00)
39	Kecamatan Angkinang	(1.052.261.947,00)	(974.891.110,00)	0,00	0,00	(2.027.153.057,00)
40	Kecamatan Kandangan	(1.630.842.848,00)	(937.002.909,00)	(8.402.723,00)	0,00	(2.576.248.480,00)
41	Kelurahan Kandangan Kota	(316.470.930,00)	(162.559.650,00)	0,00	0,00	(479.030.580,00)
42	Kelurahan Kandangan Barat	(376.921.702,00)	(50.770.636,00)	(1.936.991,00)	0,00	(429.629.329,00)
43	Kelurahan Kandangan Utara	(265.461.210,00)	(128.768.894,00)	(935.938,00)	0,00	(395.166.042,00)
44	Kelurahan Jambu Hilir	(473.094.458,00)	(21.888.278,00)	(566.563,00)	0,00	(495.549.299,00)
45	Kecamatan Simpur	(1.146.486.551,00)	(597.611.519,00)	(7.204.025,00)	0,00	(1.751.302.095,00)
46	Kecamatan Daha Selatan	(1.332.966.385,00)	(3.640.263.769,00)	(2.555.000,00)	0,00	(4.975.785.154,00)
47	Kecamatan Daha Utara	(1.404.443.623,00)	(1.059.854.278,00)	0,00	0,00	(2.464.297.901,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)				31 Desember 2022 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	
48	Kecamatan Kalumpang	(1.254.036.996,00)	(615.458.825,00)	(633.333,00)	0,00	(1.870.129.154,00)
49	Kecamatan Loksado	(1.079.546.870,00)	(414.438.203,00)	(1.745.454,00)	0,00	(1.495.730.527,00)
50	Kecamatan Daha Barat	(1.131.985.964,00)	(525.720.591,00)	(5.751.063,00)	0,00	(1.663.457.618,00)
51	Badan Kesbangpol	(792.136.479,00)	(14.095.472,00)	0,00	0,00	(806.231.951,00)
TOTAL		(446.224.744.413,51)	(205.358.911.580,00)	(699.382.225.099,57)	(7.813.832,00)	(1.350.973.694.925,08)

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi akumulasi masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp446.224.744.413,51 dan Rp396.455.549.626,51 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.127 Rincian Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(51.188.514.286,51)	(6.934.934.183,00)	0,00	(58.123.448.469,51)
2	Dinas Kesehatan	(52.743.126.069,00)	(7.190.099.954,00)	(230.853.533,00)	(59.702.372.490,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(151.556.481.026,00)	(18.860.605.621,00)	(724.480.000,00)	(169.692.606.647,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan TR	(8.316.628.476,00)	(877.220.783,00)	(15.000.000,00)	(9.178.849.259,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	(23.425.526.694,00)	(4.523.558.502,00)	(386.035.000,00)	(27.563.050.196,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.137.669.135,00)	(597.592.098,00)	0,00	(2.735.261.233,00)
7	BPBD	(216.313.698,00)	(2.890.990.585,00)	0,00	(3.107.304.283,00)
8	Dinas Sosial	(1.880.137.520,00)	(361.904.951,00)	0,00	(2.242.042.471,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(1.015.644.825,00)	(68.594.733,00)	0,00	(1.084.239.558,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.931.706.743,00)	(232.755.598,00)	(11.700.000,00)	(2.152.762.341,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(578.932.143,00)	(96.863.152,00)	(44.890.000,00)	(630.905.295,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA	(4.235.243.455,00)	(330.068.785,00)	0,00	(4.565.312.240,00)
13	Dinas Perhubungan	(10.825.268.343,00)	(1.361.060.909,00)	0,00	(12.186.329.252,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.733.732.805,00)	(1.853.875.179,00)	(39.806.250,00)	(7.547.801.734,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(2.984.982.416,00)	(279.099.401,00)	0,00	(3.264.081.817,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(1.224.640.079,00)	(578.368.752,00)	0,00	(1.803.008.831,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(2.468.998.290,00)	(352.343.312,00)	0,00	(2.821.341.602,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.757.268.866,00)	(476.567.017,00)	(42.744.000,00)	(2.191.091.883,00)
19	Dinas Perikanan	(3.235.637.036,00)	(350.654.005,00)	0,00	(3.586.291.041,00)
20	Dinas Pertanian	(9.069.474.488,00)	(788.400.978,00)	0,00	(9.857.875.466,00)
21	Dinas Perdagangan	(2.194.105.736,00)	(398.771.511,00)	(27.700.000,00)	(2.565.177.247,00)
22	Sekretariat Daerah	(499.236.704,00)	(95.519.204,00)	0,00	(594.755.908,00)
23	Bagian Hukum	(312.525.336,00)	(29.592.332,00)	0,00	(342.117.668,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
24	Bagian Pemerintahan	(1.724.035.791,00)	(50.304.084,00)	0,00	(1.774.339.875,00)
25	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(1.149.339.470,00)	(160.931.849,00)	0,00	(1.310.271.319,00)
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(299.929.673,00)	(13.342.083,00)	0,00	(313.271.756,00)
27	Bagian Organisasi	(463.256.034,00)	(50.121.305,00)	0,00	(513.377.339,00)
28	Bagian Umum	(18.189.254.720,00)	(2.123.948.526,00)	(1.043.899.000,00)	(19.269.304.246,00)
29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(970.515.609,00)	(156.052.442,00)	0,00	(1.126.568.051,00)
30	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	(353.693.948,00)	(22.351.964,00)	0,00	(376.045.912,00)
31	Inspektorat Daerah	(1.786.192.487,00)	(113.724.650,00)	0,00	(1.899.917.137,00)
32	BAPPELITBANGDA	(839.770.224,00)	(572.628.555,00)	(174.325.604,00)	(1.238.073.175,00)
33	BPKPD	(7.336.481.491,00)	(857.932.168,00)	(904.801.615,00)	(7.289.612.044,00)
34	BKPSDM	(2.257.484.915,00)	(420.309.849,00)	0,00	(2.677.794.764,00)
35	Sekretariat DPRD	(4.692.438.179,00)	(769.647.419,00)	(249.425.000,00)	(5.212.660.598,00)
36	Kecamatan Sungai Raya	(1.182.099.705,00)	(61.152.642,00)	0,00	(1.243.252.347,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(1.118.511.449,00)	(107.100.469,00)	0,00	(1.225.611.918,00)
38	Kecamatan Telaga Langsat	(842.280.891,00)	(117.680.147,00)	0,00	(959.961.038,00)
39	Kecamatan Angkinang	(973.261.037,00)	(79.000.910,00)	0,00	(1.052.261.947,00)
40	Kecamatan Kandangan	(1.478.944.858,00)	(151.897.990,00)	0,00	(1.630.842.848,00)
41	Kelurahan Kandangan Kota	(264.439.576,00)	(52.031.354,00)	0,00	(316.470.930,00)
42	Kelurahan Kandangan Barat	(301.708.751,00)	(75.212.951,00)	0,00	(376.921.702,00)
43	Kelurahan Kandangan Utara	(192.433.120,00)	(73.028.090,00)	0,00	(265.461.210,00)
44	Kelurahan Jambu Hilir	(375.963.703,00)	(97.130.755,00)	0,00	(473.094.458,00)
45	Kecamatan Simpur	(1.055.823.547,00)	(90.663.004,00)	0,00	(1.146.486.551,00)
46	Kecamatan Daha Selatan	(1.217.443.473,00)	(115.522.912,00)	0,00	(1.332.966.385,00)
47	Kecamatan Daha Utara	(1.267.374.602,00)	(137.069.021,00)	0,00	(1.404.443.623,00)
48	Kecamatan Kalumpang	(1.110.466.135,00)	(143.570.861,00)	0,00	(1.254.036.996,00)
49	Kecamatan Loksado	(957.672.053,00)	(121.874.817,00)	0,00	(1.079.546.870,00)
50	Kecamatan Daha Barat	(1.037.796.809,00)	(100.689.155,00)	(6.500.000,00)	(1.131.985.964,00)
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.485.143.207,00)	(69.334.832,00)	(2.762.341.560,00)	(792.136.479,00)
TOTAL		(396.455.549.626,51)	(56.433.696.349,00)	(6.664.501.562,00)	(446.224.744.413,51)

Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2022 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.433.696.349,00 terdiri dari:
 - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan sebesar Rp5.121.285.779,00.
 - Penambahan karena adanya beban penyusutan yang terjadi selama TA 2022 sebesar Rp51.312.410.570,00 (penjelasan lebih lanjut mengenai beban penyusutan ada pada Bab Laporan Operasional).



2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.664.501.562,00 terdiri dari:
- Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan sebesar Rp5.121.285.779,00.
 - Pengurangan karena aset yang dihapuskan sebesar Rp1.439.965.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.128 Rincian Penyusutan karena Penghapusan

No	SKPD	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	300.020.200,00	230.853.533,00
2	RSUD Hasan Basry	724.480.000,00	724.480.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	386.035.000,00	386.035.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan TR	11.000.000,00	11.000.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Catpil	11.700.000,00	11.700.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.000.000,00	18.000.000,00
7	Dinas Perdagangan	7.000.000,00	7.000.000,00
8	Kecamatan Daha Barat	6.500.000,00	6.500.000,00
9	BPKPD	44.397.000,00	44.397.000,00
Jumlah		1.509.132.200,00	1.439.965.533,00

- Pengurangan karena aset yang direklasifikasi ke aset rusak berat sebesar Rp63.444.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.129 Rincian Penyusutan karena Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Reklas ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset rusak berat	42.744.000,00	Sepeda motor
2	Dinas Perdagangan	Aset rusak berat	20.700.000,00	Sepeda motor
Total			63.444.000,00	

- Pengurangan karena aset yang dihibahkan terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai aset sebesar Rp191.070.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp39.806.250,00 berupa peralatan pemancar UHF lainnya yang dihibahkan kepada Majelis Ta'lim Al-Hidayah Lingkungan Mesjid Desa Kapuh.

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp205.358.911.580,00 dan Rp178.457.429.677,00 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.130 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(59.902.864.558,00)	(6.398.430.961,00)	(148.301.793,00)	(66.152.993.726,00)
2	Dinas Kesehatan	(16.816.974.293,00)	(3.441.055.507,00)	0,00	(20.258.029.800,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(21.707.706.479,00)	(4.410.251.561,00)	0,00	(26.117.958.040,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(2.803.790.733,00)	(1.204.982.864,00)	(422.220.395,00)	(3.586.553.202,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(5.866.003.593,00)	(968.586.446,00)	(63.270.685,00)	(6.771.319.354,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(118.112.133,00)	(31.542.456,00)	0,00	(149.654.589,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(132.103.226,00)	0,00	(132.103.226,00)
8	Dinas Sosial	(1.987.239.446,00)	(217.457.264,00)	0,00	(2.204.696.710,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(368.770.971,00)	(40.044.175,00)	0,00	(408.815.146,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(81.669.302,00)	(11.346.843,00)	0,00	(93.016.145,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(144.066.261,00)	(12.736.586,00)	0,00	(156.802.847,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	(772.956.726,00)	(126.246.324,00)	0,00	(899.203.050,00)
13	Dinas Perhubungan	(1.568.851.519,00)	(184.302.329,00)	0,00	(1.753.153.848,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(166.776.756,00)	(30.241.978,00)	0,00	(197.018.734,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(1.197.740.250,00)	(240.355.220,00)	(46.374.237,00)	(1.391.721.233,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(262.177.574,00)	(92.287.854,00)	0,00	(354.465.428,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(11.396.469.988,00)	(2.880.070.248,00)	0,00	(14.276.540.236,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(371.568.869,00)	(114.738.980,00)	0,00	(486.307.849,00)
19	Dinas Perikanan	(1.031.205.900,00)	(118.740.313,00)	0,00	(1.149.946.213,00)
20	Dinas Pertanian	(7.205.543.824,00)	(663.339.517,00)	0,00	(7.868.883.341,00)
21	Dinas Perdagangan	(24.952.733.859,00)	(3.361.533.183,00)	0,00	(28.314.267.042,00)
22	Sekretariat Daerah	(1.029.083.511,00)	(76.072.545,00)	0,00	(1.105.156.056,00)
23	Bagian Pemerintahan	(84.624.708,00)	(11.355.612,00)	0,00	(95.980.320,00)
24	Bagian Protokol dan Kehumasan	(9.086.667,00)	(752.000,00)	0,00	(9.838.667,00)
25	Bagian Umum	(6.178.943.533,00)	(781.255.137,00)	(288.499.860,00)	(6.671.698.810,00)
26	Inspektorat Daerah	(426.551.647,00)	(47.706.370,00)	0,00	(474.258.017,00)
27	BPKPD	(1.941.446.813,00)	(319.402.097,00)	(52.158.317,00)	(2.208.690.593,00)
28	BKPSDM	(337.598.788,00)	(42.823.029,00)	0,00	(380.421.817,00)
29	Sekretariat DPRD	(938.871.039,00)	(171.317.575,00)	0,00	(1.110.188.614,00)
30	Kecamatan Sungai Raya	(184.844.945,00)	(49.525.078,00)	0,00	(234.370.023,00)
31	Kecamatan Padang Batung	(554.587.182,00)	(122.115.972,00)	0,00	(676.703.154,00)
32	Kecamatan Telaga Langsat	(472.295.003,00)	(52.536.613,00)	0,00	(524.831.616,00)
33	Kecamatan Angkinang	(515.876.066,00)	(459.015.044,00)	0,00	(974.891.110,00)
34	Kecamatan Kandangan	(791.084.707,00)	(145.918.202,00)	0,00	(937.002.909,00)
35	Kelurahan Kandangan Kota	(142.926.810,00)	(19.632.840,00)	0,00	(162.559.650,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
36	Kelurahan Kandangan Barat	(39.032.187,00)	(11.738.449,00)	0,00	(50.770.636,00)
37	Kelurahan Kandangan Utara	(100.527.920,00)	(28.240.974,00)	0,00	(128.768.894,00)
38	Kelurahan Jambu Hilir	(11.469.523,00)	(10.418.755,00)	0,00	(21.888.278,00)
39	Kecamatan Simpur	(447.527.778,00)	(150.083.741,00)	0,00	(597.611.519,00)
40	Kecamatan Daha Selatan	(3.127.382.503,00)	(512.881.266,00)	0,00	(3.640.263.769,00)
41	Kecamatan Daha Utara	(927.375.909,00)	(132.478.369,00)	0,00	(1.059.854.278,00)
42	Kecamatan Kalumpang	(524.032.443,00)	(91.426.382,00)	0,00	(615.458.825,00)
43	Kecamatan Loksado	(367.106.525,00)	(47.331.678,00)	0,00	(414.438.203,00)
44	Kecamatan Daha Barat	(468.483.674,00)	(73.199.715,00)	(15.962.798,00)	(525.720.591,00)
45	Badan Kesbangpol	(113.446.762,00)	(13.763.093,00)	(113.114.383,00)	(14.095.472,00)
	Jumlah	(178.457.429.677,00)	(28.051.384.371,00)	(1.149.902.468,00)	(205.358.911.580,00)

Mutasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan selama TA 2022 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.051.384.371,00 terdiri dari:
 - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1.133.939.670,00.
 - Penambahan berupa beban penyusutan selama TA 2022 sebesar Rp26.917.444.701,00 (secara rinci dijelaskan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi Bab Laporan Operasional).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.149.902.468,00 terdiri dari:
 - Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1.133.939.670,00.
 - Pengurangan karena penghapusan bangunan rusak berat sebesar Rp15.962.798,00, yaitu bangunan tempat parkir Kantor Camat Daha Barat.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp699.382.225.099,57 dan Rp596.216.152.555,57 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5.3.131 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(144.028.854,00)	(37.353.626,00)	0,00	(181.382.480,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
2	Dinas Kesehatan	(693.626.092,00)	(164.517.549,00)	0,00	(858.143.641,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(6.969.831.939,00)	(1.792.772.204,00)	0,00	(8.762.604.143,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(533.044.927.923,57)	(118.262.771.040,00)	(29.852.979.526,00)	(621.454.719.437,57)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(44.276.376.918,00)	(11.938.428.422,00)	0,00	(56.214.805.340,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(4.287.264,00)	0,00	(4.287.264,00)
7	Dinas Sosial	(15.196.302,00)	(2.632.379,00)	0,00	(17.828.681,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	(299.955,00)	(90.416,00)	0,00	(390.371,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.515.448,00)	(765.525,00)	0,00	(6.280.973,00)
10	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	(8.088.769,00)	(1.364.542,00)	0,00	(9.453.311,00)
11	Dinas Perhubungan	(3.542.804.339,00)	(341.679.942,00)	0,00	(3.884.484.281,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(46.552.333,00)	(3.640.861,00)	0,00	(50.193.194,00)
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(44.638.947,00)	(2.874.601,00)	0,00	(47.513.548,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.361.038,00)	(1.168.806,00)	0,00	(4.529.844,00)
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(80.311.351,00)	(56.556.304,00)	0,00	(136.867.655,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(16.098.309,00)	(2.128.986,00)	0,00	(18.227.295,00)
17	Dinas Perikanan	(950.477.069,00)	(87.165.780,00)	0,00	(1.037.642.849,00)
18	Dinas Pertanian	(5.393.312.895,00)	(381.637.116,00)	0,00	(5.774.950.011,00)
19	Dinas Perdagangan	(368.937.957,00)	(27.083.600,00)	0,00	(396.021.557,00)
20	Bagian Umum	(316.624.132,00)	(26.449.685,00)	0,00	(343.073.817,00)
21	Inspektorat Daerah	(35.552.040,00)	(4.077.250,00)	0,00	(39.629.290,00)
22	BAPPELITBANGDA	(14.021.544,00)	(1.684.517,00)	0,00	(15.706.061,00)
23	BPKPD	(57.979.704,00)	(9.057.945,00)	0,00	(67.037.649,00)
24	BKPSDM	(564.583,00)	(1.355.000,00)	0,00	(1.919.583,00)
25	Sekretariat DPRD	(13.940.295,00)	(2.425.282,00)	0,00	(16.365.577,00)
26	Kecamatan Sungai Raya	(2.964.584,00)	(487.500,00)	0,00	(3.452.084,00)
27	Kecamatan Padang Batung	(3.213.610,00)	(1.018.910,00)	0,00	(4.232.520,00)
28	Kecamatan Telaga Langsat	(520.306,00)	(231.247,00)	0,00	(751.553,00)
29	Kecamatan Kandangan	(6.805.371,00)	(1.597.352,00)	0,00	(8.402.723,00)
30	Kelurahan Kandangan Barat	(1.182.481,00)	(754.510,00)	0,00	(1.936.991,00)
31	Kelurahan Kandangan Utara	(731.662,00)	(204.276,00)	0,00	(935.938,00)
32	Kelurahan Jambu Hilir	(382.813,00)	(183.750,00)	0,00	(566.563,00)
33	Kecamatan Simpuri	(3.746.093,00)	(3.457.932,00)	0,00	(7.204.025,00)
34	Kecamatan Daha Selatan	(2.295.200,00)	(259.800,00)	0,00	(2.555.000,00)
35	Kecamatan Kalumpang	(593.333,00)	(40.000,00)	0,00	(633.333,00)
36	Kecamatan Loksado	(1.636.363,00)	(109.091,00)	0,00	(1.745.454,00)
37	Kecamatan Daha Barat	(4.602.195,00)	(1.148.868,00)	0,00	(5.751.063,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(144.409.808,00)	0,00	(144.409.808,00)	0,00
TOTAL		(596.216.152.555,57)	(133.163.461.878,00)	(29.997.389.334,00)	(699.382.225.099,57)

Mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2022 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp133.163.461.878,00 terdiri dari:
 - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.487.825.857,00.
 - Penambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp128.675.636.021,00 (lebih lanjut dijelaskan pada Bab Laporan Operasional bagian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada laporan ini).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.997.389.334,00 karena adanya kapitalisasi ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.487.825.857,00.
 - Pengurangan karena adanya kapitalisasi ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp25.509.563.477,00.

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.813.832,00 dan Rp5.414.832,00. Penyusutan aset tetap lainnya dilakukan terhadap aset tetap lainnya selain buku, tanaman, dan hewan ternak. Oleh karena itu dilakukan koreksi terhadap saldo aset tetap lainnya pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.132 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.669.832,00)	(2.399.000,00)	0,00	(4.068.832,00)
2	Dinas Sosial	(2.500.000,00)	0,00	0,00	(2.500.000,00)
3	Sekretariat Daerah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
TOTAL		(5.414.832,00)	(2.399.000,00)	0,00	(7.813.832,00)

Mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya selama TA 2022 berasal dari penambahan karena adanya beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp2.399.000,00.



5.3.1.4 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp0,00. Dana cadangan disimpan di Bank Pemegang Kas Daerah yaitu Bank Kalsel dalam bentuk deposito berjangka dengan nomor bilyet deposito 0036948.

Dasar hukum pembentukan dana cadangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 perlu biaya yang besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat memmpengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dana cadangan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00, disisihkan dalam 3 (tiga) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Alokasi penyediaan dana tersebut terbagi atas:

- Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00; dan
- Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Pencairan dana cadangan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan cara menarik deposito ke Kas Daerah yang dapat dilaksanakan secara bertahap dan/atau sekaligus sesuai keperluan.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.168.047.496,00 dan Rp10.264.422.391,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 naik sebesar Rp170.903.625.105,00 atau 1.665,01% dari total Aset Lainnya Tahun 2021. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan oleh adanya dana transfer non tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah pusat yang ditempatkan pada Bank Indonesia. Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain, dan Dana Transfer TDF dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.133 Ringkasan Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	8.895.030.831,11	7.958.172.770,11



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lain-Lain	19.361.362.798,00	19.297.918.798,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.856.903.964,11)	(3.653.676.285,11)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(13.401.436.892,00)	(13.337.992.892,00)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	171.169.994.723,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	181.168.047.496,00	10.264.422.391,00

5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.895.030.831,11 dan Rp7.958.172.770,11 merupakan aset dalam bentuk *software* dan dokumen kajian hasil penelitian maupun pendataan. Saldo untuk Aset Tidak Berwujud bertambah sebesar Rp936.858.061,00 atau 11,77% dari saldo per 31 Desember 2021 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.134 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.086.956.680,11	1.086.956.680,11
2	Dinas Kesehatan	285.006.000,00	285.006.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	104.385.990,00	102.104.350,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.352.547.440,00	3.352.547.440,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	1.368.005.672,00	511.264.000,00
6	Dinas Sosial	9.850.000,00	9.850.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.500.000,00	10.500.000,00
8	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.508.000,00	212.508.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	14.630.000,00	14.630.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	190.759.000,00	190.759.000,00
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	111.825.000,00	111.825.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	349.067.000,00	349.067.000,00
14	Dinas Perikanan	100.000.000,00	100.000.000,00
15	Dinas Perdagangan	28.950.000,00	28.950.000,00
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	33.720.000,00	33.720.000,00
17	Bagian Organisasi	39.213.000,00	39.213.000,00
18	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	57.400.000,00	57.400.000,00
19	BAPPELITBANGDA	557.594.749,00	512.760.000,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	784.602.300,00	754.602.300,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	184.510.000,00	184.510.000,00
22	Sekretariat DPRD	3.000.000,00	0,00
Jumlah		8.895.030.831,11	7.958.172.770,11



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut disajikan rincian jenis aset tidak berwujud pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.3.135 Daftar Rincian Jenis Aset Tidak Berwujud

NO	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software	989.140.680,11	1.086.956.680,11
		Microsoft Windows Server/Microsoft Office Standard	97.816.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Masterplan Rumah Sakit Dahanu Sejahtera	273.106.000,00	285.006.000,00
		Software	11.900.000,00	
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	Software/Aplikasi	35.298.500,00	104.385.990,00
		Lisensi windows	16.794.400,00	
		Aplikasi Mobile Android ROKET	50.511.450,00	
		Kaspersky Small Office Security 8.0	1.781.640,00	
		Masterplan RDTRK	585.946.900,00	
		Dokumen UPL UKL Pembangunan Drainase	618.248.000,00	
		Dokumen UPL UKL Perkuatan tebing	247.176.300,00	
		Dokumen UKL-UPL Jembatan	93.260.000,00	
		Dokumen survey JIJ	759.220.740,00	
		Dokumen RISPAM	97.865.000,00	
		Desain e-PAKSI	99.825.000,00	
		DED saluran drainase perkotaan Kandangan	267.800.000,00	
		Desain teknik sipil air	50.000.000,00	
		Masterplan drainase	225.014.000,00	
		Masterplan air minum	239.699.000,00	
		RAD AMPL Kab. HSS	68.492.500,00	
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	AreGIS	49.713.000,00	1.368.005.672,00
		Pendataan RTH	182.175.000,00	
		Pendataan PJU	210.651.000,00	
		Kajian Pemukiman	925.466.672,00	
6	Dinas Sosial	Aplikasi Pengelolaan Data PMKS-PSKS	9.850.000,00	9.850.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software antivirus	10.500.000,00	10.500.000,00
8	Dinas Perhubungan	Aplikasi SIM-PKB	10.000.000,00	10.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Video Editing	13.500.000,00	212.508.000,00
		Software pusat data, windows	100.800.000,00	
		Aplikasi e-commerce	98.208.000,00	
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	Software Sistem Informasi	14.630.000,00	14.630.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Software	39.330.500,00	190.759.000,00
		Software Perijinan	50.598.500,00	
		Software Pelayanan Perijinan	100.830.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Aplikasi Sipandu wisata	14.850.000,00	111.825.000,00
		Grand design wisata air panas Tanuhi	96.975.000,00	
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Software	35.460.000,00	349.067.000,00
		Software Website Sistem Manajemen Lingkungan	13.770.000,00	
		E-BOOK/ DIGITAL LIBRARY	299.837.000,00	
14	Dinas Perikanan	Masterplan Pengembangan Ikan Gabus	100.000.000,00	100.000.000,00
15	Dinas Perdagangan	Designer Aplikasi	15.950.000,00	28.950.000,00
		Aplikasi Sidodol dan Sihapok	13.000.000,00	
16	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Database Hasil-hasil Pembangunan	48.400.000,00	57.400.000,00
		Software windows	9.000.000,00	
17	Bagian Protokol dan Kehumasan	Hosting (masternet.web) Sistem Informasi Protokoler	28.720.000,00	33.720.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi	5.000.000,00	
18	Bagian Organisasi	Aplikasi SAKIP	39.213.000,00	39.213.000,00
19	BAPPELITBANGDA	Database Sistem Informasi SDA dan LH	98.125.000,00	557.594.749,00
		Software	411.209.749,00	
		Database Profil Geologi Sumber Daya Mineral	48.260.000,00	
20	BPKPD	Window, Software, Oracle Web	374.269.300,00	784.602.300,00
		Software	162.633.000,00	
		Modul	7.250.000,00	
		Aplikasi BPHTB Online	200.450.000,00	
		Aplikasi kertas kerja BMD online	40.000.000,00	
21	BKPSDM	Software Kepegawaian	184.510.000,00	184.510.000,00
22	Sekretariat DPRD	Aplikasi Verifikasi Online	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah				8.895.030.831,11

Adapun mutasi aset tidak berwujud selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.136 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	7.958.172.770,11
Penambahan Aset Lainnya - ATB Tahun 2022	953.418.459,00
Pengurangan Aset Lainnya - ATB Tahun 2022	(16.560.398,00)
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	8.895.030.831,11



A. Penambahan Aset Tidak Berwujud

Penambahan aset tidak berwujud selama TA 2022 sebesar Rp953.418.459,00 berasal dari:

1. Belanja modal pada LRA tercatat pada rekening belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.000.000,00 yang langsung menambah nilai Aset Tidak Berwujud terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp38.842.038,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.137 Rincian Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	Dari KIB	Nilai (Rp)	Keterangan
1	RSUD Hasan Basry Kandungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	5.842.038,00	Kaspersky small office, software antivirus, account premium zoom, hosting monster dan domain renewal
2	Sekretariat DPRD	KIB D (JIJ)	3.000.000,00	Aplikasi verifikasi online
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	KIB B (Peralatan dan Mesin)	30.000.000,00	Pengembangan Aplikasi Kertas Kerja Pengelolaan BMD, Sistem Informasi Barang Persediaan dan Sistem Informasi Pemetaan Aset BMD
Nilai			38.842.038,00	

3. Reklasifikasi dari non modal sebesar Rp856.741.672,00 yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH yaitu beban jasa berupa jasa perencanaan wilayah, jasa survei kajian/dokumen lingkungan hidup dan permukiman kumuh.
4. Hibah yang diterima sebesar Rp44.834.749,00 terdapat pada Bappelitbangda berupa perangkat lunak dari Lemhanas RI sesuai BAST Perangkat Lunak Tanggal 21 Maret 2018.

B. Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Pengurangan aset tidak berwujud selama tahun 2022 sebesar Rp16.560.398,00 disebabkan oleh adanya reklasifikasi ke barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.138 Rincian Reklasifikasi ke Non Modal

No	SKPD	Reklas Ke	Nilai (Rp)	Keterangan
1	RSUD H. Hasan Basry	Beban Barjas BLUD	3.560.398,00	Account premium zoom, hosting monster dan domain renewal
2	Dinas Kominfo	Beban Jasa	13.000.000,00	Lisensi software akun zoom meeting dan Cloud Storage
Jumlah			16.560.398,00	



5.3.1.5.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp4.856.903.964,11 dan Rp3.653.676.285,11 dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.139 Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(295.300.430,11)	(271.425.000,00)	(566.725.430,11)
2	Dinas Kesehatan	(84.596.566,00)	(31.277.278,00)	(115.873.844,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	(86.829.795,00)	(6.168.542,00)	(92.998.337,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(798.915.219,00)	(535.009.398,00)	(1.333.924.617,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	(217.245.500,00)	(155.741.228,00)	(372.986.728,00)
6	Dinas Sosial	(9.850.000,00)	0,00	(9.850.000,00)
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(5.666.667,00)	(2.388.889,00)	(8.055.556,00)
8	Dinas Perhubungan	(7.222.223,00)	(2.777.777,00)	(10.000.000,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(51.764.001,00)	(66.335.998,00)	(118.099.999,00)
10	Dinas Tenaga Kerja, KUKP	(14.630.000,00)	0,00	(14.630.000,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(190.759.000,00)	0,00	(190.759.000,00)
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(11.928.750,00)	(23.932.500,00)	(35.861.250,00)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(338.700.333,00)	(10.366.667,00)	(349.067.000,00)
14	Dinas Perikanan	(4.000.000,00)	(20.000.000,00)	(24.000.000,00)
15	Dinas Perdagangan	(24.977.778,00)	(3.972.222,00)	(28.950.000,00)
16	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	(33.720.000,00)	0,00	(33.720.000,00)
17	Bagian Organisasi	(39.213.000,00)	0,00	(39.213.000,00)
18	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	(53.650.000,00)	(3.000.000,00)	(56.650.000,00)
19	BAPPELITBANGDA	(512.760.000,00)	(7.472.458,00)	(520.232.458,00)
20	BPKPD	(687.437.023,00)	(63.276.389,00)	(750.713.412,00)
21	BKPSDM	(184.510.000,00)	0,00	(184.510.000,00)
22	Sekretariat DPRD	0,00	(83.333,00)	(83.333,00)
	Jumlah	(3.653.676.285,11)	(1.203.227.679,00)	(4.856.903.964,11)

Penambahan amortisasi aset tidak berwujud selama Tahun 2022 dipengaruhi oleh beban amortisasi selama tahun 2022 sebesar Rp1.203.227.679,00.

5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar



Rp19.361.362.798,00 dan Rp19.297.918.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.140 Rincian Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan	15.265.288.194,00	15.265.288.194,00
Aset Lain-lain Rusak Berat	4.096.074.604,00	4.032.630.604,00
Jumlah	19.361.362.798,00	19.297.918.798,00

1. Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan

Aset lain-lain yang akan dipindahtangankan merupakan aset tetap yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa aset-aset yang pengadaannya ada di beberapa SKPD namun sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan proses hibah ke Organisasi Kemasyarakatan.

Saldo aset lain-lain yang akan dipindahtangankan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.265.288.194,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.141 Rincian Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.240.000,00	5.240.000,00	Tanah urugan sekolah yang bukan milik Pemda
2	Dinas Pertanian	15.145.973.194,00	15.145.973.194,00	Jalan Usaha Tani yang tanahnya bukan merupakan Tanah Milik Pemkab
3	Kecamatan Kalumpang	114.075.000,00	114.075.000,00	Pengurugan lapangan sepak bola yang bukan milik Pemda
TOTAL		15.265.288.194,00	15.265.288.194,00	

2. Aset Lain-lain Rusak Berat

Aset lain-lain rusak berat yaitu aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional karena tergolong kondisi rusak berat. Saldo aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.096.074.604,00 dan Rp4.032.630.604,00. Saldo aset lain-lain rusak berat naik sebesar Rp63.444.000,00 atau 1,57%. Aset ini dalam kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya dalam menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.142 Rincian Aset Lain-lain Rusak Berat per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	386.100.000,00	386.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

NO	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	48.394.999,00	48.394.999,00
3	RSUD H. Hasan Basry	1.338.907.005,00	1.338.907.005,00
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	185.000.000,00	185.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42.744.000,00	0,00
6	Dinas Pertanian	1.999.193.600,00	1.999.193.600,00
7	Dinas Perdagangan	20.700.000,00	0,00
8	Bagian Umum	75.035.000,00	75.035.000,00
TOTAL		4.096.074.604,00	4.032.630.604,00

Adapun mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.143 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2022	4.032.630.604,00
Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022	63.444.000,00
Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2022	0,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2022	4.096.074.604,00

A. Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

Penambahan aset lain-lain rusak berat sebesar Rp63.444.000,00 selama tahun 2022, disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.144 Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat

No	SKPD	Reklas Dari	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	42.744.000,00	Alat-alat kedokteran
2	Dinas Perdagangan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	20.700.000,00	Truk pengangkut sampah
JUMLAH			63.444.000,00	

B. Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tidak ada pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat selama tahun 2022.

5.3.1.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.454.258.786,00.



2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, termasuk aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan dibukukan sebagai aset lain-lain rusak berat.

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.947.178.106,00 dan Rp3.883.734.106,00. Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat selama Tahun 2022 naik sebesar Rp63.444.000,00 atau 1,63% dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.145 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per SKPD

NO	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(386.100.000,00)	0,00	0,00	(386.100.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(39.723.570,00)	0,00	0,00	(39.723.570,00)
3	RSUD H. Hasan Basry	(1.337.888.588,00)	0,00	0,00	(1.337.888.588,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	(185.000.000,00)	0,00	0,00	(185.000.000,00)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	(42.744.000,00)	0,00	(42.744.000,00)
6	Dinas Pertanian	(1.863.701.235,00)	0,00	0,00	(1.863.701.235,00)
7	Dinas Perdagangan	0,00	(20.700.000,00)	0,00	(20.700.000,00)
8	Bagian Umum	(71.320.713,00)	0,00	0,00	(71.320.713,00)
9	Kecamatan Loksado	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		(3.883.734.106,00)	(63.444.000,00)	0,00	(3.947.178.106,00)

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat selama tahun 2022 dipengaruhi oleh:

- Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset rusak berat sebesar Rp63.444.000,00 berasal dari adanya reklasifikasi aset rusak berat dari aset tetap peralatan dan mesin.

5.3.1.5.3 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo dana transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.169.994.723,00. Berdasarkan Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 11/PMK.07/2022 tersebut, disampaikan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk Nontunai dilakukan dengan:

- Penerbitan SBN; dan/atau
- Treasury Deposit Facility*

Pembentukan dan pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan



anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih sehat, efisien, dan efektif, serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam jumlah tidak wajar.

Alokasi saldo pokok dan remunerasi TDF berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-214/WPB.19/2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui Treasury Deposit Facility. Dalam surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai saldo pokok pada rekening di Bank Indonesia dengan nama Rek Lain BI TDF Kab Hulu Sungai Selatan nomor rekening 519000447980 sebesar Rp171.169.994.723,00.

Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat pemberitahuan tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF, maka dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp59.847.165.024,00 dan Rp68.129.947.361,50. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp8.282.782.337,50 atau 12,16% dari saldo kewajiban Tahun 2021. Saldo kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2022. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp59.847.165.024,00 dan sebesar Rp68.129.947.361,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.146 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	277.646.670,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	406.785.628,00	176.957.345,00
Utang Belanja	13.197.825.834,00	29.744.575.179,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	45.964.906.892,00	38.208.414.837,00
Jumlah Kewajiban	59.847.165.024,00	68.129.947.361,50



5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp277.646.670,00 dan Rp0,00. Utang pihak ketiga terdiri atas uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang jaminan dimaksud berupa uang jaminan bongkar reklame, sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah daerah.

Uang jaminan bongkar reklame pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame. Sedangkan pembukaan rekening penampungan untuk jaminan bongkar reklame berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bank Kalsel Nomor: 05/BAKEUDA/2020, Nomor 246/KDG-OPR/2022 tentang Penampungan Uang Jaminan Bongkar Reklame Pemkab HSS dengan nomor rekening 008.00.04.00751.2.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp406.785.628,00 dan Rp176.957.345,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.3.147 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2021 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Reklame	103.232.345,00	103.232.345,00	253.502.563,00	253.502.563,00
Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Retribusi Sewa ATM BLUD	67.725.000,00	56.700.000,00	136.258.065,00	147.283.065,00
Jumlah	176.957.345,00	165.932.345,00	395.760.628,00	406.785.628,00

- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan penyetorannya melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp253.502.563,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan oleh PT Telkomsel dengan periode sewa 21 Juli 2019 sampai dengan 21 Juli 2024. Pembayaran pada tahun 2022 adalah pembayaran untuk periode 17 Juli 2022 s.d 17 Juni 2023, dengan nilai



sewa Rp1.000.000,00 per bulan.

- Terdapat pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa atm pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp56.700.000,00 yaitu pengurangan dari masa sewa atm Bank Kalsel sebesar Rp18.900.000,00 selama 3 tahun (periode sewa 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp56.700.000,00); pengurangan masa sewa atm BRI sebesar Rp18.900.000,00 (periode sewa 30 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp37.800.000,00); telah selesainya masa sewa atm BNI sebesar Rp18.900.000,00 (periode sewa 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp56.700.000,00).
- Selain itu terdapat penambahan pendapatan diterima dimuka atas sewa kantor BSI pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp136.258.065,00 dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun (periode sewa 13 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2026) berdasarkan addendum I perjanjian yang ditandatangani tanggal 11 juli 2022.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp13.197.825.834,00 dan Rp29.744.575.179,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp235.399.786,00 dan Rp593.251.671,00. Terdapat koreksi saldo awal atas utang belanja pegawai berupa utang iuran jaminan kesehatan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.118.408,00 karena sudah dibayarkan pada bulan Desember tahun 2021. Utang belanja pegawai tahun 2021 seluruhnya sudah diselesaikan. Utang belanja pegawai tahun 2022 merupakan utang belanja iuran jaminan Kesehatan IWP 1% dan BPJS 4% yang berasal dari belanja gaji dan belanja TPP serta utang insentif tenaga Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai mutasi berikut:

Tabel 5.3.148 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD

No	SKPD	Jenis Utang	31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
					Pelunasan	Penambahan	
1	Dinas Kesehatan	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (IWP 4% dari jasa medis)	48.668.040,00	0,00	48.668.040,00	43.909.408,00	43.909.408,00
		Insentif Tenaga Kesehatan Covid ASN	521.964.291,00	0,00	521.964.291,00	120.357.148,00	120.357.148,00
2	RSUD H. Hasan Basry	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (IWP 4% dari TPP)	0,00	0,00	0,00	10.991.360,00	10.991.360,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Jenis Utang	31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
					Pelunasan	Penambahan	
3	Kec. Daha Utara	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (IWP 4% dari TPP)	876.712,00	0,00	876.712,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji)	6.118.408,00	(6.118.408,00)	0,00	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji)	9.553.804,00	0,00	9.553.804,00	0,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	60.141.870,00	60.141.870,00
7	Dinas Perikanan	Iuran Jaminan Kesehatan ASN (BPJS 4% dari gaji dan TPP)	6.070.416,00	0,00	6.070.416,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban			593.251.671,00	(6.118.408,00)	587.133.263,00	235.399.786,00	235.399.786,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp12.962.426.048,00 dan sebesar Rp29.151.323.508,50. Utang belanja barang dan jasa terdiri atas utang belanja pada puskesmas, BLUD, dan beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.149 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
				Pelunasan	Penambahan	
1	Dinas Kesehatan	1.939.529.862,50	0,00	1.939.529.862,50	778.337.881,00	778.337.881,00
2	BLUD RSUD H. Hasan Basry	24.028.332.371,00	(1,00)	23.947.945.179,00	10.763.467.596,00	10.843.854.787,00
3	BLUD Puskesmas Kandungan	77.534.250,00	0,00	77.534.250,00	95.484.280,00	95.484.280,00
4	BLUD Puskesmas Negara	108.995.025,00	0,00	108.995.025,00	129.194.100,00	129.194.100,00
5	BLUD RS Daha Sejahtera	2.996.932.000,00	(238.101.000,00)	2.758.831.000,00	1.115.555.000,00	1.115.555.000,00
Jumlah Kewajiban		29.151.323.508,50	(238.101.001,00)	28.832.835.316,50	12.882.038.857,00	12.962.426.048,00

a. Dinas Kesehatan

Saldo utang belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp778.337.881,00 dan Rp1.939.529.862,50. Utang belanja TA 2021 sudah dibayarkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Utang belanja per 31 Desember 2022 meliputi utang belanja sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.3.150 Rincian Utang Belanja pada Dinas Kesehatan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Utang Jasa Medis/Pelayanan	60.891.900,00	60.891.900,00	91.482.376,00	91.482.376,00
Utang Makan/Minum Pasien	3.208.500,00	3.208.500,00	9.834.500,00	9.834.500,00
Utang Insentif Tenaga Kesehatan Covid	1.306.428.575,00	1.306.428.575,00	70.714.290,00	70.714.290,00
Jasa Pelayanan Dana Kapitasi	569.000.887,50	569.000.887,50	606.306.715,00	606.306.715,00
Jumlah Kewajiban	1.939.529.862,50	1.939.529.862,50	778.337.881,00	778.337.881,00

b. BLUD RSUD H. Hasan Basry

Saldo utang belanja pada BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp10.843.854.787,00 dan Rp24.028.332.371,00. Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp1,00. Berikut disajikan mutasi utang BLUD RSUD H. Hasan Basry selama tahun 2022:

Tabel 5.3.151 Rincian Utang Belanja RSUD H. Hasan Basry

RSUD BLUD H. Hasan Basry	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Utang Belanja Obat-obatan	3.778.386.929,00	(1,00)	3.778.386.928,00	6.455.206.249,00	6.455.206.249,00
Utang Belanja Alat Kesehatan	87.840.000,00	0,00	87.840.000,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bahan-bahan Baku (untuk makan dan minum pasien)	12.175.194,00	0,00	12.175.194,00	36.442.708,00	36.442.708,00
Utang Belanja Jasa Layanan	20.080.924.024,00	0,00	20.000.536.833,00	4.244.649.389,00	4.325.036.580,00
Utang Belanja Makan Minum rapat	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM)	2.883.036,00	0,00	2.883.036,00	4.100.000,00	4.100.000,00
Utang Belanja Honorarium Narasumber	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan	20.796.028,00	0,00	20.796.028,00	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	5.812.000,00	0,00	5.812.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.160,00	0,00	50.160,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
Utang Belanja Langganan Surat Kabar	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
Utang Pajak Bea Perijinan (Pajak Kendaraan&Retribusi Sampah)	0,00	0,00	0,00	2.809.800,00	2.809.800,00
Utang Belanja Telpon	0,00	0,00	0,00	265.450,00	265.450,00
Utang Sewa Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00
Utang Layanan Internet	0,00	0,00	0,00	11.322.000,00	11.322.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

RSUD BLUD H. Hasan Basry	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Utang Biaya CMS Bank BSI (Jasa Transaksi Keuangan)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Jumlah	24.028.332.371,00	(1,00)	23.947.945.179,00	10.763.467.596,00	10.843.854.787,00

c. Utang BLUD Puskesmas Kandangan

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp95.484.280,00 dan Rp77.534.250,00. Penetapan persentasi untuk utang BLUD Puskesmas Kandangan terdiri atas:

1. Utang pelayanan dari jasa BPJS kapitasi ditetapkan sebesar 70% dari pendapatan klaim BPJS Kapitasi yang telah diverifikasi (berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/25/KUM/2022).
2. Untuk utang pelayanan non kapitasi ditetapkan sebesar 60% dari pendapatan klaim BPJS non kapitasi yang telah diverifikasi dan dari pendapatan layanan umum (berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/344/KUM/2016).

Tabel 5.3.152 Rincian Utang BLUD Puskesmas Kandangan

BLUD Puskesmas Kandangan	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Jasa Pelayanan Pasien Umum	4.200.000,00	4.200.000,00	10.807.800,00	10.807.800,00
Jasa Pelayanan BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	1.791.000,00	1.791.000,00	420.000,00	420.000,00
Jasa Pelayanan BPJS Kapitasi	71.543.250,00	71.543.250,00	84.165.480,00	84.165.480,00
Pemungutan parkir	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
Jumlah	77.534.250,00	77.534.250,00	95.484.280,00	95.484.280,00

d. Utang BLUD Puskesmas Negara

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp129.194.100,00 dan Rp108.995.025,00. Penetapan persentasi untuk utang BLUD Puskesmas Kandangan terdiri atas:

1. Utang pelayanan dari jasa BPJS kapitasi ditetapkan sebesar 70% dari pendapatan klaim BPJS Kapitasi yang telah diverifikasi (berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/25/KUM/2022).
2. Untuk utang pelayanan non kapitasi ditetapkan sebesar 60% dari pendapatan klaim BPJS non kapitasi yang telah diverifikasi dan dari pendapatan layanan umum (berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/344/KUM/2016).



Tabel 5.3.153 Rincian Utang Belanja Puskesmas Negara

BLUD Puskesmas Negara	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Jasa Pelayanan Pasien Umum	1.344.300,00	1.344.300,00	5.898.900,00	5.898.900,00
Jasa Pelayanan BPJS Rawat Inap	19.560.000,00	19.560.000,00	32.197.800,00	32.197.800,00
Jasa Pelayanan BPJS Rawat Jalan	2.012.400,00	2.012.400,00	3.149.400,00	3.149.400,00
Jasa Pelayanan BPJS Kapitasi	86.078.325,00	86.078.325,00	87.948.000,00	87.948.000,00
Jumlah	108.995.025,00	108.995.025,00	129.194.100,00	129.194.100,00

e. Utang BLUD RS Daha Sejahtera

Saldo utang belanja pada BLUD RS Daha Sejahtera per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.115.555.000,00 dan Rp2.996.932.000,00. Utang tersebut merupakan utang jasa pelayanan kesehatan. Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp238.101.000,00 pada utang klaim covid yang disebabkan karena adanya perubahan kebijakan yang semula besaran jasa pelayanan 50% menjadi 40% sehingga mempengaruhi perhitungan saldo utang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera menyatakan bahwa besaran jasa pelayanan yang bersumber dari seluruh pendapatan pelayanan RSUD Daha Sejahtera ditentukan sebesar 40% dari total pendapatan layanan.

Tabel 5.3.154 Rincian Utang BLUD RS Daha Sejahtera

BLUD RS Daha Sejahtera	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Jasa Pelayanan Klaim Covid	2.753.348.000,00	(238.101.000,00)	2.515.247.000,00	200.352.400,00	200.352.400,00
Jasa Layanan Klaim BPJS	243.584.000,00	0,00	243.584.000,00	871.631.400,00	871.631.400,00
Jasa Layanan Pasien Umum	0,00	0,00	0,00	43.571.200,00	43.571.200,00
Jumlah	2.996.932.000,00	(238.101.000,00)	2.758.831.000,00	1.115.555.000,00	1.115.555.000,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45.964.906.892,00 dan Rp38.208.414.837,00. Utang jangka pendek lainnya tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.07/2021 tanggal 16 September 2022 sudah diselesaikan dengan KMK 29/KM.7/2022 dan KMK 37/KM.7/2022. Saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2022 terdiri dari sisa lebih bayar sampai dengan tahun 2020 dan sisa lebih bayar tahun anggaran 2021 atas transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



Tabel 5.3.155 Rincian Mutasi Utang Transfer pemerintah Pusat

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
DBH PBB Bagian Daerah	39.264.601,00	39.264.601,00	0,00	0,00
DBH PBB Biaya Pemungutan	1.356.157,00	1.356.157,00	13.514.874,00	13.514.874,00
DBH SD Minerba - Royalti	37.245.011.605,00	13.373.017.238,00	21.419.084.277,00	45.291.078.644,00
DBH Iuran Tetap (Land-Rent)	501.728.381,00	501.728.381,00	0,00	0,00
DBH SDA Migas	251.734.700,00	251.734.700,00	405.444.232,00	405.444.232,00
DBH SDA Kehutanan PSDH	11.625.373,00	0,00	69.770.845,00	81.396.218,00
DBH SDA Perikanan	157.694.020,00	0,00	15.778.904,00	173.472.924,00
Jumlah	38.208.414.837,00	14.167.101.077,00	21.923.593.132,00	45.964.906.892,00

Berikut disajikan rincian lebih bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat:

Tabel 5.3.156 Rincian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Uraian	Lebih Bayar TA 2020 sesuai PMK No. 129 Tahun 2022 yang belum diselesaikan (Rp)	Sisa Lebih Bayar Sampai Dengan TA 2020 sesuai PMK No. 127 Tahun 2022 (Rp)	Sisa Lebih Bayar TA 2021 sesuai PMK No. 127 Tahun 2022 (Rp)	Jumlah (Rp)
DBH PBB Biaya Pemungutan	0,00	0,00	13.514.874,00	13.514.874,00
DBH SD Minerba – Royalti	0,00	45.291.078.644,00	0,00	45.291.078.644,00
DBH PBB SDA Migas	0,00	0,00	405.444.232,00	405.444.232,00
DBH SDA Kehutanan PSDH	0,00	11.625.373,00	69.770.845,00	81.396.218,00
DBH SDA Perikanan	0,00	157.694.020,00	15.778.904,00	173.472.924,00
Total	0,00	45.460.398.037,00	504.508.855,00	45.964.906.892,00

5.3.3 EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.157 Rincian Ekuitas Dana

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.466.876.675.921,88	3.411.000.311.989,37
SURPLUS/DEFISIT - LO	354.884.028.643,94	57.680.611.386,92



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Ekuitas	20.212.003.900,21	(1.804.247.454,41)
EKUITAS AKHIR	3.841.972.708.466,03	3.466.876.675.921,88

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.



5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Ringkasan Pendapatan – LO

Pendapatan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Asli Daerah	159.498.169.070,65	239.359.974.861,93	(79.861.805.791,28)	(33,36)
Pendapatan Transfer	1.474.170.894.789,00	961.771.509.246,00	512.399.385.543,00	53,28
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.768.530.351,62	89.111.725.129,00	(79.343.194.777,38)	(89,04)
Jumlah	1.643.437.594.211,27	1.290.243.209.236,93	353.194.384.974,34	27,37

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2022 dan TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Pajak daerah	17.238.064.030,04	13.592.034.964,86	3.646.029.065,18	26,82
Pendapatan Retribusi Daerah	7.040.276.521,00	6.776.465.761,00	263.810.760,00	3,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.385.843.023,75	6.974.111.716,16	411.731.307,59	5,90
Lain-lain PAD yang Sah	127.833.985.495,86	212.017.362.419,91	(84.183.376.924,05)	(39,71)
Jumlah	159.498.169.070,65	239.359.974.861,93	(79.861.805.791,28)	(33,36)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rincian



realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pajak Hotel	526.914.322,00	270.634.814,00	256.279.508,00	94,70
Pajak Restoran	3.105.393.176,50	2.270.484.557,00	834.908.619,50	36,77
Pajak Hiburan	16.444.000,00	3.230.000,00	13.214.000,00	409,10
Pajak Reklame	211.277.504,14	250.260.445,86	(38.982.941,72)	(15,58)
Pajak Penerangan Jalan	8.054.478.445,00	6.706.096.624,00	1.348.381.821,00	20,11
Pajak Parkir	18.766.150,00	17.832.750,00	933.400,00	5,23
Pajak Air Tanah	13.080.000,00	11.520.000,00	1.560.000,00	13,54
Pajak Sarang Burung Walet - LO	36.637.250,00	31.056.966,00	5.580.284,00	17,97
Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.689.954.458,40	1.125.193.724,00	564.760.734,40	50,19
PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.446.437.796,00	1.321.136.959,00	125.300.837,00	9,48
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.118.680.928,00	1.584.588.125,00	534.092.803,00	33,71
Jumlah	17.238.064.030,04	13.592.034.964,86	3.646.029.065,18	26,82

Pendapatan Pajak Daerah di LO sebesar Rp17.238.064.030,04 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp17.300.630.533,90 yaitu lebih kecil pada LO sebesar Rp62.566.503,86. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penambahan selisih pelunasan piutang pajak penerangan jalan tahun 2021 dan piutang pajak penerangan jalan tahun 2022 sebesar Rp116.860.894,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Dikurangi pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp153.059.360,86 merupakan pelunasan pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp2.789.142,86 Ditambah selisih pelunasan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp150.270.218,00 yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Dikurangi selisih pelunasan piutang PBB tahun 2021 dan penambahan piutang PBB tahun 2022 sebesar Rp26.368.037,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil dan berhubungan dengan perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2022 dan 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	730.417.860,00	752.480.000,00	(22.062.140,00)	(2,93)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	370.860.000,00	362.705.000,00	8.155.000,00	2,25
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	313.291.800,00	354.462.500,00	(41.170.700,00)	(11,61)
Retribusi Pelayanan Pasar	747.838.000,00	815.078.000,00	(67.240.000,00)	(8,25)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	224.896.000,00	305.690.000,00	(80.794.000,00)	(26,43)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.480.500,00	14.885.000,00	595.500,00	4,00
Retribusi Menara Telekomunikasi	306.500.000,00	306.500.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	566.741.200,00	528.006.240,00	38.734.960,00	7,34
Retribusi Pasar Grosir	1.780.035.951,00	1.757.306.261,00	22.729.690,00	1,29
Retribusi Terminal	17.040.000,00	12.949.000,00	4.091.000,00	31,59
Retribusi Tempat Khusus Parkir	876.295.500,00	843.856.500,00	32.439.000,00	3,84
Retribusi Tempat Penginapan/Villa	316.385.000,00	175.350.000,00	141.035.000,00	80,43
Retribusi Rumah Potong Hewan	12.850.000,00	9.850.000,00	3.000.000,00	30,46
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	17.005.000,00	17.842.000,00	(837.000,00)	(4,69)
Retribusi Tempat Rekreasi	368.051.000,00	186.331.000,00	181.720.000,00	97,53
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	42.117.000,00	72.990.000,00	(30.873.000,00)	(42,30)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	334.321.710,00	258.994.260,00	75.327.450,00	29,08
Retribusi Izin Trayek	150.000,00	1.190.000,00	(1.040.000,00)	(87,39)
Jumlah	7.040.276.521,00	6.776.465.761,00	263.810.760,00	3,89

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp7.040.276.521,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp6.818.208.641,00 yaitu lebih besar pada LO sebesar Rp222.067.880,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penambahan selisih pelunasan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2021 dan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2022 pada Dinas Perdagangan sebesar Rp251.477.400,00.
- Dikurangi pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2021 dikurangi piutang tahun 2022 sebesar Rp28.691.520,00 dan penambahan piutang retribusi pelayanan Kesehatan berdasarkan berita acara verifikasi sebesar Rp824.000,00.
- Dikurangi pelunasan piutang atas kurang setor retribusi pasar los tahun 2021 (piutang retribusi pasar los) pada Dinas Perdagangan sebesar Rp1.542.000,00.

Pendapatan operasional dari hasil Retribusi Daerah berdasarkan SKPD telah dijelaskan pada bab mengenai Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi



Anggaran.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dan KPN Swarga dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan hasil pengelolaan investasi pada TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Bank BPD Kalsel	6.709.172.614,00	6.086.759.048,00	622.413.566,00	10,23
KPN Swarga Kandangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD	672.170.409,75	882.852.668,16	(210.682.258,41)	(23,86)
Jumlah	7.385.843.023,75	6.974.111.716,16	411.731.307,59	5,90

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di LO sebesar Rp7.385.843.023,75 memiliki nilai yang berbeda dengan disajikan pada LRA sebesar Rp6.713.672.614,00, yaitu lebih besar di LO sebesar Rp672.170.409,75. Selisih tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada:

- PDAM Tirta Dharma Kandangan sebesar Rp663.447.567,63 (berdasarkan laporan keuangan *Audited*) dan;
- PT BPR Hulu Sungai Selatan sebesar Rp8.722.842,12 (berdasarkan laporan keuangan *Audited*).

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan asli daerah lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.422.816,00	250.364.337,00	140.058.479,00	55,94
Penerimaan Jasa Giro	6.373.533.843,29	5.814.298.197,46	559.235.645,83	9,62
Pendapatan Bunga	141.787.901,76	4.847.028.371,93	(4.705.240.470,17)	(97,07)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	173.189.525,20	38.314.166,95	134.875.358,25	352,02
Pendapatan Denda Pajak Daerah	53.635.651,00	41.485.797,00	12.149.854,00	29,29
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	850.000,00	47.205.000,00	(46.355.000,00)	(98,20)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Dari Pengembalian	1.457.878.924,83	1.186.473.874,78	271.405.050,05	22,87
Pendapatan BLUD	110.456.621.409,78	191.049.246.397,79	(80.592.624.988,01)	(42,18)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	8.786.065.424,00	8.742.946.277,00	43.119.147,00	0,49
Jumlah	127.833.985.495,86	212.017.362.419,91	(84.183.376.924,05)	(39,71)

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LO sebesar Rp127.833.985.495,86 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp135.553.601.231,98 yaitu lebih kecil dari LRA sebesar Rp7.719.615.736,12. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penerimaan atas piutang bunga deposito dana cadangan (kurang setor bunga deposito dana cadangan bulan Desember) tahun 2022 sebesar Rp1.232.876,72;
- Dikurangi selisih pelunasan piutang BLUD RS dan BLUD Puskesmas tahun 2021 sebesar Rp18.404.321.620,00 ditambah dengan piutang BLUD RS dan BLUD Puskesmas tahun 2022 sebesar Rp10.721.517.143,00 dan dikurangi selisih pendapatan diterima dimuka atas sewa atm tahun 2021 dan tahun 2022 pada BLUD RSUD Hasan Basry sebesar Rp79.558.065,00.
- Alokasi saldo remunerasi *Treasury Deposit Facility (TDF)* sebesar Rp41.513.929,16 berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-214/WPB.19/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Kebijakan Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dalam Bentuk Non Tunai Melalui Treasury Deposit Facility.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Jumlah di bawah ini merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Rincian Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.351.043.525.562,00	885.131.113.997,00	465.912.411.565,00	52,64
Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.127.369.227,00	76.640.395.249,00	46.486.973.978,00	60,66
Jumlah	1.474.170.894.789,00	961.771.509.246,00	512.399.385.543,00	53,28

Pendapatan transfer pemerintah terbagi atas 2 (dua) macam pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.8 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.339.470.577.562,00	831.612.712.997,00	507.857.864.565,00	61,07
Transfer Antar Daerah Pemerintah Pusat Lainnya	11.572.948.000,00	53.518.401.000,00	(41.945.453.000,00)	(78,38)
Jumlah	1.351.043.525.562,00	885.131.113.997,00	465.912.411.565,00	52,64

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan untuk periode TA 2022 dan 2021 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Dana Bagi Hasil Pajak	48.502.673.086,00	58.609.947.527,00	(10.107.274.441,00)	(17,24)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	618.891.835.484,00	139.163.363.959,00	479.728.471.525,00	344,72
Dana Alokasi Umum (DAU)	473.900.465.240,00	474.753.627.000,00	(853.161.760,00)	(0,18)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	198.175.603.752,00	159.085.774.511,00	39.089.829.241,00	24,57
Jumlah	1.339.470.577.562,00	831.612.712.997,00	507.857.864.565,00	61,07

Pada penerimaan transfer pusat dana perimbangan sebesar Rp1.339.470.577.562,00 terdapat dana bagi hasil sebesar Rp667.394.508.570,00 yang terdiri dari penerimaan transfer tunai sebesar Rp496.224.513.847,00 dan penerimaan nontunai sebesar Rp171.169.994.723,00 dalam bentuk *Treasury Deposit Facility (TDF)* yang ditempatkan pada kantor pusat Bank Indonesia.

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-214/WPB.19/2023 tanggal 13 Februari 2023.

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Pendapatan dana bagi hasil terdiri atas pendapatan transfer dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), serta kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil



dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	41.111.700.344,00	52.447.681.903,00	(11.335.981.559,00)	(21,61)
Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	7.390.924.957,00	6.162.265.000,00	1.228.659.957,00	19,94
Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	47.785,00	624,00	47.161,00	7557,85
Jumlah	48.502.673.086,00	58.609.947.527,00	(10.107.274.441,00)	(17,24)

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp48.502.673.086,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp31.743.280.016,00, yaitu LO lebih besar daripada LRA sebesar Rp16.759.393.070,00. Selisih tersebut dipengaruhi karena terdapat penerimaan nontunai dalam bentuk TDF dengan rincian sebagai berikut :

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp15.945.742.138,00.
2. DBH dari Pajak Penghasilan sebesar Rp813.612.957,00.
3. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp37.975,00.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.11 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
DBH - SDA Minyak Bumi	476.851.876,00	68.554.300,00	408.297.576,00	595,58
DBH - SDA Minerba - Landrent	1.674.476.356,00	67.910.025,00	1.606.566.331,00	2.365,73
DBH - SDA Minerba - Royalty	614.455.719.396,00	137.227.649.277,00	477.228.070.119,00	347,76
DBH - SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan	114.723.645,00	441.631.207,00	(326.907.562,00)	(74,02)
DBH - SDA Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061,00	59,84
Jumlah	618.891.835.484,00	139.163.363.959,00	479.728.471.525,00	344,72

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp618.891.835.484,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp464.481.233.831,00, yaitu LO lebih bedar daripada LRA sebesar Rp154.410.601.653,00. Selisih tersebut dipengaruhi karena terdapat penerimaan nontunai dalam bentuk TDF dengan rincian sebagai berikut :



1. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp113.283.884,00.
2. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Landrent sebesar Rp502.968.548,00.
3. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – Royalti sebesar Rp153.571.401.365,00.
4. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp11.194.645,00. dan
5. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp211.753.211,00.

5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2022 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya. Kenaikan/penurunan Dana Alokasi Umum tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Dana Alokasi Umum	473.900.465.240,00	474.753.627.000,00	(853.161.760,00)	(0,18)
Jumlah	473.900.465.240,00	474.753.627.000,00	(853.161.760,00)	(0,18)

Pendapatan DAU – LO memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK terdiri atas:

Tabel 5.4.13 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
DAK Fisik	99.395.904.042,00	71.332.731.438,00	28.063.172.604,00	39,34
Dak Non Fisik	98.779.699.710,00	87.753.043.073,00	11.026.656.637,00	12,57
Jumlah	198.175.603.752,00	159.085.774.511,00	39.089.829.241,00	24,57



Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan lebih rinci mengenai alokasi DAK diuraikan dalam penjelasan mengenai Pendapatan DAK pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2022 terdiri dari penerimaan Dana Penyesuaian – Dana Intensif Daerah. Penerimaan dana penyesuaian untuk periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Rincian Dana Penyesuaian

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Dana Penyesuaian – DID	11.572.948.000,00	53.518.401.000,00	(41.945.453.000,00)	(78,38)
Jumlah	11.572.948.000,00	53.518.401.000,00	(41.945.453.000,00)	(78,38)

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya pada LO sebesar Rp11.572.948.000,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp119.371.510.000,00 yaitu lebih besar di LRA sebesar Rp107.798.562.000,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan transfer dana desa tahun 2022. Sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa hanya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penerimaan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2022 serta perbandingannya dengan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Rincian Transfer Pemerintah Antar Daerah

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pajak Kendaraan Bermotor	8.338.275.100,00	7.575.141.314,00	763.133.786,00	10,07
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.928.395.667,00	8.304.696.618,00	1.623.699.049,00	19,55
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	92.028.652.052,00	49.639.130.777,00	42.389.521.275,00	85,40
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	166.606.768,00	66.220.470,00	100.386.298,00	151,59
Pajak Rokok	12.665.439.640,00	11.055.206.070,00	1.610.233.570,00	14,57
Jumlah	123.127.369.227,00	76.640.395.249,00	46.486.973.978,00	60,66

Saldo pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp123.127.369.227,00



memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp120.313.759.249,00 yaitu lebih besar di LO sebesar Rp2.813.609.978,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh koreksi saldo awal sebesar Rp1.864.011.356,00 berupa kurang catat piutang bagi hasil pajak rokok bulan Desember tahun 2021 dan selisih piutang transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dengan piutang Tahun 2021 yang dibayar di Tahun 2022 sebesar Rp4.677.621.334,00.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan Hibah	9.768.530.351,62	66.522.617.129,00	(56.754.086.777,38)	(85,32)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	22.589.108.000,00	(22.589.108.000,00)	(100,00)
Jumlah	9.768.530.351,62	89.111.725.129,00	(79.343.194.777,38)	(89,04)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah untuk periode TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.17 Rincian Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	653.911.650,00	46.030.535.861,00	(45.376.624.211,00)	(98,58)
Hibah dari Pemerintah Daerah - LO	8.928.076.260,62	10.536.177.618,00	(1.608.101.357,38)	(15,26)
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	170.542.441,00	9.893.308.750,00	(9.722.766.309,00)	(98,28)
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO	16.000.000,00	62.594.900,00	(46.594.900,00)	(74,44)
Jumlah	9.768.530.351,62	66.522.617.129,00	(56.754.086.777,38)	(85,32)

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan hibah dari pemerintah pusat tahun 2022 sebesar Rp653.911.650,00 terdiri atas penerimaan hibah pada beberapa SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.18 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah

No	SKPD	Jenis	Nilai (Rp)	Keterangan	BAST
1	Dinas Kesehatan	Aset tetap - Kendaraan Bermotor Penumpang (KIB B)	170.584.150,00	Dari Kemenkes RI berupa Mobil Ambulance	KN.02.07/B.I/3445/2022
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Air Limbah Setempat	441.000.000,00	Dari Kemenkeu	NPHD-64/MK.7/DTK.03/ALS/2022
3	Satpol PP dan Damkar	Aset Tetap - Kendaraan Bermotor (KIB B)	42.327.500,00	Dari Kemendagri RI Dirjend Bina Administrasi Kewilayahan berupa Sepeda Motor Trail	BA No.000.3.3.2/8138/BAK dan No.000.3.3.2/001/SATP OL -PP
Total			653.911.650,00		

b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO

Pendapatan hibah dari pemerintah daerah sebesar Rp8.928.076.260,62 berupa pendapatan hibah pada beberapa SKPD yang menambah aset tetap dan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.19 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO

No	SKPD	Jenis	Nilai (Rp)	Keterangan	BAST
1	Dinas Kesehatan	Persediaan obat-obatan	5.866.935.441,99	Dari Kemenkes RI	KN.01.03/4/PPK/450/2021
2	RSUD H. Hasan Basry	Persediaan obat-obatan	165.600,00	Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel	442.1/2197/IF/X/2022
		Persediaan Sarpras berupa Sowel Oximeter	3.345.000,00	Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel	442.1/2813/IF/XII/2022
		Persediaan BAKHP	625.257.000,00	Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan BPJS	442.1/556/IF/III/2022, 442.1/2197/IF/X/2022, 442.1/2813/IF/XII/2022
		Aset tetap alat ventilator Machine GLP (KIB B)	220.983.610,00	Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel	BA No. 442.1/2813/IF/XII/2022
3	Dispera KPLH	Aset Tetap JIJ – Jalan	1.855.407.824,63	Dari Prov Kalsel	BA No.22A dan No.38 Tahun 2022
4	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	Persediaan Obat-Obatan	355.981.784,00	Dari BKKBN Prov Kalsel	No.15/KU.04/J1/BAST/2022, No.36/KU.04/J1/BAST/2022, dan No.41/KU.04/J1/BAST/2022,
Jumlah			8.928.076.260,62		

c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan sebesar Rp170.542.441,00 merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari:

- Penerimaan hibah berupa hibah tanah komplek perumahan dari kelompok masyarakat yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat



Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp133.800.000,00;

- Penerimaan hibah uang dari kelompok masyarakat/perorangan berupa pungutan SP3 atas proyek fisik (galian c) yang langsung diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp29.678.404,00;
- Pendapatan dari pengembalian hibah gatriwara, Dinas Kesehatan, Karang Taruna dan KONI sebesar Rp5.864.037,00 yang masuk pada kas daerah;
- Penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin dari perorangan berupa kursi roda sebesar Rp1.200.000,00 yang diterima RSUD Brigjend H. Hasan Basry.

d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri sebesar Rp16.000.000,00 terdiri atas pendapatan hibah aset tetap peralatan dan mesin berupa Tablet dari PT Taspen sebesar Rp2.500.000,00 dan Laptop dari Bank Kalsel sebesar Rp13.500.000,00 yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun anggaran 2021 pendapatan hibah dana BOS disajikan pada akun lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 pendapatan hibah dana BOS disajikan pada akun pendapatan transfer DAK Non Fisik karena pemerintah pusat melalui KPPN langsung menyalurkan ke rekening sekolah, tidak lagi melalui pemerintah provinsi. Sehingga Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak lagi mempunyai saldo pada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.20 Rincian Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
SDN	0,00	17.051.618.000,00	(17.051.618.000,00)	(100,00)
SMPN	0,00	5.537.490.000,00	(5.537.490.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	22.589.108.000,00	(22.589.108.000,00)	(100,00)

5.4.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.21 Rincian Beban

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Pegawai	491.410.517.114,00	479.110.625.219,00	12.299.891.895,00	2,57
Beban Barang dan Jasa	438.105.530.059,38	455.947.853.658,24	(17.842.323.598,86)	(3,91)
Beban Hibah	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00	8.400.564.427,00	33,00
Beban Bantuan Sosial	20.915.765.900,00	20.553.244.077,00	362.521.823,00	1,76
Beban Penyisihan Piutang	400.517.147,73	430.143.655,51	(29.626.507,78)	(6,89)
Beban Lain-lain	1.280.438.211,22	3.155.378.986,69	(1.874.940.775,47)	(59,42)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.312.410.570,00	49.928.887.571,00	1.383.522.999,00	2,77
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.917.444.701,00	24.888.935.528,00	2.028.509.173,00	8,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.675.636.021,00	101.908.770.776,57	26.766.865.244,43	26,27
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.399.000,00	1.669.832,00	729.168,00	43,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.203.227.679,00	670.599.635,00	532.628.044,00	79,43
Beban Bagi Hasil	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	80.837.203.036,00	64.400.000.000,00	16.437.203.036,00	25,52
Jumlah Beban	1.277.549.116.774,33	1.229.083.571.847,01	48.465.544.927,32	3,94

Rincian lebih lanjut mengenai pos-pos beban atau kegiatan operasi adalah sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Rincian Beban Operasi

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Pegawai	491.410.517.114,00	479.110.625.219,00	12.299.891.895,00	2,57
Beban Barang dan Jasa	438.105.530.059,38	455.947.853.658,24	(17.842.323.598,86)	(3,91)
Beban Hibah	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00	8.400.564.427,00	33,00
Beban Bantuan Sosial	20.915.765.900,00	20.553.244.077,00	362.521.823,00	1,76
Beban Penyisihan Piutang	400.517.147,73	430.143.655,51	(29.626.507,78)	(6,89)
Beban Lain-lain	1.280.438.211,22	3.155.378.986,69	(1.874.940.775,47)	(59,42)
Jumlah Beban	985.971.930.767,33	984.655.843.504,44	1.316.087.262,89	0,13

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pos-pos beban pada beban operasi disajikan sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.23 Rincian Beban Pegawai

Beban Pegawai - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Gaji dan Tunjangan	294.971.270.391,00	282.109.474.945,00	12.861.795.446,00	4,56
Beban Tambahan Penghasilan ASN	114.275.164.657,00	102.647.182.121,00	11.627.982.536,00	11,33
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.562.990.460,00	77.850.419.460,00	(12.287.429.000,00)	(15,78)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.491.161.056,00	15.442.132.876,00	49.028.180,00	0,32
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	308.330.550,00	259.830.385,00	48.500.165,00	18,67
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.585.432,00	14.568,00	0,00
Jumlah	491.410.517.114,00	479.110.625.219,00	12.299.891.895,00	2,57

Beban pegawai pada LO sebesar Rp491.410.517.114,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp491.961.749.591,00, yaitu lebih kecil yang disajikan pada LO sebesar Rp551.232.477,00 karena dipengaruhi oleh:

1. Penambahan utang belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp235.399.786,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp164.266.556,00; pada RS H. Hasan Basry sebesar Rp10.991.360,00; dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp60.141.870,00.
2. Penambahan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp800.000,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa biaya/honor pengadaan patok tanah.
3. Pengurangan yang berasal dari pelunasan utang belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp587.133.263,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp570.632.331,00; pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp9.553.804,00; pada Dinas Perikanan sebesar Rp6.070.416,00; dan pada Kecamatan Daha Utara sebesar Rp876.712,00.
4. Pengurangan yang berasal dari reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp200.299.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke aset tetap tanah (KIB A) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.200.000,00 berupa honorarium jasa appraisal Puskesmas Wasah;
 - b. Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp29.430.000,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pegawai ke Peralatan dan Mesin

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	11.180.000,00	Honor pejabat pengadaan laptop dan alat kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000,00	Honor pejabat pengadaan kegiatan belanja modal pengadaan meubeler
3	Dinas Sosial	1.850.000,00	Honor pengadaan <i>vacum cleaner</i> , laptop, perahu karet
4	Dinas Kominfo	2.400.000,00	Honor pengadaan alat studio dan video dan film, perluasan jaringan internet
5	Dinas Pertanian	1.750.000,00	Honor pengadaan laptop
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.100.000,00	Honorarium jasa pengadaan drone, kamera, telepon digital, PC, dan printer
7	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	1.500.000,00	Honor PPK pengadaan laptop dan AC split
8	Bagian Umum	3.600.000,00	Honor PPK dan PPBJ pengadaan laptop, printer, LCD, Finger print, pemotong dahan
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	Honor PPK pengadaan komputer
10	Inspektorat Daerah	500.000,00	Honor pengadaan barang dan jasa
11	Sekretariat DPRD	1.650.000,00	Honor PPKom pengadaan kendaraan dinas operasional
Jumlah		29.430.000,00	

- c. Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp166.919.000,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.25 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pegawai ke Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	78.900.000,00	Honor rehab SMP 3 Kandangan, SDN bangkau, SDN Sungai Raya Tengah, SDN Baru, Pemb.Perpustakaan SMP 2 Kandangan, SDN amawang kiri muka, sapras SMP 6 Daha Selatan
2	Dinas Kesehatan	5.600.000,00	honor PPK, pembantu PPK, dan pejabat pengadaan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Raya
		10.800.000,00	honor PPK, pembantu PPK, dan pejabat pengadaan rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Pasungkan
		2.400.000,00	honor pengadaan barang dan jasa pemeliharaan bangunan PUSTU Bayur Puskesmas Wasah
		4.419.000,00	honor PPK renovasi ruang rawat inap PKM Negara dan honor pejabat pengadaan rehab puskesmas Negara
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	16.850.000,00	Honor PPK dan pejabat pengadaan pengelolaan persampahan dan pengelolaan RTH, pemeliharaan tugu dodol kandangan
4	Dinas Porapar	23.900.000,00	Honor PPK dan PPBJ rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab Stadion 2 Desember, dan konsultan pengawasan)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.000.000,00	Honor PPBJ pengadaan gedung kantor
6	Dinas Pertanian	2.700.000,00	Honor PPK dan PPBJ rehab BPP



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
7	Bagian Umum	3.900.000,00	Honor pengadaan barang dan jasa (PPK dan PPBJ) pekerjaan rehab gedung kantor pada bagian umum
8	Sekretariat DPRD	4.900.000,00	Honorarium PPKom WC Pos Jaga & Kantin, Honorarium PPKom dan Konsultan Pengawas Pengadaan Rumah Jabatan Ketua DPRD
9	Kelurahan Kandangan Utara	2.700.000,00	Honorarium pengadaan rehab paving PKK Kelurahan Kandangan Utara
10	Kelurahan Jambu Hilir	1.600.000,00	Honor pengadaan dan PPK pemeliharaan gedung kantor
11	Kecamatan Daha Barat	1.400.000,00	Honorarium pengadaan pekerjaan urugan dan siring halaman kantor dan gedung sekretariat PKK
12	Inspektorat Daerah	2.850.000,00	Honorarium pengadaan pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
Jumlah		166.919.000,00	

- d. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp550.000,00 yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa honor pejabat pengadaan barang/jasa pembelian buku elektronik.
- e. Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan (KIB F) sebesar Rp2.200.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa honor perencanaan pembangunan Puskesmas Pasungkan dan Puskesmas Baman.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.26 Rincian Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa - SAP	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Persediaan	59.295.552.975,68	185.307.576.810,74	(126.012.023.835,06)	(68,00)
Beban Jasa	147.933.207.714,00	176.226.989.763,50	(28.293.782.049,50)	(16,06)
Beban Pemeliharaan	18.885.802.345,26	18.780.138.742,00	105.663.603,26	0,56
Beban Perjalanan Dinas	49.448.051.867,00	36.110.385.303,00	13.337.666.564,00	36,94
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.800.077.734,00	19.841.373.591,00	4.958.704.143,00	24,99
Beban Barang Ekstra Komptable	1.201.188.405,50	0,00	1.201.188.405,50	0,00
Beban Barang dan Jasa Dana BOS	18.262.526.765,00	19.681.389.448,00	(1.418.862.683,00)	(7,21)
Beban Barang dan Jasa Operasional BLUD	118.279.122.252,94	0,00	118.279.122.252,94	0,00
Jumlah	438.105.530.059,38	455.947.853.658,24	(17.842.323.598,86)	(3,91)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pos-pos beban pada beban barang dan



jasa adalah sebagai berikut:

a. Beban Persediaan

Beban persediaan tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan dan penurunannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.27 Rincian Beban Persediaan

Beban Persediaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Barang Pakai Habis	59.295.552.975,68	185.268.800.810,74	(125.973.247.835,06)	(67,99)
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	38.776.000,00	(38.776.000,00)	(100,00)
Jumlah	59.295.552.975,68	185.307.576.810,74	(126.012.023.835,06)	(68,00)

Beban persediaan secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp59.295.552.975,68 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja barang persediaan TA 2022 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp51.265.837.024,00 yaitu lebih besar pada LO sebesar Rp8.029.715.951,68 karena dipengaruhi oleh:

1. Bertambahnya beban persediaan karena adanya selisih persediaan tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp4.170.270.548,97.
2. Bertambahnya beban persediaan karena adanya penggunaan persediaan yang berasal dari hibah obat sebesar Rp5.021.924.889,73 yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.961.842.650,73 dan pada Dinas PPKBPPPA sebesar Rp60.082.239,00.
3. Bertambahnya beban persediaan (beban barang pakai habis) karena adanya reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp312.748.847,00 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp311.873.847,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.28 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Nama Barang
1	Dinas Sosial	6.300.000,00	Rescue rope, ascender, tali karmentel statis, carbiner crew, figure, pulley single
2	Dinas Perhubungan	173.360.600,00	Rambu marka getar dan zebra cross
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.413.247,00	kartu memori, hdmi, flashdisk, connector, sc,konnector rj,kabel lan, kabel drop, tagihan internet
4	Bagian Umum	16.800.000,00	Bed cover/bedding set untuk rumah jabatan KDH dan WKDH
Jumlah		311.873.847,00	



- b. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp875.000,00 yaitu pada Dinas Kesehatan berupa biaya rapat kegiatan rehab dan pemeliharaan Puskesmas.
4. Bertambahnya beban persediaan atau barang habis pakai sebesar Rp6.626.000,00 yaitu selisih pelunasan utang makan minum fasilitas kesehatan tahun 2021 dan utang makan minum fasilitas kesehatan tahun 2022 pada Dinas Kesehatan.
5. Berkurangnya beban persediaan (barang pakai habis) karena adanya persediaan yang sudah usang/kedaluwarsa sebesar Rp919.934.334,02 yang terdapat pada:
 - Dinas Kesehatan berupa obat-obatan sebesar Rp835.962.581,02;
 - Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa karcis sebesar Rp7.225.425,00;
 - Dinas Perdagangan berupa karcis sebesar Rp41.228.825,00;
 - Dinas Perhubungan berupa karcis sebesar Rp8.324.692,00;
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa karcis sebesar Rp3.860.445,00; dan
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa karcis/blanko sebesar Rp23.332.366,00
6. Berkurangnya beban persediaan (barang pakai habis) karena adanya reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp561.920.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp492.170.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.29 Rincian Reklasifikasi dari Beban Persediaan
ke Peralatan dan Mesin**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	27.000.000,00	Pengadaan mesin klotok
2	Dinas Kesehatan	81.700.000,00	Kursi kerja, headset gaming, webcam, PC
3	Dispera KPLH	91.180.000,00	timbangan digital, treker tierod ball joint separator, meja kayu, lemari kayu, CCTV
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000,00	CCTV
5	Dinas Kominfo	159.050.000,00	Sound System, Wifi acces point, router microtic
6	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	57.250.000,00	Meja kursi, meja sofa (1set), papan nama, dan kursi rapat
		9.800.000,00	CCTV
7	Dinas Perdagangan	25.000.000,00	Tempat sampah beroda, barcode scanner dan module remote barrier gate
8	Kecamatan Daha Barat	31.190.000,00	Dispenser, karpet, pintu kaca, gorden, kompor gas, tabung gas
Jumlah		492.170.000,00	



- b. Reklasifikasi ke gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp39.750.000,00 pada Kelurahan Kandangan Utara berupa rehab paving gedung PKK.
- c. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp30.000.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa kostum penari.

b. Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Rincian Beban Jasa

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Jasa Kantor	84.047.401.235,00	113.637.892.879,50	(29.590.491.644,50)	(26,04)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	56.943.347.027,00	58.915.337.342,00	(1.971.990.315,00)	(3,35)
Beban Sewa	1.245.473.513,00	599.186.800,00	646.286.713,00	107,86
Beban Jasa Konsultansi	2.752.539.957,00	1.064.332.900,00	1.688.207.057,00	158,62
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	39.400.000,00	0,00	39.400.000,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	153.632.342,00	51.720.000,00	101.912.342,00	197,05
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.750.175.750,00	1.832.519.842,00	917.655.908,00	50,08
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	1.237.890,00	126.000.000,00	(124.762.110,00)	(99,02)
Jumlah	147.933.207.714,00	176.226.989.763,50	(28.293.782.049,50)	(16,06)

Beban jasa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp147.933.207.714,00 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja jasa TA 2022 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp151.362.485.326,50 yaitu lebih kecil pada LO sebesar Rp3.429.277.612,50 karena dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Bertambahnya beban jasa karena adanya reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp25.000.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) pada Dinas PUTR sebesar Rp12.000.000,00 berupa honorarium e-Monitoring DAK.
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tidak berwujud (KIB E) pada Dinas Kominfo dan Informatika sebesar Rp13.000.000,00 berupa lisensi *software* akun *zoom meeting* dan *cloud storage*.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

2. Berkurangnya beban jasa karena adanya selisih utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2021 dan 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.167.817.981,50
3. Berkurangnya beban jasa karena adanya reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp1.429.717.959,00, yang terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke tanah (KIB A) sebesar Rp27.700.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa jasa konsultan pengawasan pengurugan lahan TPU Daha Selatan dan peningkatan TPU Gambah.
 - b. Reklasifikasi ke peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp1.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Perdagangan berupa jasa setting e-parkir.
 - c. Reklasifikasi ke gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp910.730.959,00 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.31 Rincian Reklasifikasi dari Beban Jasa ke
Gedung dan Bangunan**

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	109.579.200,00	Jasa rehab rumah dinas dan rehab kelas
2	Dinas Kesehatan	127.794.000,00	Jasa pengawasan renovasi ruang rawat inap PKM Negara
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	9.850.000,00	Jasa perencanaan
		68.050.000,00	Pengawasan pembangunan tempat daur ulang, Stadion 2 Desember, Tugu Dodol, dan peningkatan fungsi hutan untuk taman
4	Dinas Sosial	14.158.400,00	Perubahan Daya Listrik PLN Dinas Sosial
5	Dinas Perhubungan	32.439.000,00	Jasa perencanaan dan pengawasan rehab kantor, kanopi tempat parkir pembangunan halte sungai, rehab WC dan KM
6	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	87.200.000,00	Jasa konsultan pengawasan rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab stadion 2 desember
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.440.000,00	Jasa pengawasan pengadaan gedung kantor
8	Dinas Pertanian	172.956.423,00	Jasa perencanaan pembangunan laboratorium BPP Sungai Raya dan pengawasan renovasi
9	Bagian Umum	53.073.540,00	Jasa perencanaan, dan pengawasan rehab gedung kantor pada bagian umum
10	Kelurahan Kandangan Utara	23.650.000,00	Honorarium perencanaan dan pengawasan rehab paving PKK Kelurahan Kandangan Utara



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
11	Kelurahan Jambu Hilir	14.800.000,00	Jasa perencanaan pemeliharaan gedung kantor
12	Kecamatan Angkinang	29.950.000,00	Jasa penambahan daya listrik
13	Kecamatan Daha Barat	44.020.000,00	Honorarium perencanaan, pengawasan pekerjaan urugan dan siring halaman kantor dan gedung sekretariat PKK
14	Inspektorat Daerah	23.770.396,00	Jasa perencanaan dan pengawasan pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
Jumlah		910.730.959,00	

d. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp490.287.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa dokumen lingkungan untuk normalisasi sungai amandit.

4. Reklasifikasi ke aset lainnya aset tak berwujud sebesar Rp856.741.672,00 pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa jasa perencanaan wilayah, jasa survei kajian/dokumen lingkungan hidup dan permukiman kumuh.

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.32 Rincian Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Pemeliharaan Tanah	7.495.000,00	148.852.121,00	(141.357.121,00)	(94,96)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.566.824.717,00	1.841.349.513,00	(274.524.796,00)	(14,91)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.670.478.238,26	660.245.228,00	1.010.233.010,26	153,01
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.613.754.390,00	15.937.960.880,00	(324.206.490,00)	(2,03)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.250.000,00	191.731.000,00	(164.481.000,00)	(85,79)
Jumlah	18.885.802.345,26	18.780.138.742,00	105.663.603,26	0,56

Beban pemeliharaan pada LO sebesar Rp18.885.802.345,26 memiliki nilai yang berbeda dengan belanja pemeliharaan yang disajikan pada LRA sebesar Rp29.025.936.183,00 yaitu lebih kecil pada LO sebesar Rp10.140.133.837,74 karena adanya reklasifikasi dari beban pemeliharaan ke aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke tanah (KIB A) sebesar Rp1.078.450.000,00 yang terdapat pada:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp760.350.000,00 berupa pengurangan TPU di Daha Selatan dan Gambah; dan
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp318.100.000,00 berupa pengurangan halaman Gedung Serbaguna.
2. Reklasifikasi ke peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp42.820.000,00 yang terdapat pada:
- Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp3.330.000,00 berupa pengadaan CCTV;
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp39.490.000,00 berupa papan skor sepak bola, pompa air dan tandon air, dan tabung pemadam APAR 1 kg.
3. Reklasifikasi ke gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp6.880.802.837,74 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.33 Rincian Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan ke Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	27.000.000,00	jasa pengadaan perbaikan meja, kursi, plafon museum rakyat dan pengecatan ruang pameran museum rakyat
2	Dinas Kesehatan	47.195.000,00	Pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan PKM Wasah
		97.500.000,00	Pemeliharaan bangunan PUSTU Bayur Puskesmas Wasah
		70.000.000,00	Pemeliharaan bangunan Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	203.303.000,00	Honor PPK, PBJ, dan rehabilitasi Gedung Serbaguna Stadion 2 Desember
		199.599.000,00	Pemeliharaan gedung sekretariat MUI
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	191.680.000,00	Pemeliharaan RTH, taman depan pendopo Bupati, dan tugu dodol kandang
5	Dinas Ketahanan Pangan	12.987.500,00	Rehab/perbaikan Gedung Kantor - Perbaikan Pintu Depan
6	Dinas PPKBPPPA	21.978.000,00	Pemeliharaan gedung dan perbaikan lantai Balai Penyuluh KB Kec Kandangan pada Dinas PPKBPPPA Tahun 2022
7	Dinas Kependudukan dan Catpil	25.000.000,00	Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor dan Upah Tukang Pemeliharaan Gedung Kantor
8	Dinas Perhubungan	98.215.000,00	Rehab kantor,kanopi tempat parkir pembangunan halte sungai,rehab WC dan KM
9	Dinas Porapar	1.898.401.800,00	Rehab pagar dan pos keamanan gedung GOS, rehab kolam renang, rehab Stadion 2 desember
10	Dinas Pertanian	2.957.006.900,00	Pemeliharaan BPP Sungai Raya, Daha Barat, Kalumpang, Daha Utara, Kandangan, Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung, Daha Selatan, Loksado



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
11	Dinas Perdagangan	253.962.000,00	Pem.Bang.Gdng pertokoan/pasar, dan Pemeliharaan pasar terpadu dan Pasar Atrium
12	Bagian Umum	115.347.950,00	Pekerjaan rehab gedung kantor pada bagian umum
13	Kecamatan Kandangan	12.989.000,00	Pemeliharaan gedung Kantor Camat Kandangan
14	Kelurahan Kandangan Barat	50.000.000,00	Pembuatan gedung penyimpanan, dan perbaikan kamar mandi/WC
15	Kecamatan Telaga Langsat	19.800.000,00	Rehap atap dan plafond
16	Kecamatan Angkinang	24.850.000,00	Pemeliharaan gedung kantor
17	Kecamatan Daha Utara	397.663.000,00	Honor pengadaan, pengawasan, rehab kantor dan taman rahimin Kecamatan Daha Utara
18	Inspektorat Daerah	156.324.687,74	Pemasangan paving dan pagar Kantor Inspektorat
Jumlah		6.880.802.837,74	

4. Reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) sebesar Rp2.126.261.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum berupa jalan kabupaten, jalan desa, dan pembangunan drainase halaman Mesjid Al-Hidayah Kapuh.
5. Reklasifikasi ke aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp11.800.000,00 yang terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa perencanaan rehab gedung kantor.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.34 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Perjalanan Dinas	49.448.051.867,00	36.110.385.303,00	13.337.666.564,00	36,94
Jumlah	49.448.051.867,00	36.110.385.303,00	13.337.666.564,00	36,94

Beban perjalanan dinas pada LO memiliki nilai yang sama dengan belanja perjalanan dinas yang disajikan pada LRA yaitu sebesar Rp49.448.051.867,00.

e. Beban Uang dan/atau dan Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang/Barang dan Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.4.35 Rincian Beban yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.242.864.320,00	4.675.405.720,00	4.567.458.600,00	97,69
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.557.213.414,00	15165967871,00	391.245.543,00	2,58
Jumlah	24.800.077.734,00	19.841.373.591,00	4.958.704.143,00	24,99

Beban yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat baik berupa uang, barang maupun jasa yang disajikan di LO memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA.

f. Beban Barang Ekstra Komptable

Beban barang ekstra komptable merupakan reklasifikasi dari aset tetap yaitu barang-barang yang mempunyai nilai satuan dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap untuk peralatan dan mesin. Beban barang ekstra komptable ini pada tahun 2021 disajikan sebagai beban lain-lain, sedangkan pada tahun 2022 masuk dalam beban barang dan jasa.

Tabel 5.4.36 Rincian Beban Barang Ekstra Komptable

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	627.724.289,50
2	Dinas Kesehatan	200.717.071,00
3	RSUD Hasan Basry	159.792.095,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.241.150,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	6.129.000,00
6	Dinas Sosial	18.850.000,00
7	Dinas Kominfo	17.650.000,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP	3.324.900,00
9	Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata	58.402.400,00
10	Bagian Umum	24.625.000,00
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00
12	Kelurahan Kandangan Barat	2.400.000,00
13	Kelurahan Kandangan Utara	9.350.000,00
14	Kelurahan jambu hilir	15.960.000,00
15	Kecamatan Angkinang	3.600.000,00
16	Kecamatan Daha Barat	1.780.000,00
17	Inspektorat Daerah	3.042.500,00
Jumlah		1.201.188.405,50



g. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban barang dan jasa BOS tahun 2022 dan 2021 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.37 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Barang dan Jasa BOS	18.262.526.765,00	19.681.389.448,00	(1.418.862.683,00)	(7,21)
Jumlah	18.262.526.765,00	19.681.389.448,00	(1.418.862.683,00)	(7,21)

Beban barang dan jasa BOS yang disajikan pada LO sebesar Rp18.262.526.765,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp18.282.650.015,00, yaitu lebih kecil pada LO sebesar Rp20.123.250,00. Selisih tersebut disebabkan oleh beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Bertambahnya beban barang dan jasa BOS karena adanya reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp153.000,00 berupa pengadaan peralatan dapur pada SMPN 2 Padang Batung.
2. Berkurangnya beban barang dan jasa BOS karena adanya selisih nilai persediaan dana BOS tahun 2021 dan sisa persediaan dana BOS tahun 2022 yang terdapat pada beberapa sekolah negeri sebesar Rp9.133.250,00.
3. Berkurangnya beban barang dan jasa BOS karena adanya reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp11.143.000,00 berupa pengadaan lemari besi pada SMPN 2 Padang Batung.

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban barang dan jasa BLUD yang disajikan pada LO sebesar Rp118.279.122.252,94 sedangkan yang disajikan pada LRA sebesar Rp145.227.038.827,00. Perbedaan nilai antara penyajian LO dan LRA yaitu sebesar Rp26.947.916.574,06, dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bertambahnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya jurnal balik persediaan BLUD RS. H. Hasan Basry sebesar Rp9.740.814.972,00.
2. Bertambahnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya penggunaan persediaan BAHKP yang berasal dari hibah pada BLUD RS. H. Hasan Basry sebesar Rp30.910.000,00.
3. Bertambahnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya penambahan utang tahun 2022 sebesar Rp12.103.700.976,00 yang terdapat pada:
 - RS. H. Hasan Basry sebesar Rp10.763.467.596,00;
 - RS. Daha Sejahtera sebesar Rp1.115.555.000,00;



- Puskesmas Kandangan sebesar Rp95.484.280,00; dan
 - Puskesmas Negara sebesar Rp129.194.100,00.
4. Bertambahnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp26.303.590,00, yaitu reklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B) yang terdapat pada:
- RS. H. Hasan Basry sebesar Rp24.441.090,00 berupa pengadaan alat kesehatan; dan
 - RS Daha Sejahtera sebesar Rp1.862.500,00 berupa pengadaan sprei, bantal, dan guling.
5. Bertambahnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya reklas dari aset lainnya yaitu aset tidak berwujud sebesar Rp3.560.398,00 berupa pengadaan akun premium zoom meeting, hosting monster dan domain renewal.
6. Berkurangnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya pelunasan utang BLUD tahun 2021 sebesar Rp26.893.305.454,00 yang terdapat pada:
- RS. H. Hasan Basry sebesar Rp23.947.945.179,00;
 - RS Daha Sejahtera sebesar Rp2.758.831.000,00;
 - Puskesmas Kandangan sebesar Rp77.534.250,00; dan
 - Puskesmas Negara sebesar Rp108.995.025,00.
7. Berkurangnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya sisa persediaan hibah obat pada RS. H. Hasan Basry sebesar Rp118.031.888,00.
8. Berkurangnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya sisa persediaan berdasarkan hasil stock opname tahun 2022 sebesar Rp19.441.690.256,07 yang terdapat pada:
- RS. H. Hasan Basry sebesar Rp18.622.190.366,35; dan
 - RS. Daha Sejahtera sebesar Rp819.499.889,72.
9. Berkurangnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya persediaan obat yang sudah usang/kedaluwarsa pada BLUD RS. H. Hasan Basry sebesar Rp144.287.594,73.
10. Berkurangnya beban barang dan jasa BLUD karena adanya reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp2.255.891.317,26, yang terdiri dari:
- a. Reklas ke aset tetap tanah (KIB A) sebesar Rp75.400.000,00 pada BLUD RS Daha Sejahtera berupa perencanaan dan pengawasan urugan tanah.
 - b. Reklas ke aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar



Rp356.518.506,00 yang terdapat pada BLUD RS H. Hasan Basry sebesar Rp332.478.506,00 berupa peralatan personal komputer, alat kedokteran umum, alat pendingin, mebel dan pompa, alat studio video dan film; dan pada BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp24.040.000,00 berupa pengadaan gorden.

- c. Reklas ke aset tetap gedung dan bangunan (KIB C) sebesar Rp803.372.811,26 yang terdapat pada BLUD RS H. Hasan Basry sebesar Rp649.121.311,26 berupa honor PPK, pejabat pengadaan pemeliharaan gedung dan pemeliharaan rumah dinas dokter; dan pada BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp154.251.500,00 berupa perencanaan dan pemeliharaan gedung rumah sakit.
- d. Reklas ke jalan, irigasi dan jaringan (KIB D) sebesar Rp297.500.000,00 yang terdapat pada BLUD RS H. Hasan Basry sebesar Rp198.500.000,00 berupa pemeliharaan incinerator; dan pada BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp99.000.000,00 berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
- e. Reklas ke KDP (KIB F) sebesar Rp723.100.000,00 yang terdapat pada BLUD RS H. Hasan Basry sebesar Rp622.800.000,00 berupa Jalan Lingkar RSUD, Jaringan Hidran, dan perencanaan bunker kemoteraphy; dan pada BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp100.300.000,00 berupa honor perencanaan review masterplan, honor pejabat pengadaan jasa apraisal pembelian lahan, dan honor perencanaan.

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pemberian hibah pada TA 2022. Berikut disajikan rincian beban hibah beserta kenaikan/penurunannya:

Tabel 5.4.38 Rincian Beban Hibah

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.181.100.000,00	(4.181.100.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	19.208.763.500,00	13.100.365.900,00	6.108.397.600,00	46,63
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	3.110.068.538,00	(3.110.068.538,00)	(100,00)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.228.066.320,00	0,00	1.228.066.320,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.753.984.852,00	0,00	6.753.984.852,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.663.629.400,00	3.783.113.150,00	(119.483.750,00)	(3,16)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.320.767.943,00	0,00	2.320.767.943,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	600.000.000,00	(600.000.000,00)	(100,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	683.950.320,00	683.950.320,00	0,00	0,00
Jumlah	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00	8.400.564.427,00	33,00

Beban hibah yang disajikan dalam LO sebesar Rp33.859.162.335,00 memiliki jumlah yang sama dengan belanja hibah sebagaimana yang disajikan dalam LRA.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Tabel 5.4.39 Rincian Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.371.911.000,00	3.432.810.000,00	(60.899.000,00)	(1,77)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	95.731.900,00	159.025.000,00	(63.293.100,00)	(39,80)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	14.246.498.000,00	12.503.342.077,00	1.743.155.923,00	13,94
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	1.521.442.000,00	(1.521.442.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	100.575.000,00	(100.575.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	256.075.000,00	0,00	256.075.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,	2.945.550.000,00	2.836.050.000,00	109.500.000,00	3,86



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Jumlah	20.915.765.900,00	20.553.244.077,00	362.521.823,00	1,76

Beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp20.915.765.900,00 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja bantuan sosial sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp18.400.504.900,00 yaitu lebih besar Rp2.515.261.000,00. Selisih tersebut merupakan penambahan beban bantuan yang berasal dari dana belanja tidak terduga (BTT) pada Dinas Sosial yaitu bantuan sosial berupa uang untuk individu/keluarga untuk korban bencana alam, santunan biaya berobat, dan santunan kematian.

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beban Penyisihan Piutang TA 2022 terdiri atas:

Tabel 5.4.40 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Penyisihan Piutang Pajak	42.195.825,23	76.042.030,41	(33.846.205,18)	(44,51)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	304.707.572,40	262.070.017,50	42.637.554,90	16,27
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	53.613.750,10	92.031.607,60	(38.417.857,50)	(41,74)
Jumlah	400.517.147,73	430.143.655,51	(29.626.507,78)	(6,89)

1. Beban penyisihan piutang pajak merupakan beban penyisihan untuk piutang PBB sebesar Rp42.195.825,23.
2. Beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp304.707.572,40 terdiri atas:
 - a. Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp269.532,40 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
 - b. Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp3.049.675,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - c. Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar grosir sebesar Rp301.388.365,00 yang terdapat pada Dinas Perdagangan.
3. Beban penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp53.613.750,10 terdiri atas:



- Beban penyisihan piutang pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan sebesar Rp6.164,38;
- Beban penyisihan piutang BLUD pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp47.666.749,72;
- Beban penyisihan piutang BLUD pada RS Daha Sejahtera sebesar Rp5.816.841,00;
- Beban penyisihan piutang BLUD pada Puskesmas Negara sebesar Rp123.995,00.

5.4.2.1.6 Beban Lain-lain

Beban lain-lain selama tahun 2022 terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.4.41 Rincian Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	38.911.313,43	(38.911.313,43)	(100,00)
Beban Lain-lain	1.280.438.211,22	3.116.467.673,26	(1.836.029.462,04)	(58,91)
Jumlah Beban	1.280.438.211,22	3.155.378.986,69	(1.874.940.775,47)	(59,42)

Terdapat beban lain-lain sebesar Rp1.280.438.211,22 berupa persediaan barang yang sudah tidak digunakan lagi karena usang/kedaluwarsa/rusak yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp835.962.581,02 yang terdiri dari persediaan obat sebesar Rp828.464.981,02 dan persediaan blanko/karcis sebesar Rp7.497.600,00.
- RS. H. Hasan Basry sebesar Rp144.287.594,73 berupa persediaan obat.
- Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp223.441.707,47 yang terdiri dari persediaan karcis sebesar Rp7.225.425,00 dan persediaan bahan kimia sebesar Rp216.216.282,47.
- Dinas Perdagangan sebesar Rp41.228.825,00 berupa persediaan karcis.
- Dinas Perhubungan sebesar Rp8.324.692,00 berupa persediaan karcis.
- Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp3.860.445,00 berupa persediaan karcis.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp23.332.366,00 berupa persediaan karcis/blanko.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 merupakan beban penyusutan tahun berjalan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud yang terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.4.42 Rincian Beban Penyusutan/Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.312.410.570,00	49.928.887.571,00	1.383.522.999,00	2,77
Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	26.917.444.701,00	24.888.935.528,00	2.028.509.173,00	8,15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.675.636.021,00	101.908.770.776,57	26.766.865.244,43	26,27
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.399.000,00	1.669.832,00	729.168,00	43,67
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.203.227.679,00	670.599.635,00	532.628.044,00	79,43
Jumlah	208.111.117.971,00	177.398.863.342,57	30.712.254.628,43	17,31

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Bupati tentang Penyusutan Aset Tetap tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
2. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada periode bulan saat perolehan aset tetap.

Adapun rincian beban penyusutan per SKPD untuk masing-masing KIB adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.43 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD

No	SKPD	Beban Penyusutan (Rp)				Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.934.934.183,00	6.398.430.961,00	37.353.626,00	2.399.000,00	13.373.117.770,00
2	Dinas Kesehatan	7.190.099.954,00	3.441.055.507,00	164.517.549,00	0,00	10.795.673.010,00
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	18.860.605.621,00	4.346.980.876,00	1.792.772.204,00	0,00	25.000.358.701,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	877.220.783,00	1.204.982.864,00	118.121.890.538,00	0,00	120.204.094.185,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	4.523.558.502,00	968.586.446,00	7.595.012.373,00	0,00	13.087.157.321,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	584.102.098,00	31.542.456,00	0,00	0,00	615.644.554,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.649.025,00	18.988.843,00	757.958,00	0,00	148.395.826,00
8	Dinas Sosial	152.015.006,00	217.457.264,00	2.632.379,00	0,00	372.104.649,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	232.755.598,00	11.346.843,00	765.525,00	0,00	244.867.966,00
10	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	96.863.152,00	12.736.586,00	0,00	0,00	109.599.738,00
11	Dinas Perhubungan	927.510.909,00	184.302.329,00	341.679.942,00	0,00	1.453.493.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	SKPD	Beban Penyusutan (Rp)				Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.853.875.179,00	30.241.978,00	3.640.861,00	0,00	1.887.758.018,00
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	104.773.797,00	140.862.808,00	2.874.601,00	0,00	248.511.206,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	578.368.752,00	92.287.854,00	1.168.806,00	0,00	671.825.412,00
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	352.343.312,00	2.457.849.853,00	56.556.304,00	0,00	2.866.749.469,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	227.142.017,00	114.738.980,00	2.128.986,00	0,00	344.009.983,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA	330.068.785,00	126.246.324,00	1.364.542,00	0,00	457.679.651,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	68.594.733,00	40.044.175,00	90.416,00	0,00	108.729.324,00
19	Dinas Perikanan	350.654.005,00	118.740.313,00	87.165.780,00	0,00	556.560.098,00
20	Dinas Pertanian	586.578.978,00	663.339.517,00	381.637.116,00	0,00	1.631.555.611,00
21	Dinas Perdagangan	398.771.511,00	3.315.158.946,00	27.083.600,00	0,00	3.741.014.057,00
22	Sekretariat Daerah	2.314.065.039,00	869.435.294,00	26.449.685,00	0,00	3.209.950.018,00
23	Sekretariat DPRD	769.647.419,00	119.159.258,00	2.425.282,00	0,00	891.231.959,00
24	BAPPELITBANGDA	95.820.761,00	0,00	1.684.517,00	0,00	97.505.278,00
25	BPKPD	666.206.564,00	319.402.097,00	9.057.945,00	0,00	994.666.606,00
26	BKPSDM	420.309.849,00	42.823.029,00	1.355.000,00	0,00	464.487.878,00
27	Inspektorat Daerah	113.724.650,00	47.706.370,00	4.077.250,00	0,00	165.508.270,00
28	Kecamatan Sungai Raya	61.152.642,00	49.525.078,00	487.500,00	0,00	111.165.220,00
29	Kecamatan Loksado	111.970.056,00	47.331.678,00	109.091,00	0,00	159.410.825,00
30	Kecamatan Daha Barat	100.689.155,00	73.199.715,00	1.148.868,00	0,00	175.037.738,00
31	Kecamatan Padang Batung	97.195.708,00	122.115.972,00	1.018.910,00	0,00	220.330.590,00
32	Kecamatan Telaga Langsat	117.680.147,00	52.536.613,00	231.247,00	0,00	170.448.007,00
33	Kecamatan Angkinang	79.000.910,00	170.515.184,00	0,00	0,00	249.516.094,00
34	Kecamatan Kandangan	449.301.140,00	215.949.220,00	2.739.888,00	0,00	667.990.248,00
35	Kecamatan Simpur	90.663.004,00	110.437.998,00	3.457.932,00	0,00	204.558.934,00
36	Kecamatan Daha Selatan	115.522.912,00	512.881.266,00	259.800,00	0,00	628.663.978,00
37	Kecamatan Daha Utara	137.069.021,00	132.478.369,00	0,00	0,00	269.547.390,00
38	Kecamatan Kalumpang	143.570.861,00	91.426.382,00	40.000,00	0,00	235.037.243,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69.334.832,00	4.599.455,00	0,00	0,00	73.934.287,00
Jumlah Beban		51.312.410.570,00	26.917.444.701,00	128.675.636.021,00	2.399.000,00	206.907.890.292,00

Beban penyusutan aset tetap seluruhnya dipengaruhi oleh beban penyusutan aset tetap tahun berjalan.

Tabel 5.4.44 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD

No.	SKPD	Beban Amortisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	271.425.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	SKPD	Beban Amortisasi (Rp)
2	Dinas Kesehatan	31.277.278,00
3	RSUD Hasan Basry	6.168.542,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	535.009.398,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	155.741.228,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.388.889,00
7	Dinas Perhubungan	2.777.777,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.335.998,00
9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	23.932.500,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.366.667,00
11	Dinas Perikanan	20.000.000,00
12	Dinas Perdagangan	3.972.222,00
13	Sekretariat Daerah	3.000.000,00
14	Sekretariat DPRD	83.333,00
15	BAPPELITBANGDA	7.472.458,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	63.276.389,00
Jumlah		1.203.227.679,00

Beban amortisasi aset tak berwujud seluruhnya dipengaruhi oleh beban amortisasi tahun 2022.

5.4.2.3 Beban Transfer

Beban transfer terdiri atas beban transfer bagi hasil pendapatan dan bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.45 Rincian Beban Transfer

Beban Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Transfer Bagi Hasil	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	80.837.203.036,00	64.400.000.000,00	16.437.203.036,00	25,52
Jumlah Beban	83.466.068.036,00	67.028.865.000,00	16.437.203.036,00	24,52

5.4.2.3.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban transfer bagi hasil terdiri atas beban transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi kepada desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.46 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.523.681.250,00	1.528.865.000,00	(5.183.750,00)	(0,34)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.105.183.750,00	1.100.000.000,00	5.183.750,00	0,47



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Jumlah Beban	2.628.865.000,00	2.628.865.000,00	0,00	0,00

5.4.2.3.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban transfer bantuan keuangan berupa beban transfer alokasi dana desa.

Tabel 5.4.47 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Beban Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	78.300.000.000,00	64.400.000.000,00	13.900.000.000,00	21,58
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.537.203.036,00	0,00	2.537.203.036,00	0,00
Jumlah Beban	80.837.203.036,00	64.400.000.000,00	16.437.203.036,00	25,52

Beban transfer bantuan keuangan ke desa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja transfer TA 2022 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar jumlah dana desa yang telah disalurkan tahun 2022 yaitu Rp107.798.562.000,00.

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.48 Kegiatan Non Operasional – LO

Kegiatan Non Operasional	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	11.004.448.793,00	3.479.026.003,00	7.525.422.790,00	216,31
Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional	(11.004.448.793,00)	(3.479.026.003,00)	(7.525.422.790,00)	216,31

5.4.3.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar TA 2022 sebesar Rp11.004.448.793,00 merupakan jumlah nilai buku atas penghapusan aset tetap berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang penghapusan aset tetap SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.49 Rincian Defisit Penghapusan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Peralatan dan Mesin	220.430.417,00	281.232.733,00	(60.802.316,00)	(21,62)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pele- pasan Aset Non Lancar	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Gedung dan Bangunan	116.686.202,00	327.409.917,00	(210.723.715,00)	(64,36)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.160.000,00	2.855.602.401,00	(2.808.442.401,00)	(98,35)
Aset Tetap Lainnya	10.620.172.174,00	0,00	10.620.172.174,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	14.780.952,00	(14.780.952,00)	(100,00)
Jumlah	11.004.448.793,00	3.479.026.003,00	7.525.422.790,00	216,31

- a. Defisit penghapusan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp220.430.417,00 merupakan nilai buku atas penghapusan aset pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.50 Daftar Nilai Buku Penghapusan Peralatan dan Mesin per SKPD

No	SKPD	Nama Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Mobil ambulans	300.020.200,00	230.853.533,00	69.166.667,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan pemancar UHF	191.070.000,00	39.806.250,00	151.263.750,00
Jumlah			491.090.200,00	270.659.783,00	220.430.417,00

- b. Defisit penghapusan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp116.686.202,00 berupa nilai buku atas penghapusan bangunan tempat parkir pada kantor Kecamatan Daha Barat dengan nilai aset sebesar Rp132.649.000,00 dan nilai penyusutan sebesar Rp15.962.798,00.
- c. Defisit penghapusan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp47.160.000,00 berupa penghapusan trotoar (saluran drainase) yakni penghapusan sebagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- d. Defisit penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp10.620.172.174,00 berupa penghapusan buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Saldo pos luar biasa terdiri atas pendapatan luar biasa dikurangi beban luar biasa. Tidak ada saldo yang menjadi pendapatan luar biasa maupun beban luar biasa selama tahun 2022.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT

Surplus – LO TA 2022 berasal dari pos-pos pendapatan dikurangi pos-pos beban ditambah pos-pos dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

Tabel 5.4.51 Rincian Surplus/Defisit – LO

Surplus/(Defisit) - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Pendapatan - LO	1.643.437.594.211,27	1.290.243.209.236,93	353.194.384.974,34	27,37
Beban - LO	1.277.549.116.774,33	1.229.083.571.847,01	48.465.544.927,32	3,94
Surplus dari Kegiatan Operasi	365.888.477.436,94	61.159.637.389,92	304.728.840.047,02	498,25



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Surplus/(Defisit) - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2022	Tahun 2021		
Surplus/(Defisit) dari Keg. Non Operasional	(11.004.448.793,00)	(3.479.026.003,00)	(7.525.422.790,00)	216,31
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus - LO	354.884.028.643,94	57.680.611.386,92	297.203.417.257,02	515,26



5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	367.044.699.895,38	182.481.522.867,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(201.110.962.333,55)	(260.671.048.727,16)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9.956.780.000,00)	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	277.646.670,00	(12.427.956,00)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas	156.254.604.231,83	(78.201.953.815,54)
Saldo Awal Kas	224.163.148.418,74	302.365.102.234,28
Kas di RKUD	371.416.747.099,50	164.313.797.944,95
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.500.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Dana Kapitasi JKN	935.525.007,50	924.998.385,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.787.788.190,57	58.907.198.654,79
Kas di Dana BOS	45.683,00	4.653.434,00
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	380.140.105.980,57	224.163.148.418,74
Kas Lainnya	277.646.670,00	0,00
Saldo Akhir Kas	380.417.752.650,57	224.163.148.418,74

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar, yang terdiri dari:

Tabel 5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.574.458.084.733,88	1.342.344.116.148,62
Arus Keluar Kas	1.207.413.384.838,50	1.159.862.593.281,00
Jumlah Arus Kas Bersih	367.044.699.895,38	182.481.522.867,62



5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	17.300.630.533,90	13.543.126.921,00
Penerimaan Retribusi Daerah	6.818.208.641,00	6.608.175.981,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.713.672.614,00	6.091.259.048,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	135.163.178.415,98	221.205.205.369,62
Penerimaan Dana Bagi Hasil	496.224.513.847,00	197.773.311.486,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	473.900.465.240,00	474.753.627.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	99.395.904.042,00	71.332.731.438,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	98.779.699.710,00	87.753.043.073,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	11.572.948.000,00	53.518.401.000,00
Penerimaan Dana Desa	107.798.562.000,00	118.303.532.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.313.759.249,00	68.817.570.282,00
Penerimaan Hibah	476.542.441,00	55.024.550,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	22.589.108.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.574.458.084.733,88	1.342.344.116.148,62

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan pendapatan pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2022, terdapat perbedaan antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.574.458.084.733,88 dengan jumlah pendapatan pada LRA sebesar Rp1.574.848.507.549,88 atau terdapat selisih sebesar Rp390.422.816,00. Selisih tersebut disebabkan terdapat perbedaan penyajian hasil penjualan atas barang milik daerah yang tidak dipisahkan yaitu pendapatan dari:

- penjualan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp209.674.834,00;
- penjualan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.099.999,00;
- penjualan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp47.160.000,00; dan
- penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp118.487.983,00.

Pendapatan dari penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan tersebut diatas pada LRA disajikan sebagai pendapatan sedangkan pada LAK disajikan sebagai arus masuk kas dari aktivitas investasi.



5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, juga termasuk pengeluaran untuk pembayaran transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Rincian Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pembayaran Pegawai	491.961.749.591,00	482.702.664.650,00
Pembayaran Barang	469.412.076.976,50	444.359.498.382,00
Pembayaran Hibah	33.859.162.335,00	25.458.597.908,00
Pembayaran Bantuan Sosial	18.400.504.900,00	17.600.518.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.515.261.000,00	4.408.917.341,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.528.865.000,00	1.528.865.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	188.635.765.036,00	182.703.532.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.207.413.384.838,50	1.159.862.593.281,00

Pos-pos arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan belanja operasi pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2022, terdapat perbedaan antara jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.207.413.384.838,50 dengan jumlah belanja operasi pada LRA sebesar Rp1.013.633.493.802,50 atau terdapat selisih sebesar Rp193.779.891.036,00. Selisih tersebut adalah belanja tidak terduga sebesar Rp2.515.261.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp191.264.630.036,00 pada LRA yang bukan merupakan belanja operasi namun dalam LAK disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri atas selisih arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	390.422.816,00	250.167.247,00
Arus Keluar Kas	201.501.385.149,55	260.921.215.974,16



Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Jumlah Arus Kas Bersih	(201.110.962.333,55)	(260.671.048.727,16)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan yang bersumber dari aset tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penjualan Peralatan dan Mesin	209.674.834,00	215.687.247,00
Penjualan Bangunan dan Gedung	15.099.999,00	0,00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.160.000,00	28.980.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	118.487.983,00	5.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	390.422.816,00	250.167.247,00

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2022 terdiri dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.674.834,00 yaitu hasil penjualan lelang Peralatan dan Mesin berupa penjualan kendaraan dinas, alat berat dan peralatan Kesehatan sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/22/KUM/2022 tentang Penetapan Penjualan, Nilai Limit, Paket Penjualan dan Uang Jaminan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Penjualan Hasil Lelang Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Lelang (Rp)
1	Kendaraan bermotor roda dua	13 unit	37.111.834,00
2	Kendaraan bermotor roda empat	1 unit	2.600.000,00
3	Alat berat stone crusher	2 unit	145.145.000,00
4	Alat laboratorium	2 unit	3.818.000,00
5	Ranjang Pasien	2 unit	21.000.000,00
Jumlah			209.674.834,00

2. Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.099.999,00 yaitu hasil penjualan lelang bongkaran rumah sakit sesuai dengan SK Bupati Nomor 188.45/22/KUM/2022 tentang Penetapan Penjualan, Nilai Limit, Paket Penjualan dan Uang Jaminan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahun 2022.



3. Penjualan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp47.160.000,00 berupa biaya kompensasi pembongkaran trotoar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.8 Rincian Pembongkaran Trotoar

No.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Biaya Ganti Rugi (Rp)
1	Nomor 25 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend. Sudirman Tibung Raya	5 meter	4.500.000,00
2	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani No. 63 Kandangan	6,5 meter	5.850.000,00
3	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend. Sudirman RT 4 Tibung Raya	4 meter	3.600.000,00
4	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Kandangan	2 meter	1.800.000,00
5	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. Jend. Sudirman Tibung Raya	5,5 meter	4.950.000,00
6	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Kandangan	10,2 meter	9.180.000,00
7	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani No.14 Gambah Luar Muka	7,7 meter	6.930.000,00
8	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Kandangan Utara	4 meter	3.600.000,00
9	Nomor 43 Tahun 2022	Trotoar/Saluran Drainase	Jl. A. Yani Parincahan Muka	7,5 meter	6.750.000,00
Total					47.160.000,00

4. Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp118.487.983,00 berupa penjualan hewan ternak sapi yang terbagi atas:
- Penjualan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sebesar Rp3.000.000,00 sebanyak 2 (dua) ekor karena hewan ternak tersebut sakit.
 - Penjualan melalui lelang berupa hewan ternak sapi sebesar Rp115.487.983,00 sesuai SK Bupati Nomor 188.45/22/KUM/2022 tentang Penetapan Penjualan, Nilai Limit, Paket Penjualan dan Uang Jaminan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahun 2022. Hewan ternak sapi tersebut berupa 8 (delapan) ekor sapi jantan dengan kondisi tidak produktif dan 1 (satu) ekor sapi betina dengan kondisi tidak mau menyusui.

Terdapat perbedaan jumlah harga lelang pada SK Penetapan Pemenang Lelang dengan yang diterima di Kasda sebesar Rp2.900,00 yang merupakan biaya setor/transfer dari KPKNL.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Perolehan Tanah	117.926.000,00	1.563.402.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Perolehan Peralatan dan Mesin	43.292.195.973,00	55.907.592.945,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	69.144.610.697,55	108.565.226.735,16
Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	88.389.484.279,00	93.351.134.994,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	557.168.200,00	1.533.858.800,00
Jumlah Arus Keluar Kas	201.501.385.149,55	260.921.215.974,16

Arus keluar kas dari aktivitas investasi memiliki nilai yang sama dengan realisasi belanja modal pada LRA yaitu sebesar Rp201.501.385.149,55.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pembiayaan atau pemberian pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	43.220.000,00	0,00
Arus Keluar Kas	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(9.956.780.000,00)	0,00

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan berasal dari penerimaan pembiayaan yaitu penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada BUMDes.

Tabel 5.5.11 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada BUMDes	43.220.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	43.220.000,00	0,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman tersebut berupa setoran pengembalian dari Badan Usaha Milik Desa yang sudah tidak beroperasi lagi yaitu pada BUMDes Kecamatan Angkinang sebesar Rp8.220.000,00 dan BUMDes Kecamatan Padang Batung sebesar Rp35.000.000,00.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan berasal dari pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan.



Tabel 5.5.12 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	10.000.000.000,00	0,00

Pembentukan dana cadangan dimaksudkan dalam rangka mendanai kegiatan Pemilukada tahun 2024 dengan tujuan agar seluruh keperluan pembiayaan dalam tahap kegiatan Pemilukada tersedia sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

Tabel 5.5.13 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas	77.562.263.578,85	81.763.928.390,00
Arus Keluar Kas	77.284.616.908,85	81.776.356.346,00
Jumlah Arus Kas Bersih	277.646.670,00	(12.427.956,00)

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.686.080.738,85	70.837.737.347,00
- IWP 20.062.001.364,00		
- BJPS Kesehatan 872.600,00		
- Pajak Penghasilan 22.167.500.327,85		
- PPN 19.178.059.777,00		
- Uang Jaminan Bongkar Reklame 277.646.670,00		
Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:	15.396.032.638,00	9.708.485.924,00
- UP 9.043.630.699,00		
- TU 6.352.401.939,00		
Pengembalian Sisa Kas di Bend. Pengeluaran TA 2022	480.150.202,00	1.217.705.119,00
- setoran sisa UP 456.369.301,00		
- setoran sisa TU 23.780.901,00		



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas	77.562.263.578,85	81.763.928.390,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.15 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	61.408.434.068,85	70.850.165.303,00
- IWP 20.062.001.364,00		
- BJPS Kesehatan 872.600,00		
- Pajak Penghasilan 22.167.500.327,85		
- PPN 19.178.059.777,00		
Penempatan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:	15.876.182.840,00	10.926.191.043,00
- UP 9.500.000.000,00		
- TU 6.376.182.840,00		
Jumlah Arus Keluar Kas	77.284.616.908,85	81.776.356.346,00

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan Kas)

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.16 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	367.044.699.895,38	182.481.522.867,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(201.110.962.333,55)	(260.671.048.727,16)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9.956.780.000,00)	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	277.646.670,00	(12.427.956,00)
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	156.254.604.231,83	(78.201.953.815,54)

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas adalah saldo akhir pada Kas Daerah, Kas BLUD, Kas Dana JKN, dan Kas Dana BOS yang memiliki nilai yang sama dengan SiLPA pada LRA. Perhitungan saldo akhir kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.17 Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	224.163.148.418,74	302.365.102.234,28
Kenaikan/(Penurunan) Kas	156.254.604.231,83	(78.201.953.815,54)
Kas di RKUD	371.416.747.099,50	164.313.797.944,95



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	12.500.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Dana Kapitasi JKN	935.525.007,50	924.998.385,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.787.788.190,57	58.907.198.654,79
Kas di Dana BOS	45.683,00	4.653.434,00
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	380.140.105.980,57	224.163.148.418,74
Kas Lainnya	277.646.670,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	380.417.752.650,57	224.163.148.418,74

Saldo akhir kas pada LAK tahun 2022 sebesar Rp380.417.752.650,57 mempunyai nilai yang berbeda dengan SiLPA yang disajikan pada LRA sebesar Rp380.140.105.980,57, yakni lebih besar Rp277.646.670,00. Selisih tersebut merupakan nilai atas saldo uang jaminan bongkar reklame yang dicatat sebagai kas lainnya serta utang kepada pihak ketiga dan disajikan sebagai aktivitas transitoris pada laporan arus kas.



5.7 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.841.972.708.466,03 berasal dari:

1. Saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.466.876.675.921,88 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
2. Ditambah surplus dari Laporan Operasional TA 2022 sebesar Rp354.884.028.643,94.
3. Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp20.212.003.900,21.

Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	3.466.876.675.921,88	3.411.000.311.989,37
SURPLUS/DEFISIT – LO	354.884.028.643,94	57.680.611.386,92
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Ekuitas Lainnya	20.212.003.900,21	(1.804.247.454,41)
EKUITAS AKHIR	3.841.972.708.466,03	3.466.876.675.921,88

5.7.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp3.466.876.675.921,88 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2021. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp3.411.000.311.989,37 ditambah surplus – LO tahun 2021 sebesar Rp57.680.611.386,92 ditambah koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar (Rp1.804.247.454,41).

1. Ekuitas awal TA 2021 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020.
2. Surplus/(Defisit) – LO TA 2021 berasal dari pendapatan – LO dikurangi Beban TA 2021 (lihat juga Laporan Operasional untuk tahun 2021).
3. Koreksi ekuitas tahun 2021 sebesar Rp1.804.247.454,41 berasal dari koreksi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.6.2 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2021

Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2021	(Rp)
Penyesuaian atas penyisihan piutang PBB	9.635.175,90
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pasar grosir	108.674.600,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	331.760,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang BLUD	163.112.049,69
Penyesuaian atas penyisihan piutang hasil pengelolaan dana bergulir	39.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2021	(Rp)
Penyesuaian atas penyisihan piutang penjualan angsuran/cicilan	3.000.000,00
Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi	949.504.790,00
Penyesuaian atas aset tetap yang baru ditemukan (inventarisasi aset)	1.739.232.000,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2020	132.482,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang BLUD tahun 2020	124.602.510,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang transfer Pemerintah Provinsi (Pajak Rokok Desember 2020)	1.675.733.591,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang BLUD	3.000.000,00
Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar yang sudah diselesaikan PMK No. 129 Tahun 2021)	49.769.108.658,00
Jumlah	54.585.717.616,59
Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2021	(Rp)
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021	2.626.400,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat utang BLUD tahun 2020	1.500.000,00
Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar yang sudah diselesaikan PMK No.129 Tahun 2021)	18.177.423.834,00
Penyesuaian atas koreksi utang Transfer Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No.129 Tahun 2021)	38.208.414.837,00
Jumlah	56.389.965.071,00
Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2021	(1.804.247.454,41)

5.7.2 SURPLUS/(DEFISIT) – LO TA 2022

Surplus – LO TA 2022 sebesar Rp354.884.028.643,94 berasal dari pendapatan - LO dikurangi beban - LO TA 2022. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

5.7.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR

Koreksi ekuitas berupa koreksi yang menambah maupun mengurangi selama TA 2022. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas:

Tabel 5.4.3 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2022

Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2022	(Rp)
Penyesuaian atas penyisihan piutang PBB	10.280.505,80
Penyesuaian atas penyisihan piutang pajak reklame	13.945,71
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pasar grosir	57.047.400,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	408.870,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang BLUD	91.831.617,70
Penyesuaian atas koreksi nilai persediaan	24.418.325,00
Penyesuaian atas koreksi penambahan aset tetap karena hibah tahun 2021	143.370.300,00
Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi	25.509.563.477,00
Penyesuaian atas koreksi penambahan aset lainnya (aset tak berwujud) karena hibah tahun 2021	44.834.749,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2022	(Rp)
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang belanja tahun 2021	244.219.409,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang transfer Pemerintah Provinsi (Pajak Rokok Desember 2020)	1.864.011.356,00
Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar yang sudah diselesaikan PMK No. 129 Tahun 2021)	14.167.101.077,00
Jumlah	42.157.101.032,21
Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2022	(Rp)
Penyesuaian atas koreksi utang Transfer Pemerintah Pusat (lebih bayar tahun 2020 dan 2021 sesuai PMK No.127 Tahun 2022)	21.923.593.132,00
Penyesuaian atas koreksi pengurangan aset tetap karena dihibahkan tahun 2021	21.504.000,00
Jumlah	21.945.097.132,00
Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2022	20.212.003.900,21

Saldo koreksi ekuitas lainnya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi nilai persediaan sebesar Rp24.418.325,00 yaitu persediaan tahun 2021 yang belum tercatat pada Dinas Perhubungan berupa karcis (bahan cetak) dan kuitansi penerimaan retribusi uji PKB (ATK).
2. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas piutang berupa piutang tahun sebelumnya yang belum tercatat sebesar Rp1.864.011.356,00, yaitu piutang transfer dana bagi hasil dari pemerintah provinsi berupa kurang bayar pajak rokok bulan Desember tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2022.
3. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi penyisihan piutang berupa penyisihan atas pelunasan tahun sebelumnya sebesar Rp159.582.339,21 yang terdiri atas:
 - a. Koreksi penyisihan piutang pajak sebesar Rp10.294.451,51, terdiri dari koreksi penyisihan piutang PBB sebesar Rp10.280.505,80, dan penyisihan piutang pajak reklame sebesar Rp13.945,71;
 - b. Koreksi penyisihan piutang retribusi sebesar Rp57.456.270,00, terdiri dari penyisihan piutang retribusi pasar grosir sebesar Rp57.047.400,00, dan penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp408.870,00;
 - c. Koreksi penyisihan piutang BLUD sebesar Rp91.831.617,70, terdiri atas koreksi ekuitas penyisihan piutang BLUD RS. H. Hasan Basry sebesar Rp71.852.248,50, BLUD Puskesmas Kandangan sebesar Rp14.925,00, BLUD Puskesmas Negara sebesar Rp179.770,00, dan BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp19.784.674,20;



4. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas aset tetap berupa hibah aset tetap tahun sebelumnya yang baru tercatat sebesar Rp143.370.300,00 yang terdapat pada:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.370.300,00 berupa hibah personal komputer, printer dan modem dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai Berita Acara No. 11/BAST/DISPMPTSP Tahun 2021; dan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp128.000.000,00 berupa hibah mobil Daihatsu Grand Max dari Bank Kalsel.
5. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas akumulasi penyusutan aset tetap berupa kapitalisasi ke aset induk sebesar Rp25.509.563.477,00 yaitu kapitalisasi aset tetap jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa ruas jalan.
6. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya hibah aset lainnya atau aset tak berwujud tahun sebelumnya yang baru tercatat sebesar Rp44.834.749,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah berupa perangkat lunak dari Lemhanas RI sesuai BASTPL No.Lisensi ESU594941 Tgl 21 Maret 2018.
7. Bertambahnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas kewajiban jangka pendek berupa koreksi atas saldo awal utang sebesar Rp14.411.320.486,00 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi lebih catat utang belanja pegawai iuran jaminan kesehatan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6.118.408,00 karena sudah dibayarkan pada bulan Desember tahun 2021.
 - b. Koreksi lebih catat utang BLUD RS H. Hasan Basry sebesar Rp1,00 berupa lebih catat utang pada distributor obat sesuai hasil konfirmasi;
 - c. Koreksi lebih catat utang BLUD RS Daha Sejahtera sebesar Rp238.101.000,00 berupa lebih catat utang klaim Covid karena adanya perubahan regulasi;
 - d. Adanya utang dana transfer pemerintah pusat tahun 2020 yang telah diselesaikan sebesar Rp14.167.101.077,00 sesuai KMK Nomor 29 dan KMK nomor 37 Tahun 2022.
8. Berkurangnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas kewajiban jangka pendek berupa utang dana transfer pemerintah pusat tahun 2020 dan 2021 yang belum diselesaikan sebesar Rp21.923.593.132,00 sesuai PMK Nomor 127/PMK.07/2022.
9. Berkurangnya koreksi ekuitas karena adanya koreksi ekuitas aset tetap berupa hibah tanah Markas Komando Polsek Simpur sesuai BA No 032/08/BAST-



HBH/BPKPD/2021 sebesar Rp21.504.000,00 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5.7.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.841.972.708.466,03 merupakan ekuitas awal sebesar Rp3.466.876.675.921,88 ditambah surplus dari Laporan Operasional TA 2022 sebesar Rp354.884.028.643,94 ditambah koreksi ekuitas TA 2022 sebesar Rp20.212.003.900,21.



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN DAN
KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

6.1 PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk di dalamnya Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Analisis Standar Belanja.

Pada Tahun 2016 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu pada tahun 2016 diterbitkan juga Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dan penyesuaian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Pada tanggal 16 Desember 2020 ditetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/394/KUM/2020 tentang Penghapusan Penyertaan Modal Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil pada Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/097/KUM/2017 tentang Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil dan Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2022. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Analisis Standar Belanja yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun draf dimaksud namun belum ditetapkan sebagai Perkada pada tahun 2022 dikarenakan



Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022, sehingga perlu fasilitasi untuk proses penetapan Perkada.

6.2 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

6.2.1 Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2022

Alokasi dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok ditetapkan untuk periode tiga bulan (Triwulan) melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Alokasi dana bagi hasil pajak-pajak tersebut untuk Triwulan IV (periode Oktober sampai dengan Desember 2022) ditetapkan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.3.1 Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2022

Uraian	Bagi Hasil Pajak	Alokasi (Rp)	Peraturan Gubernur Kalsel (Pergub)
Alokasi Triwulan IV TA 2022	PKB	2.425.067.402,00	Nomor 05 Tahun 2023
Alokasi Triwulan IV TA 2022	BBNKB	2.656.953.918,00	Nomor 05 Tahun 2023
Alokasi Triwulan IV TA 2022	PBBKB	27.138.247.011,00	Nomor 06 Tahun 2023
Alokasi Triwulan IV TA 2022	PAP	61.794.671,00	Nomor 07 Tahun 2023
Alokasi Oktober - November 2022	Pajak Rokok	2.646.752.349,00	Nomor 08 Tahun 2022
J U M L A H		34.928.815.351,00	



BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridhoi setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY